

LAPORAN TAHUNAN 2018

STP

BERSIAP UNTUK PELUANG



STP DALAM ANGKA

Pendapatan

2018
1.899,8

2017
1.908,5

2016
1.821,4

(Dalam Miliar Rupiah)

EBITDA

2018
1.637,7

2017
1.646,1

2016
1.553,7

(Dalam Miliar Rupiah)

Jumlah Menara

2018¹⁾
6.412

2017
6.895

2016
6.898

Jumlah Penyewa Menara

2018¹⁾
10.492

2017
11.774

2016
11.416

Site Telekomunikasi

2018
6.451

2017
6.935

2016
6.939

Penyewaan

2018
10.548

2017
11.839

2016
11.499

1) Per akhir 2018, menara dan penyewaan dimana PT Internux / First Media tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan



Fokus 2018

Sejalan dengan tema 'Gear Up for Opportunities' tahun ini, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. terus berkomitmen untuk memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 1.899,8 milyar, dimana pendapatan pada tahun tersebut stabil jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2017. Perseroan juga mencatat EBITDA sebesar Rp 1.637,7 miliar, dimana EBITDA pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5% jika dibandingkan dengan EBITDA pada tahun 2017. Sekitar 84% pendapatan Perusahaan di tahun 2018 dikontribusikan oleh empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Grup (termasuk reseller dengan PT Telekomunikasi Selular sebagai konsumen akhir) dan PT Indosat Tbk.

Dengan serangkaian tantangan yang harus dihadapi oleh industri telekomunikasi, Perseroan sekali lagi telah membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi persaingan dan tantangan-tantangan di tengah sektor

menara telekomunikasi. Perusahaan mampu bertahan dan menegaskan posisinya sebagai salah satu operator menara independen dan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

Walaupun lebih lambat dari yang diharapkan, para penyedia layanan telekomunikasi di negeri ini terus fokus untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan mereka. Maka dari itu, tahun 2018 menjadi tahun dimana Perseroan membuktikan ketangguhannya dan juga membekali diri untuk meraih peluang-peluang di masa yang akan datang.

Perusahaan juga terus menekankan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam rangka membangun perusahaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas penyampaian informasi yang berkualitas baik dalam mencapai sistem tata kelola yang efektif. Kami jugaterus melakukan pembaruan dalam hal kebijakan perusahaan dan infrastruktur tata kelola Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan proses kontrol.

Daftar Isi

01 Ikhtisar Kinerja Penting

08	Ikhtisar Kinerja Penting
10	Kinerja Saham
11	Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya

02 Laporan kepada Pemegang Saham

14	Laporan Dewan Komisaris
17	Profil Dewan Komisaris
20	Laporan Dewan Direksi
22	Profil Dewan Direksi

03 Profil Perusahaan

28	Identitas Perusahaan
29	Visi dan Misi
29	Nilai-Nilai Inti Perseroan
30	Tentang STP
32	Tonggak Sejarah
34	Struktur Organisasi
35	Struktur Grup Perusahaan
36	Entitas Anak dan Struktur Kepemilikannya
37	Nama dan Alamat Entitas Anak serta Kantor Perwakilan
38	Komposisi Pemegang Saham
39	Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
40	Penghargaan & Sertifikasi

04 Analisis & Pembahasan Manajemen

44	Tinjauan Operasi
46	Kinerja Keuangan
52	Likuiditas Struktur Permodalan
52	Kemampuan Membayar Utang (Jangka Pendek & Jangka Panjang) & Tingkat Kolektibilitas Piutang
54	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal pada Tahun Buku Terakhir
54	Investasi Belanja Modal yang Direalisasikan
55	Perbandingan Antara Target dengan Hasil yang Dicapai dan Target untuk Satu Tahun Mendatang
55	Informasi dan Fakta Material yang terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Perseroan
55	Prospek Usaha Perseroan
56	Aspek Pemasaran
56	Penetrasi Pemasaran
56	Pengembangan Fokus Bisnis
57	Service Excellence
58	Kebijakan Dividen
59	Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Terafiliasi
59	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun 2018
60	Kelangsungan Usaha Perseroan

Seluruh ilustrasi dalam Laporan Tahunan ini dibuat oleh seorang ilustrator muda berbakat Indonesia, @wastanahaikal

05 Sumber Daya Manusia

64	Sumber Daya Manusia
66	Komposisi Karyawan
67	Manajemen Kinerja
69	Kesetaraan dan Keberagaman
69	Jalur Komunikasi Informasi bagi Karyawan
69	Work Life Balance Di Lingkungan Kerja Perusahaan
70	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

06 Tata Kelola Perusahaan yang Baik & Manajemen Risiko

74	Tata Kelola Perusahaan
79	Pemegang Saham
82	Dewan Komisaris
86	Direksi
90	Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
91	Hubungan Afiliasi
92	Komite Audit
96	Komite Remunerasi dan Nominasi

98	Sekretaris Perusahaan
100	Audit Internal
102	Akuntan Publik dan Auditor Eksternal
103	Manajemen Risiko
104	Perkara Penting Di Tahun 2018
104	Kode Etik Perusahaan
105	Benturan Kepentingan
105	Whistleblowing System
107	Akses Informasi dan Data Perusahaan kepada Publik

07 Tanggung Jawab Sosial & Hubungan Kemasyarakatan

110	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-----	----------------------------------

08 Laporan Keuangan Konsolidasian

114	Laporan Keuangan Konsolidasian
-----	--------------------------------



01

Ikhtisar Kinerja Penting







Ikhtisar Kinerja Penting

Ikhtisar Operasional

Portfolio Aset Strategis	2018 ¹	2017	2016 ²
Site Portofolio Tower			
Site Macro Tower	5.979	6.333	6.349
Site Microcell Poles	433	562	549
Jumlah Site Menara	6.412	6.895	6.898
Site Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS ³	37	38	39
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	3.000	2.847	2.712
Penyewaan Site Menara	10.492	11.774	11.416
Rasio Penyewaan Menara	1,64x	1,71x	1,65x
Penyewaan Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS	54	63	81

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(Dalam Miliar Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2018	2017	2016 ⁴
Kas dan Setara Kas Ditambah Dana yang Dibatasi Penggunaannya	147,0	280,1	185,0
Aset Lancar Lainnya	1.926,5	1.758,8	2.381,8
Jumlah Aset Lancar	2.073,5	2.038,9	2.566,8
Aset Tidak Lancar	9.597,0	10.571,2	11.452,5
Jumlah Aset	11.670,5	12.610,1	14.019,3
Liabilitas Jangka Pendek	1.536,2	821,2	1.094,3
Liabilitas Jangka Panjang	7.164,3	7.695,5	8.242,0
Jumlah Liabilitas	8.700,5	8.516,7	9.336,2
Jumlah Ekuitas	2.970,0	4.093,4	4.683,1
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	11.670,5	12.610,1	14.019,3

- 1) Per akhir 2018, menara dan penyewaan dimana PT Internux / First Media tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan
- 2) Per akhir 2016, menara dan penyewaan dimana PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bakrie Telecom Tbk tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan
- 3) Dihitung berdasarkan jumlah bangunan
- 4) Disajikan kembali

(Dalam Miliar Rupiah)

Laporan Keuangan Konsolidasian	2018	2017	2016 ¹
Pendapatan Usaha	1.899,8	1.908,5	1.821,4
Beban Pokok Pendapatan	478,7	438,8	448,7
Laba Bruto	1.421,1	1.470,0	1.372,8
Beban Usaha	166,8	160,0	160,0
Laba Usaha	1.254,3	1.309,6	1.212,7
Beban Lain-lain - Bersih	2.456,7	1.098,5	691,7
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(1.202,4)	211,1	521,1
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(21,5)	119,8	(208,6)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1.223,8)	331,0	312,5
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(1.123,5)	(589,6)	(134,2)
EBITDA ²	1.637,7	1.646,1	1.553,7

Rasio Keuangan	2018	2017	2016 ¹
Laba Bruto Terhadap Pendapatan Usaha	74,8%	77,0%	75,4%
Laba Usaha Terhadap Pendapatan Usaha	66,0%	68,6%	66,6%
EBITDA Terhadap Pendapatan Usaha	86,2%	86,2%	85,3%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan usaha	(64,4%)	17,3%	17,2%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Usaha	(59,1%)	(30,9%)	(7,4%)
Rasio Lancar (x)	1,3	2,5	2,4
Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas (x)	2,6	1,9	1,7
Rasio Pinjaman Terhadap Jumlah Aset (x)	0,7	0,6	0,6
Pinjaman Bersih ³ Terhadap LQA EBITDA ⁴ (x)	4,6	4,4	4,6

1) Disajikan kembali

2) EBITDA = Laba Usaha + Penyusutan dan Amortisasi

3) Pinjaman Bersih = Pinjaman (Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman) - Kas dan Setara Kas serta dana yang dibatasi penggunaannya.

4) LQA EBITDA = EBITDA Kuartal terakhir yang disetahunkan EBITDA



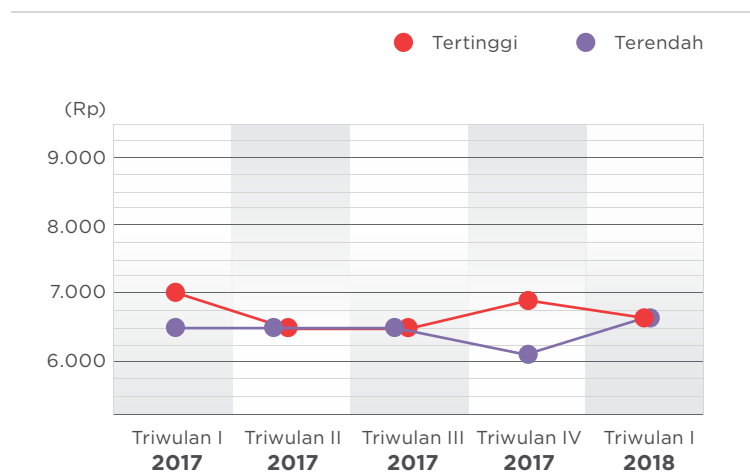
Kinerja Saham

2017

Kuartal	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Kapitalisasi Pasar (Juta Rp)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)	Nilai Perdagangan (Juta Rp)
I	7.000	6.500	6.500	7.393.750	147	971
II	6.500	6.500	6.500	7.393.750	8	50
III	6.500	6.500	6.500	7.393.750	3	20
IV	6.800	6.000	6.800	7.735.000	8	53

2018

Kuartal	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Kapitalisasi Pasar (Juta Rp)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)	Nilai Perdagangan (Juta Rp)
I	6.800	6.800	6.800	7.735.000	4	26



Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya

Penawaran Umum Perdana

Pada 29 September 2011, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 3.400 per saham. Seluruh saham Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana digunakan untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada 8 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 4.800 per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp 4.800 dengan masa berlaku pelaksanaan 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015. Sampai dengan masa pelaksanaan berakhir, Perusahaan menerbitkan 59.415.534 waran. Saham-saham dan waran ini tercatat pada BEI. Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas II

Pada 19 Desember 2014, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 7.000 per saham. Seluruh saham dari penawaran umum ini telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, pada bulan Januari 2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (setelah perjumpaan antara pinjaman pemegang saham Perusahaan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyeteroran modal) digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Pada tahun 2015, Pratama Agung Pte. Ltd., entitas anak telah berhasil menerbitkan obligasi sebesar USD 300 juta dengan kupon 6.25% berjangka waktu 5 tahun (Surat Utang) dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 25 Februari 2015.

Obligasi ini bernama USD 300 million 6.25% Senior Notes Due 2020 dan merupakan obligasi internasional perdana yang diterbitkan oleh grup Perusahaan dan telah diperdagangkan.

Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan telah melunasi penuh obligasi ini.



Laporan Kepada Pemegang Saham







Laporan Dewan Komisaris



Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

STP tetap dapat mempertahankan kinerjanya meski tengah menghadapi tantangan dan persaingan yang ketat. Perekonomian Indonesia bertumbuh secara moderat sebesar 5,2% pada 2018, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2017. Ini disebabkan oleh kondisi perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian dan pertumbuhan investasi yang melambat karena faktor tahun politik di tahun 2019.

Walaupun dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di tahun ini, Indonesia dan negara ASEAN lainnya masih mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara regional. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, Indonesia diperkirakan akan

mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2019 yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur masif.

Tinjauan dan Prospek Usaha

STP membukukan pendapatan sebesar Rp 1.899,8 miliar dengan margin EBITDA yang stabil pada level 86,2% di 2018. Sebagai salah satu operator menara independen dan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, STP telah membuktikan bahwa Perseroan mampu bertahan ditengah tantangan yang dihadapi. Pada waktu yang bersamaan, Perseroan juga tengah mempersiapkan diri untuk meraih peluang-peluang di masa yang akan datang.

Jumlah pengguna mobile data di Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan masyarakat yang lebih cenderung



STP membukukan pendapatan sebesar Rp 1.899,8 miliar dengan margin EBITDA yang stabil pada level 86,2% di 2018. Sebagai salah satu operator menara independen dan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, STP telah membuktikan bahwa Perseroan mampu bertahan ditengah tantangan yang dihadapi. Pada waktu yang bersamaan, Perseroan juga tengah mempersiapkan diri untuk meraih peluang-peluang di masa yang akan datang.



bergantung pada teknologi mobile dan menggunakan aplikasi ber-bandwidth tinggi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlepas dari itu, konsumsi data per orang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Konsumsi data pun akan terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah startup dan usaha kecil dan menengah yang akan mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia.

Untuk memastikan layanan komunikasi tetap terjaga dengan baik, para operator telekomunikasi di negeri ini terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan 3G dan 4G LTE miliknya dimana para operator telekomunikasi akan meningkatkan penyebaran dari menara makro dan tiang microcell. Hal ini memberi peluang bagi STP untuk membangun menara BTS dan kolokasi baru agar cakupan dan kualitas layanan para operator telekomunikasi tetap terjaga. Pemerintah terus mendukung pembangunan infrastruktur dan merancang kebijakan dan perundang-undangan di sektor informasi dan komunikasi agar dapat mendorong penetrasi internet ke seluruh penjuru negeri ini.

Dalam jangka panjang, para penyedia layanan telekomunikasi akan terus ekspansi dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan, serta mengembangkan teknologi baru agar dapat memenuhi permintaan konsumen yang kian meningkat.

Dengan track record kuat dan portfolio jaringan fiber optik Perseroan, kami percaya bahwa Perseroan memiliki keahlian dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dari para penyedia layanan telekomunikasi. Perseroan akan terus memperkuat posisi pasar dan memanfaatkan peluang di masa yang akan datang.

Rencana Kedepan

Memasuki tahun 2019 dan seterusnya, keputusan Perseroan untuk melebarkan sayap usaha dan menyediakan layanan fiber optik adalah keputusan yang tepat karena telah memperkuat posisi Perseroan untuk bersaing dan berkembang di era digital ini. Kami percaya permintaan konsumen dan potensi pasar untuk solusi dan layanan fiber optik akan terus meningkat. Kedepannya, Perseroan akan terus berkembang dan memanfaatkan peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Maka dari itu, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Dewan Direksi, untuk diversifikasi bisnis ke sektor non-tower yaitu solusi dan layanan fiber optik. Hal ini selaras dengan visi Perseroan “Memberi Nilai dan Menciptakan Perbedaan” dan juga tujuan Perseroan untuk mempersiapkan diri untuk meraih pertumbuhan dari bisnis tower dan non-tower

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dengan dukungan dari Komite Audit, kami menjalankan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan terus memperbaiki penerapan GCG dalam setiap level organisasi. Kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan di kegiatan sehari-hari Perseroan agar dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Kami juga terus melaksanakan kewajiban kami dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan strategi pada tahun berjalan. Melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris memberikan nasihat tentang



berbagai macam inisiatif, risiko dan peluang kepada anggota Direksi sebagai fondasi untuk merancang strategi untuk 2019 dan kedepannya. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Perseroan melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan pada Komposisi Dewan Komisaris

Pada tanggal 27 Februari 2019, saya telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai Presiden Komisaris. Pengganti saya akan ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya dan kami akan tetap berkomitmen untuk mendukung transparansi dengan para pemegang saham.

Apresiasi

Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan, kerjasama dan kepercayaan yang diberikan selama tahun 2019. Kami juga ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi yang tinggi untuk pertumbuhan Perseroan. Kami meyakini bahwa STP berada di jalur yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang di masa yang akan datang dan terus bertahan sebagai salah satu operator menara independen dan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

Jakarta, 18 April 2019

Jonathan Yuwono
Komisaris Utama

Profil Dewan Komisaris



Jonathan Yuwono Komisaris Utama

Usia : 37 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan
 • RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

2004 Memperoleh gelar Bachelor of Arts Economics dari University of Michigan Ann Arbor

Riwayat Jabatan

- 2008 - Sekarang Direktur PT Kharisma Indah Ekaprima
- 2010 - Sekarang Direktur PT Jeje Yutrindo Utama
- 2010 - Sekarang Direktur PT Asia Prima Packaging
- 2012 - Sekarang Direktur PT Freshindo Marketama
- 2017 - Sekarang Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk



2



Ludwig Indrawan

Wakil Komisaris Utama

Usia : 65 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

1976 Memperoleh gelar CAR dari Prahan (Victoria) College, Melbourne

Riwayat Jabatan

- 1978 - 1982 Memulai karir di Challick Pte Ltd, Singapura
- 1992 - 2007 Menjalankan pengembangan bisnis properti di Selandia Baru dan Australia di bawah bendera Stags Leap dan Smart Homes Group
- 2007 - Sekarang Managing Diretor di PT Smart Homes Anugrah, Surabaya
- 2013 - Sekarang Wakil Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk

3



Thong Thong Sennelius

Komisaris

Usia : 46 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

- 1994 Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta
- 1997 Memperoleh gelar Master of Business dari Harvard University

Riwayat Jabatan

- 1997 - 2002 Vice President Morgan Stanley, New York dan Singapura
- 2002 - 2005 Direktur Synnergy Capital Partners, Jakarta
- 2006 - 2011 Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk
- 2006 - Sekarang Komisaris PT Sekawan Abadi Prima
- 2006 - Sekarang Direktur PT Jaring Lintas Indonesia
- 2009 - Sekarang Direktur PT Ciptadana Capital
- 2009 - Sekarang Komisaris PT Ciptadana Multifinance
- 2011 - Sekarang Komisaris PT Solusi Tunas Pratama Tbk

4



Erry Firmansyah

Komisaris Independen

Usia : 63 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

1981 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Riwayat Jabatan

- 1982 - 1984 Auditor di Price Waterhouse Coopers Indonesia
- 1998 - 2002 Presiden Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 2002 - 2007 Presiden Direktur Bursa Efek Jakarta
- 2007 - 2009 Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia
- 2009 - 2014 Komisaris Independen PT Elnusa Tbk
- 2009 - 2015 Presiden Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Komisaris Independen PT Astra International Tbk dan Komisaris Independen PT Berau Coal Energy Tbk
- 2009 - sekarang Komisaris Independen PT Unilever Tbk, dan PT Elang Mahkota Energy Tbk, PT Eagle Capital, PT Makmur Sejahtera Wisesa
- 2013- sekarang Komisaris PT Indopremier, PT Bali Towerindo Tbk
- 2017 - sekarang Komisaris Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk
- 2012 - Sekarang Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk

5



Muhamad Senang Sembiring

Komisaris Independen

Usia : 67 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- UPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

- 1996 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta
- 1999 Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta

Riwayat Jabatan

- 1974 - 1976 Memulai karir di Sailor, Brokerage & Management Co. New York, Amerika Serikat
- 1976 - 1986 General Manager PT Aqmar Oil Service Co, Aceh Utara
- 1988 - 1990 Direktur Marketing PT Indotrim Hung Yuan Securities
- 1990 - 1991 Manager bidang Pasar Modal PT Bank Pelita
- 1991 - 1995 Direktur Marketing PT Arya Prada Sekuritas
- 1995 - 2000 Direktur Marketing PT Mitra Investdana Sekurindo
- 2000 - 2002 Presiden Direktur PT Mitra Investdana Sekurindo
- 2002 - 2007 Direktur Perdagangan dan Keanggotaan Bursa Efek Jakarta
- 2007 - 2009 Direktur Perdagangan dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia
- 2009 - 2018 Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia / KEHATI
- 2013 - Sekarang Komisaris Independen PT Rukun Raharja Tbk
- 2018 - sekarang Komisaris Independen PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia
- 2018 - sekarang Senior Advisor Keanekaragaman Hayati Indonesia/ KEHATI
- 2011 - sekarang Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk



Laporan Dewan Direksi



Kepada Pemegang Saham yang Terhormat,

Mewakili Dewan Direksi, dengan suka cita kami melaporkan Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (STP) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Perseroan terus membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi persaingan dan tantangan-tantangan di tengah sektor menara telekomunikasi. Menurut Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), industri telekomunikasi di Indonesia berkontraksi sebesar 6,4% pada tahun 2018 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Industri seluler juga mengalami penurunan sebesar 2-3% pada tahun yang sama. Oleh karena itu, para penyedia layanan telekomunikasi di negeri ini terus fokus untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan mereka, walaupun lebih lambat dari yang diharapkan.

Meski dengan pertumbuhan negatif, kami percaya bahwa masih ada ruang bagi industri ini untuk terus tumbuh dikarenakan pengadopsian jaringan 4G LTE di Indonesia yang masih dalam tahap awal. Kami yakin bahwa industri seluler negeri ini akan mulai pulih pada 2019. Para penyedia layanan telekomunikasi akan

Tetap Tangguh di Tengah Tantangan

Pada 2018, STP mencatat pendapatan sebesar Rp 1.899,8 miliar, dimana pendapatan Perseroan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,4% dari pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 1.908,5 miliar. EBITDA tahun 2018 dicatat sebesar Rp 1.637,7 miliar, maka dari itu, margin EBITDA tercatat stabil di 86.2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perseroan akan terus memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas dan komitmen Perseroan.



Meski di tengah tantangan, Indonesia tetap menjadi pasar yang menggiurkan untuk industri telekomunikasi selular dikarenakan beberapa alasan yaitu besarnya populasi usia produktif Indonesia, pertumbuhan penetrasi Internet yang sangat tinggi, gencarnya pembangunan ekonomi digital, dan tumbuhnya tingkat kepemilikan dan penggunaan smartphone di Indonesia. Mengacu pada data dari Frost & Sullivan, penetrasi smartphone di negeri ini masih akan mengalami pertumbuhan yang pesat dari 67,1 juta pengguna di 2017 menjadi 133,2 juta pengguna di 2019¹.

Kami yakin bahwa pertumbuhan konsumsi data 3G dan 4G LTE yang pesat akan mendorong para penyedia layanan telekomunikasi untuk menambahkan anggaran belanja modal atau capex agar dapat mendukung permintaan pasar atas layanan data yang terus meningkat. Portofolio aset kami yang terdiversifikasi memberikan Perseroan sebuah keunggulan untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Perseroan akan terus memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas dan komitmen Perseroan. Kedepannya, tim manajemen telah membentuk visi dan strategi yang jelas sebagai pedoman bagi Perseroan untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh peluang-peluang di masa yang akan datang. Perseroan tidak hanya berfokus pada profitabilitas hari ini, tetapi juga membentuk keberhasilan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

STP berkomitmen untuk terus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan Perseroan dilakukan

dengan kehati-hatian (prudent) dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kami meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. di seluruh organisasi Perseroan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam setiap level operasi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian sistem dan prosedur pengoperasian standar. Perseroan terus memperbaiki kebijakan dan infrastruktur tata kelola untuk menghasilkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam proses evaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Apresiasi

Kami telah menerima surat pengunduran diri Jonathan Yuwono sebagai Presiden Komisaris pada tanggal 27 Februari 2019. Atas nama Direksi, saya mengucapkan terima kasih kepada Beliau atas dedikasi, profesionalisme dan kontribusi kepada Perseroan selama masa jabatannya.

Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan kami, pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungannya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan para karyawan atas kontribusi yang berharga sepanjang tahun 2018. Hal ini akan memperkuat posisi Perseroan untuk menghadapi tantangan dan menyiapkan diri untuk peluang yang akan membawa kesuksesan bagi Perseroan.

Jakarta, 18 April 2019

Nobel Tanihaha
Direktur Utama

1) Digital Market Overview: Indonesia (2018), Frost & Sullivan



Profil Dewan Direksi



Nobel Tanihaha Direktur Utama

Usia : 44 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Ruang Lingkup Penugasan

Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan

Riwayat Pendidikan

- 1996 Memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California

Riwayat Jabatan

- 1997 - 2000 Direktur Vikay Group yang bergerak di bidang properti
- 2006 - Sekarang Direktur PT Sekawan Abadi Prima
- 2006 - Sekarang Direktur PT Jaring Lintas Indonesia
- 2007 - Sekarang Direktur PT Kharisma Agung Grahanusa
- 2006 - Sekarang Direktur Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk

2



Juliawati Gunawan

Direktur

Usia : 48 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Ruang Lingkup Penugasan

Mengelola bidang keuangan

Riwayat Pendidikan

1993 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara

Riwayat Jabatan

- 1992 - 2003 Auditor dan Konsultan di Prasetio, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) dan Ernst & Young Indonesia
- 2009 - Juni 2011 Financial Controller PT Solusi Tunas Pratama
- Juni 2011 - Sekarang Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk

3



Tommy Gustavi Utomo

Direktur Independen

Usia : 49 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPSLB 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Ruang Lingkup Penugasan

Mengelola bidang pelaksanaan dan pengembangan proyek

Riwayat Pendidikan

- 1994 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- 2006 Memperoleh gelar Master Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia, Jakarta

Riwayat Jabatan

- 1995 - 1998 Berkarir di Bangun Cipta Sarana Group
- 1998 - 2004 Berkarir di Sahid International Group dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- 2004 - 2006 Berkarir di PT Netwave Multi Media
- 2006 - 2012 General Manager Project Site Acquisition PT Bakrie Telecom Tbk
- 2012 - 2013 Kepala Bagian Manajemen Properti PT Solusi Tunas Pratama Tbk
- 2013 - Sekarang Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk



Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan 2018

Surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk tahun 2018 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, 18 April 2019

Dewan Komisaris

Jonathan Yuwono
Komisaris Utama

Ludwig Indrawan
Wakil Komisaris Utama

Thong Thong Sennelius
Komisaris

Erry Firmansyah
Komisaris Independen

Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen

Direksi



Nobel Tanihaha

Direktur Utama



Juliawati Gunawan

Direktur



Tommy Gustavi Utomo

Direktur Independen



Profil Perusahaan







Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Bidang Usaha Utama	PT Solusi Tunas Pratama Tbk. bergerak di bidang usaha penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.
Status Perusahaan	Perusahaan Terbuka
Tanggal Pendirian	27 September 2006
Landasan Hukum Pendirian	1. Akta Pendirian No.5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. 2. SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006. 3. Tanda Daftar Perusahaan No.090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Pusat di bawah No.1187/BH.09.05/v/2007 tanggal 16 Mei 2007. 4. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No.73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.
Kode Saham	SUPR
Bursa Saham	Bursa Efek Indonesia
Modal Dasar	2.000.000.000 Lembar Saham atau setara dengan Rp 200.000.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor	Rp 113.757.969.800 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Hubungan Investor	T +62 21 5794 0688 F +62 21 5795 0077 E corporate.secretary@stptower.com

Alamat Lengkap

Kantor Pusat	Kantor Cabang
Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia Kontak Kami Telepon : +62 21 57940688 Faksimili : +62 21 57950077 Layanan pelanggan 24 jam: 0-800-140-1380 (bebas biaya) E-mail: corporate.secretary@stptower.com Situs: www.stptower.com	Kantor Cabang Bandung Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracandong Bandung 40275 T : +62 22 733 3328 F : +62 22 733 3329
	Kantor Cabang Medan Komplek Centrium No. 53 Jl. Brigjend Katamso Medan 20151 T : +62 61 8881 6041 F : +62 61 8881 5874
	Kantor Cabang Surabaya Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya T : +62 31 567 7996 F : +62 31 567 9006

Visi

Menciptakan nilai dan perbedaan.

Misi

Mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi, kualitas dan komitmen.

Budaya Kerja Perseroan

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, Manajemen menghimbau seluruh insan Perseroan untuk selalu menanamkan tata nilai inti Perseroan serta menerapkan budaya kerja yang dinamis dan inovatif dengan mengutamakan hasil pencapaian atau kinerja (result oriented) dari masing-masing individu yang tentunya menentukan kinerja tim secara kolaboratif.

Nilai-Nilai Inti Perseroan

	Terpercaya	Dinamis	Menyenangkan	Inovatif	Kerja Sama Tim
Nilai Inti Perusahaan	Kita dapat diandalkan dan dipercaya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan.	Kita terbuka kepada perubahan; bertindak dengan antusias dan percaya diri.	Kami Menciptakan Suasana Menyenangkan Di Pekerjaan Kami.	Kita Berinisiatif Untuk Selalu Kreatif Dalam Mencari Solusi Paling Efektif Dalam Segala Yang Kita Lakukan.	Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memiliki satu visi dan mencapai tujuan yang sama.
Indikator Perilaku	- Loyal. - Berkomitmen. - Jujur. - Kompeten. - Rasa Memiliki.	- Berpikir cepat dan bertidnak cermat - Percaya diri. - Proaktif dan self-driven - Beradaptasi.	- Membuat orang lain senang. - Bekerja dengan semangat. - Berpikir positif. - Work life balance.	- Fokus pada solusi. - Perbaikan berkesinambungan. - Berani berbeda. - Berpikir ke depan.	- Komunikasi yang efektif. - Menghormati, mendukung dan mempercayai satu sama lain. - Sense of belonging. - Ingin berbagi. - Kontribusi positif.



Tentang STP

PT. Solusi Tunas Pratama Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dari segi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki. Awalnya bisnis inti Perseroan berfokus pada penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antenna dan perangkat pendukung lain kepada operator telekomunikasi, yang dikenal dengan base transceiver station (BTS) dengan skema perjanjian kontrak sewa jangka panjang yang rata-rata berjangka waktu sekitar 10 tahun. Saat ini, Perseroan sudah memperluas layanan infrastruktur dengan menambah penyediaan layanan akses terhadap kapasitas backhaul serat optik dan juga jaringan indoor distributed antenna system (DAS) di berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang terletak di kota-kota besar. Langkah strategis Perseroan tersebut dilakukan sejalan dengan proses transformasi Perseroan, yang sudah dimulai sejak tahun 2012 untuk menjadi perusahaan penyedia layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia.

Perseroan percaya bahwa penyewaan menara dan penyediaan kapasitas backhaul serat optik sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia karena sejalan dengan misi operator telekomunikasi yang berupaya memenuhi permintaan yang terus

meningkat akan kapasitas dan cakupan jaringan, namun sekaligus harus mengendalikan anggaran belanja modal mereka. Perseroan juga percaya bahwa permintaan terhadap kapasitas jaringan serat optik akan tetap bertumbuh sebagai hasil dari permintaan layanan data yang akan terus meningkat.

Perseroan telah memiliki aset menara telekomunikasi di seluruh 34 provinsi di Indonesia dimana sebesar 84% aset menara telekomunikasi Perseroan terletak di Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Per 31 Desember 2018, Perseroan tercatat memiliki dan mengoperasikan 6.451 site telekomunikasi di seluruh Indonesia, dengan total 6.412 menara yang terdiri dari 5.979 menara makro dan 433 microcell sites, yang memiliki 10.492 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,64x. Selain itu, Perseroan juga memiliki 2 shelter-only sites, 37 jaringan Indoor DAS, serta 3.000 km panjang jaringan kabel serat optik di seluruh Indonesia termasuk 1.643 km di daerah Jabodetabek.





Tonggak Sejarah

2006

Perseroan berdiri pada tanggal 27 September 2006 dengan nama PT Solusi Tunas Pratama.

2007

Mengakuisisi 528 menara telekomunikasi dalam konstruksi yang kemudian disewakan secara tidak langsung kepada PT Axis Telecom.

2012

Berekspansi dalam bisnis jaringan kabel serat optik dan microcell pole (Outdoor DAS).

Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas I sejumlah 135 juta saham baru seharga Rp 4.800 per saham dengan 59,4 juta waran yang melekat pada saham baru tersebut. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi harga emisi) dari penerbitan saham baru dan konversi waran adalah sebesar Rp 933 miliar.

Mengakuisisi 521 menara telekomunikasi dari PT Hutchison 3 Indonesia dan dari perusahaan penyedia menara independen.

2013

Berekspansi dalam bisnis Indoor Distributed Antenna System (Indoor DAS).

Memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dengan keseluruhan fasilitas berjumlah US\$192,5 juta dan Rp1,3 triliun, yang sebagian digunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi sebelumnya yang diperoleh tahun 2011 dan sisanya untuk pengembangan barang modal dan modal kerja.

Mengakuisisi 493 menara telekomunikasi dari perusahaan penyedia menara independen.

2014

Perseroan mengakuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata dan 142 menara telekomunikasi dari perusahaan menara independen.

Pada 19 Desember, Perseroan mendapat Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.

2015

Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas II sejumlah 343.165.024 saham baru dengan harga Rp 7.000 per saham. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi biaya emisi) sebesar Rp 2.402.155.168.000.

Menerbitkan obligasi US\$300 juta 6,25% Senior Notes Due 2020 sebesar US\$300 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

Menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi berupa Term Loan Facility sebesar US\$315 juta dan Fasilitas Kredit Revolving sebesar US\$10 juta dan Rp 530 miliar.

2008

Mulai beroperasi secara komersial.

Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (Master Lease Agreement/MLA) dengan PT Bakrie Telecom Tbk.

2009

Mengakuisisi 543 portofolio menara dari PT Bakrie Telecom Tbk.

Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (MLA) dengan PT Indosat Tbk, PT Smart Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.

2011

Memperoleh pinjaman sindikasi dengan jumlah keseluruhan fasilitas berjumlah Rp 1,08 triliun.

Melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 100 juta saham baru dengan harga Rp 3.400 per saham. Jumlah keseluruhan perolehan dana (sebelum dikurangi harga emisi) berjumlah Rp 340 miliar.

Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2011.

Mengakuisisi 100% penyertaan saham dalam PT Sarana Inti Persada, sebuah perusahaan penyedia menara independen di Bandung yang memiliki 149 menara telekomunikasi.

Mengakuisisi 27 menara telekomunikasi dari perusahaan penyedia menara independen.

2010

Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (MLA) dengan PT Axis Telekom Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL), PT First Media Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications).

Mengakuisisi 27 menara telekomunikasi dari perusahaan penyedia menara independen.

2016

Sebagai bagian dari program Transformasi Perseroan melalui pendekatan pembenahan menyeluruh, STP melakukan penajaman Nilai Inti Perusahaan dengan menambah 1 (satu) nilai inti menjadi: Innovative, Dynamic, Positive, Trustworthy, Fun, Reliable

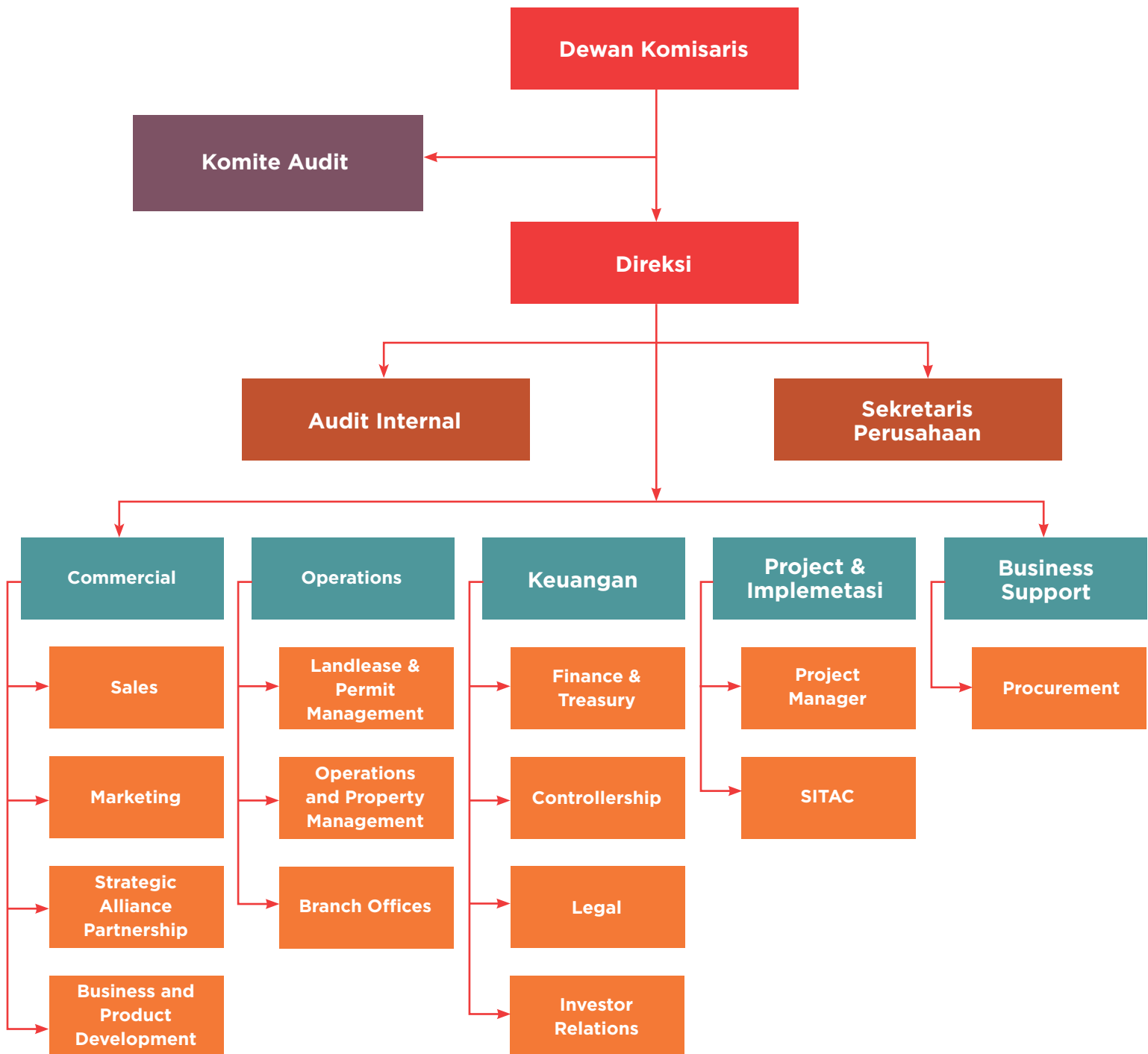
Pada tanggal 19 September, Perseroan melakukan skema pembiayaan kembali fasilitas pinjaman sindikasi tahun 2015 dengan skema pinjaman berjangka sebesar US\$225 juta, pinjaman berjangka sebesar Rp 1.050 miliar dan fasilitas revolving Rp 580 miliar.

2018

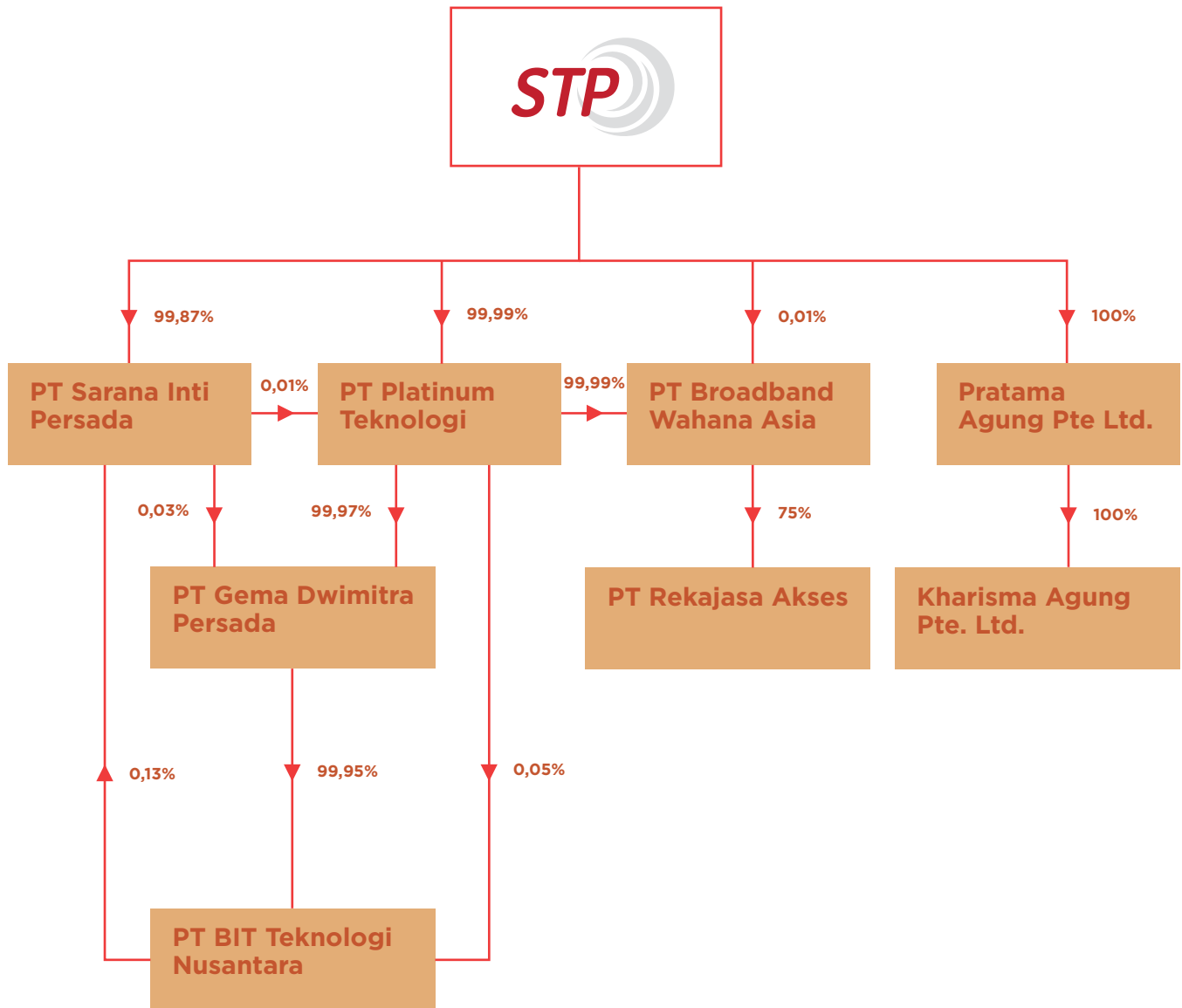
Pada bulan Februari 2018, Perseroan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman yang berupa fasilitas Term Loan USD sebesar US\$ 297 juta dan fasilitas Term Loan and Revolving Loan IDR sebesar Rp 3.850 miliar, pada bulan Juni 2018 Perseroan mendapatkan opsi untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar US\$20 juta



Struktur Organisasi



Struktur Grup Perusahaan





Entitas Anak dan Struktur Kepemilikannya

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perusahaan Langsung dan Tidak Langsung %	Tahun Penyertaan
Langsung				
1.	PT Sarana Inti Persada	Pengelolaan dan Penyewaan Menara BTS	100,0	2011
2.	PT Platinum Teknologi	Investasi	100,0	2012
3.	Pratama Agung Pte. Ltd.	Investasi	100,0	2013
4.	PT Broadband Wahana Asia	Investasi	100,0	2016
Tidak Langsung				
1.	PT Gema Dwimitra Persada (melalui PT Platinum Teknologi)	Perdagangan	100,0	2012
2.	PT Bit Teknologi Nusantara (melalui PT Gema Dwimitra Persada dan PT Platinum Teknologi)	Penyewaan Microcell dan Jasa Jaringan Kabel Serat Optik	100,0	2012
3.	Kharisma Agung Pte. Ltd. (melalui Pratama Agung Pte. Ltd.)	Perdagangan	100,0	2012
4.	PT Rekajasa Akses (melalui PT Broadband Wahana Asia)	Penyedia Layanan Data	75,0	2016

Nama dan Alamat Entitas Anak serta Kantor Perwakilan

Alamat Lengkap

Kantor Pusat	Kantor Cabang
Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia Kontak Kami Telepon : +62 21 5794 0688 Faksimili : +62 21 5795 0077 Layanan pelanggan 24 jam: 0-800-140-1380 (bebas biaya) E-mail: corporate.secretary@stptower.com Situs: www.stptower.com	Kantor Cabang Bandung Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracondong Bandung 40275 T : +62 22 733 3328 F : +62 22 733 3329
	Kantor Cabang Medan Komplek Centrium No. 53 Jl. Brigjend Katamso Medan 20151 T : +62 61 8881 6041 F : +62 61 8881 5874
	Kantor Cabang Surabaya Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya T : +62 31 567 7996 F : +62 31 567 9006

Entitas Anak

PT Bit Teknologi Nusantara Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5794 1278 www.bit-teknologi.com	PT Sarana Inti Persada Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracondong - Bandung, Jawa Barat 40275 T : +62 22 733 3328 F : +62 22 733 3329
PT Platinum Teknologi Perkantoran Permata Senayan Blok C23 Lt. 3 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5795 0077	PT Gema Dwimitra Persada Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5795 0077
PT Broadband Wahana Asia Perkantoran Permata Senayan Blok F8-9 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0966 F : +62 21 5794 0977	PT Rekajasa Akses Perkantoran Permata Senayan Blok F8-9 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0966 F : +62 21 5794 0977 www.acsata.com
Kharisma Agung Pte. Ltd. 37 Keppel Road #01-03 Tanjong Pagar Distripark, Singapore 089064	Pratama Agung Pte. Ltd. 8 Cross Street #10-00 PWC Building, Singapore 048424



Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham	Per 31 Desember 2018			Per 31 Desember 2017		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
PT Kharisma Indah Prima	491.384.554	49.138.455.400	43,20	491.384.554	49.138.455.400	43,20
Cahaya Anugrah Nusantara Holdings Ltd	290.228.868	29.002.288.660	25,51	290.228.868	29.022.886.800	25,51
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600	0,03	359.596	35.959.600	0,03
Masyarakat Lainnya (Dibawah 5%)	355.606.680	35.560.668.000	31,26	355.606.680	35.560.668.000	31,26
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00



Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Akuntan Publik	
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM Network) Plaza ASIA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia T +62 21 5140 1340 F +62 21 5140 1350 STTD : No.212/BL/STTD-AP/2012 tanggal 17 Desember 2012 Keanggotaan Asosiasi : Anggota IAPI No. 1546 Surat Penunjukan : 0081014/BN/104/EL Tanggal 2 Oktober 2014	Tugas dan fungsi Akuntan Publik berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), yaitu melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan juga penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan audit yang dilakukan.
Konsultan Hukum	
Hiswara Bunjamin & Tandjung Gedung BRI II Lt. 23 Jl Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia T +62 21 574 4010 F +62 21 574 4670 STTD : No.531/BL/STTDKH/2008 Keanggotaan Asosiasi : No.200817 Surat Penunjukkan : 048/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014	Tugas dan fungsi Konsultan Hukum berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan yaitu melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku
Notaris	
Rini Yulianti, S.H. Jl. H. Naman Raya No. 31 Pondok Kelapa Jakarta 13450 T +62 21 864 1170 STTD : No.90/BL/STTD-N/2007 Keanggotaan Asosiasi : Berdasarkan Surat Keterangan No.06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/2010 tanggal 2 November 2010 Surat Penunjukkan : 048A/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014	Tugas dan fungsi Notaris berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku, yaitu membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT II, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan dalam rangka PUT II kecuali rapat-rapat mengenai keuangan, penentuan harga, dan strategi pemasaran.
Biro Administrasi Efek	
PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930 T +62 21 252 5666 F +62 21 252 5028 STTD : No.Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 a/n PT Risjad Salim Registra Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004 Surat Penunjukkan : 048B/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014	Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek berpedoman pada Standar Profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal, yaitu melaksanakan administrasi Daftar Pemegang Saham, menghitung HMETD, distribusi HMETD, administrasi pelaksanaan HMETD, deposit saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam sistem elektronik, melaksanakan penjatahan, menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan, menyajikan laporan pelaksanaan HMETD dan menerbitkan Surat Kolektif Saham. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pasar Modal.



Penghargaan & Sertifikasi

Indonesian Platinum and Best Corporate Award 2013 (IPBCA)

- The Best Tower Building Company of the Year



Brand Finance plc

- 87th Most Valuable Indonesian Brands 2015 & US\$21 mil Brand Value & A+



2013

2014

2015

Warta Ekonomi Indonesia

- Best New Emiten 2013



Anugerah Perusahaan TBK 2014 oleh Economic Review

- Perusahaan Penunjang Telekomunikasi Independen Terbaik
- Most Powerful & Valuable Company dalam kategori Bidang Konstruksi Non Bangunan
- Peringkat ke 7 dalam kategori Perusahaan Terbaik di Bidang Konstruksi Non Bangunan





Infobank

- 100 Fastest Growing Companies 2017



The Financial Times dan Statista

- FT 1000 High-Growth Companies Asia-Pacific 2018



2016



2017

2018

Brand Finance plc

- Ranked 94th in Most Valuable Indonesian Brands 2016 with a US\$ 17 million Brand Value & A- Brand Rating'



Warta Ekonomi Indonesia

- Indonesia Most Powerful Companies Award (MPCA) 2017





Analisis dan Pembahasan Manajemen





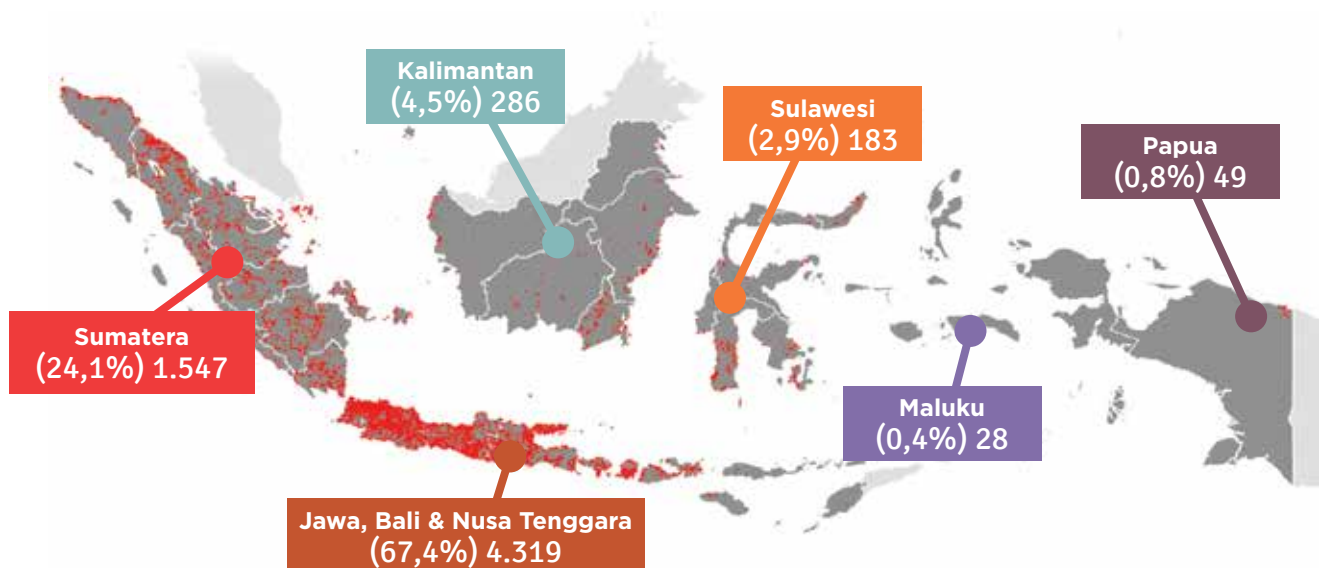


Tinjauan Operasi

Perseroan tetap memperkuat posisinya sebagai salah satu dari perusahaan penyedia infrastruktur menara independen terbesar

di Indonesia. Perkembangan portofolio aset Perseroan selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Portfolio Aset Strategis	2018 ¹	2017	2016 ²
Site Portofolio Tower			
Site Macro Tower	5.979	6.333	6.349
Site Microcell Poles	433	562	549
Jumlah Site Menara	6.412	6.895	6.898
Site Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS ³	37	38	39
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	3.000	2.847	2.712
Penyewaan Site Menara	10.492	11.774	11.416
Rasio Penyewaan Menara	1,64x	1,71x	1,65x
Penyewaan Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS	54	63	81



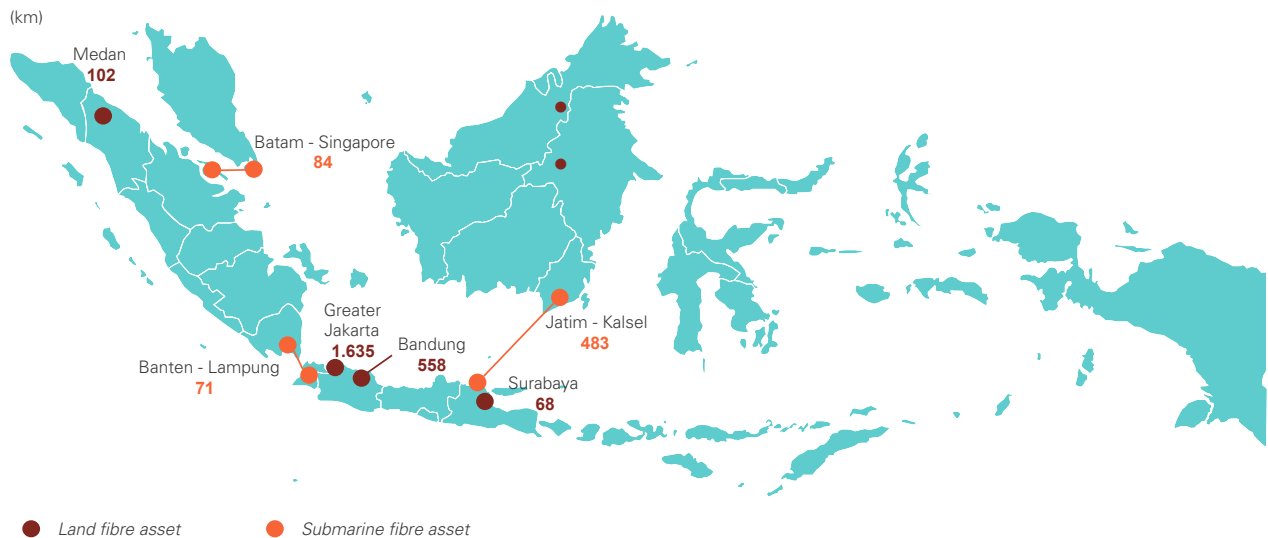
- 1) Per akhir 2018, menara dan penyewaan dimana PT Internux / First Media tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan
- 2) Per akhir 2016, menara dan penyewaan dimana PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bakrie Telecom Tbk tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan
- 3) Dihitung berdasarkan jumlah bangunan

Indonesia tetap menjadi pasar yang menggiurkan untuk industri telekomunikasi selular dikarenakan beberapa alasan yaitu besarnya populasi usia produktif Indonesia, pertumbuhan penetrasi Internet yang sangat tinggi, gencarnya pembangunan ekonomi digital, dan tumbuhnya tingkat kepemilikan dan penggunaan smartphone di Indonesia.

Pada tahun 2018, STP terus berfokus memperkuat portofolio menara dan kapasitas backhaul serat optik untuk memenuhi permintaan atas layanan data dan potensi pasar untuk penyediaan serat optik beserta solusinya. Ini disebabkan adanya

pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang komunikasi dan media yang membutuhkan layanan tersebut.

Saat ini, Perseroan telah mengoperasikan menara di seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan mayoritas menara Perseroan terletak di pulau Jawa dan Sumatera, dimana daerah tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Pendapatan Perseroan berasal dari dengan empat operator telekomunikasi terbesar dan terpercaya di Indonesia, yaitu PT XL Axiata Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group dan PT Indosat Tbk.



Selain portofolio aset menara, Perseroan juga memiliki portofolio kabel serat optik darat yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya dan Medan. Selain jaringan kabel serat optik darat, Perseroan juga memiliki jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa – Kalimantan, Pulau Jawa – Sumatera, dan Batam – Singapura.

Kami percaya bahwa keputusan Perseroan untuk ekspansi di jaringan serat optik akan memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi secara terintegrasi di Indonesia dan bersaing pada era digital saat ini. Kedepannya, Perseroan akan tetap berinovasi dan bertumbuh untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.



Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan Laba Rugi Konsolidasian (Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	Perubahan 2017-2018
Pendapatan Usaha	1.899,8	1.908,5	(0,4%)
Laba Bruto	1.421,1	1.470,0	(3,3%)
Laba Usaha	1.254,3	1.309,6	(4,2%)
EBITDA	1.637,7	1.646,1	(0,5%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1.223,8)	331,0	nm
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(1.123,5)	(589,6)	(90,6%)

Pendapatan

Pendapatan usaha Perseroan terutama berasal dari penyewaan infrastruktur milik Perseroan oleh para pelanggan yang terdiri dari penyewaan menara telekomunikasi, penyewaan infrastruktur indoor DAS di gedung-gedung dan juga penyewaan dan pemakaian kapasitas infrastruktur jaringan kabel serat optik.

Jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 1.899,8 miliar, dimana pendapatan pada tahun tersebut stabil jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun

2017. Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah berhasil mempertahankan kualitas kredit pelanggannya dimana sekitar 84% pendapatan Perseroan pada tahun tersebut tercatat berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group (termasuk PT Telekomunikasi Selular dan pendapatan dari reseller dengan PT Telekomunikasi Selular sebagai konsumen akhir) dan PT Indosat Tbk. Kualitas kredit yang kuat dari para pelanggan Perseroan serta ditambah dengan arus kas jangka panjang yang stabil dan jelas merupakan beberapa faktor kunci dan menjadi keunggulan komparatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Berikut adalah tabel sumber pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	%	2017	%
PT XL Axiata Tbk (XL)	751,0	39,5	784,5	41,1
PT Hutchison 3 Indonesia (H3I)	373,9	19,7	391,8	20,5
PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	343,9	18,1	333,5	17,5
PT Indosat Tbk (Indosat)	132,1	7,0	126,4	6,6
PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)	107,9	5,7	91,4	4,8
PT Internux (Internux) / First Media	91,1	4,8	90,9	4,8
Lain-lain	99,9	5,3	90,0	4,7
Jumlah	1.899,8	100,0	1.908,5	100,0

Beban Pokok Pendapatan

Total beban pokok pendapatan pada 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,1% dari tahun 2017,

yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan dan amortisasi. Tabel berikut menunjukkan rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	% Terhadap Pendapatan	2017	% Terhadap Pendapatan	Perubahan 2017-2018
Penyusutan dan Amortisasi:					
Sewa Lahan	184,8	9,7	160,4	8,4	15,2%
Penyusutan Aset Tetap	150,7	7,9	137,1	7,2	(9,9%)
Perizinan dan Lain-lain	24,1	1,3	16,2	1,0	(48,8%)
Sub Jumlah	359,6	18,9	313,6	16,4	14,7%
Beban Pokok Pendapatan Lainnya:					
Pemeliharaan dan Perbaikan	68,8	3,6	83,8	4,4	(17,9%)
Jasa Keamanan dan Lain-lain	50,3	2,6	41,7	2,2	(20,6%)
Sub Jumlah	119,1	6,3	125,2	6,6	(4,9%)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	478,7	25,1	438,8	23,0	9,1%

Komponen terbesar dari beban pokok pendapatan adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi dimana beban tersebut merupakan biaya non kas. Beban Amortisasi Sewa Lahan merupakan amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar di muka kepada pemilik lahan untuk lokasi pendirian menara telekomunikasi Perseroan. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sewa sesuai dengan perjanjian sewa yang berlaku. Beban Amortisasi Perizinan dan Lain-lain merupakan amortisasi biaya perizinan sesuai masa manfaat perizinan tersebut. Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan biaya penyusutan atas menara dan jaringan serat kabel optik beserta sarana pendukungnya, beban penyusutan instalasi jaringan Indoor DAS dan aset tetap lainnya.

Beban Pemeliharaan dan Perbaikan serta Jasa Keamanan dan Lain-lain merupakan beban operasional yang timbul terkait pengoperasian aset Perseroan yang disewakan kepada pelanggan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan merupakan pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Pada tahun 2018, Perseroan mencatatkan laba bruto sebesar Rp 1.421,1 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,3% dari Rp 1.470,0 miliar pada tahun 2017. Maka dari itu, margin laba bruto mengalami penurunan menjadi sebesar 74,8% dari 77,0% pada tahun 2018.

Beban Usaha

Secara keseluruhan, beban usaha Perseroan pada tahun 2018 mencapai Rp 166,8 miliar dimana beban usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 4,1% dari Rp 160,0 miliar pada tahun 2017.

Beban usaha Perseroan terutama berasal dari beban gaji dan tunjangan. Beban tersebut tercatat sedikit meningkat sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun 2017.



Tabel berikut menunjukkan rincian beban usaha Perseroan:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	% Terhadap Pendapatan	2017	% Terhadap Pendapatan	Perubahan 2017-2018
Penyusutan dan Amortisasi:					
Amortisasi	16,8	0,9	14,0	0,7	20,0%
Penyusutan Aset Tetap	7,0	0,4	8,8	0,5	(20,5%)
Sub Jumlah	23,8	1,3	22,8	1,2	4,4%
Beban Usaha Lainnya:					
Gaji dan Tunjangan	105,1	5,5	104,8	5,5	0,3%
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	8,8	0,5	8,6	0,5	2,3%
Perjalanan dan Akomodasi	9,8	0,5	8,1	0,4	21,0%
Imbalan Pasca Kerja	9,1	0,5	6,9	0,4	31,9%
Jasa Profesional	5,6	0,3	4,0	0,2	40,0%
Pemasaran	4,5	0,2	4,9	0,3	(8,2%)
Sub Jumlah	143,0	7,5	137,3	7,2	3,9%
Jumlah Beban Usaha	166,8	8,8	160,0	8,4	4,1%

Laba Usaha

Pada tahun 2018, laba usaha Perseroan tercatat mengalami penurunan sebesar 4,2% menjadi Rp 1.254,3 miliar jika dibandingkan dengan laba usaha pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban pokok pendapatan sebesar 9,1% dan beban usaha sebesar 4,1% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Maka dari itu, margin laba usaha tercatat sedikit menurun menjadi 66,0% pada tahun 2018 dari 68,6% pada tahun 2017.

EBITDA

EBITDA Perseroan dihitung dari laba usaha ditambah biaya depresiasi dan amortisasi. Pada tahun 2018, EBITDA tercatat sebesar Rp 1.637,7 miliar, dimana EBITDA Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5% dibandingkan dengan Rp 1.646,1 miliar EBITDA pada tahun 2017. Margin EBITDA tercatat stabil sebesar 86,2% pada tahun 2018 dan 2017.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	Perubahan 2017-2018
Penghasilan Bunga	8,0	20,1	(60,2%)
Beban Keuangan	(954,6)	(1.002,1)	(4,7%)
Penurunan Nilai dari Revaluasi Aset Tetap	(919,3)	-	nm
Cadangan Kerugian Penurunan Piutang Usaha	(329,0)	-	nm
Bond Premium Call	(128,9)	-	nm
Lain-lain - Bersih	(132,9)	(116,4)	14,2%
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(2.456,7)	(1.098,4)	123,7%

Kenaikan pada penghasilan (beban) lain-lain – Bersih disebabkan oleh beberapa transaksi signifikan pada tahun 2018 yaitu antara lain penurunan nilai dari revaluasi aset tetap sebesar Rp 919,3 miliar, cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp 329,0 miliar dan Bond Premium Call sebesar Rp 128,9 miliar.

Pencatatan penurunan nilai dari revaluasi aset tetap berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan dimana nilai wajar menara dan sarana penunjang dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas untuk pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dan nilai wajar tanah dengan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar (Catatan 9). Di dalam kebijakan akuntansi terhadap aset tetap (Catatan 2.i), jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk

aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Perseroan mencatat cadangan kerugian nilai piutang usaha pada tahun 2018 terutama dari PT Internux seperti yang diuraikan pada Catatan 4, 11, dan 31.a.2.

Pada tanggal 28 Maret 2018, Perseroan melakukan pelunasan utang obligasi sebelum jatuh temponya. Bond Premium Call adalah biaya yang turut dibayarkan atas pelunasan tersebut (Catatan 16).

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Perseroan mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp 1.223,8 miliar pada tahun 2018 dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 331,0 miliar.

Rasio Keuangan

Deskripsi	2018	2017	2016 ¹
Pertumbuhan Pendapatan (%)	(0,4)	4,8	2,0
Pertumbuhan EBITDA (%)	(0,5)	5,9	1,3
Marjin Laba Bruto (%)	74,8	77,0	75,4
Marjin EBITDA (%)	86,2	86,2	85,3
Marjin Laba Usaha (%)	66,0	68,6	66,6
Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan (%)	(64,4)	17,3	17,2

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	Perubahan 2017-2018
Aset Lancar	2.073,5	2.038,9	1,7%
Aset Tidak Lancar	9.597,0	10.571,2	(9,2%)
Jumlah Aset	11.670,5	12.610,1	(7,5%)
Liabilitas Jangka Pendek	1.536,3	821,2	87,1%
Liabilitas Jangka Panjang	7.164,3	7.695,5	(6,9%)
Jumlah Liabilitas	8.700,6	8.516,7	2,2%
Jumlah Ekuitas	2.969,9	4.093,4	(27,4%)

1) Disajikan kembali



Aset Lancar

Per 31 Desember 2018, jumlah aset lancar tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,7% menjadi Rp 2.073,5 miliar, dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2018, aset tidak lancar tercatat sebesar Rp 9.597,0 miliar, menurun sebesar 9,2% dibandingkan dengan Rp 10.571,2 miliar di akhir tahun 2017.

Jumlah Aset

Berdasarkan hasil dari aset lancar dan aset tidak lancar sebagaimana dijelaskan di atas, aset Perseroan tercatat sebesar Rp 11.670,5 miliar pada 31 Desember 2018, atau menurun sebesar 7,5% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp 12.610,1 miliar pada 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Desember 2018, liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp 1.536,3 miliar atau naik sebesar 87,1%. Peningkatan ini terutama

disebabkan oleh dua hal, yaitu: (i) penarikan revolving loan sebesar Rp 360,0 miliar, dan (ii) adanya bagian lancar atas utang bank sindikasi jangka panjang sebesar Rp 222,8 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,9% menjadi Rp 7.164,3 miliar, dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2017.

Pada bulan Februari 2018, Perseroan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman yang berupa fasilitas Term Loan USD sebesar USD 297.000.000 dan fasilitas Term Loan dan Revolving Loan IDR sebesar Rp 3.850,0 miliar, dan pada bulan Juni 2018 Perseroan mendapatkan opsi untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar USD 20.000.000.

Fasilitas Pinjaman ini akan dipergunakan untuk melakukan refinancing atas seluruh kewajiban Perseroan yaitu (i) fasilitas Term Loan USD sebesar USD 225.000.000 dan fasilitas Term Loan dan Revolving Loan IDR sebesar Rp 970 miliar dan (ii) obligasi sebesar USD 300.000.000.

Ekuitas

Rincian ekuitas pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	Perubahan 2017-2018
Modal Saham	113,7	113,7	-
Tambahan Modal disetor - Bersih	3.589,8	3.589,8	-
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(14,1)	(119,6)	(88,2%)
Saldo Laba (Defisit)	(719,5)	509,5	nm
Jumlah Ekuitas	2.969,9	4.093,4	(27,4%)

Jumlah ekuitas menurun sebesar 27,4% dari Rp 4.093,4 miliar pada 31 Desember 2017 menjadi Rp 2.969,9 miliar pada 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan

oleh penurunan nilai revaluasi aset tetap sebesar Rp 919,3 miliar (Catatan 9) sehingga mengakibatkan saldo defisit sebesar Rp 719,5 miliar pada 31 Desember 2018.

1) Disajikan kembali

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	Perubahan 2017-2018
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.637,1	2.084,7	(21,5%)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	374,8	713,0	(47,4%)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	1.385,3	1.276,4	8,5%

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan lainnya, pembayaran kepada manajemen dan karyawan, serta arus kas masuk dan keluar yang mencerminkan penerimaan serta pembayaran bunga dan pajak.

Pada akhir 2018, penerimaan kas dari pelanggan tercatat sebesar Rp 1.892,0 miliar, pembayaran kepada pemasok dan lain-lain sebesar Rp 137,5 miliar, dan pembayaran kepada manajemen dan karyawan sebesar Rp 112,4 miliar. Setelah diimbangi dengan penerimaan bunga serta penerimaan dan pembayaran pajak, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sejumlah Rp 1.637,1 miliar pada tahun 2018.

Pada akhir 2017, penerimaan kas dari pelanggan tercatat sebesar Rp 2.225,2 miliar, pembayaran kepada pemasok dan lain-lain sebesar Rp 63,6 miliar, dan pembayaran kepada manajemen dan karyawan sebesar Rp 98,7 miliar. Setelah diimbangi dengan penerimaan bunga serta penerimaan dan pembayaran pajak, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sejumlah Rp 2.084,7 miliar pada tahun 2017.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi yang mencakup penambahan menara telekomunikasi dan kolokasi, pembayaran sewa lahan dibayar di muka dan juga penambahan aset tetap.

Pada tahun 2018, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penambahan aset tetap sebesar Rp 161,3 miliar dan pembayaran sewa lahan dibayar di muka sebesar Rp 210,4 miliar.

Pada tahun 2017, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penambahan aset tetap sebesar Rp 315,6 miliar dan pembayaran sewa lahan dibayar di muka sebesar Rp 395,7 miliar.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi bersih adalah sebesar Rp 374,8 miliar pada tahun 2018 dan Rp 713,0 miliar pada tahun 2017.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan terutama terdiri dari perolehan dari utang sindikasi, penerimaan dan pembayaran utang bank, pembayaran utang obligasi, dan pembayaran beban keuangan.

Pada bulan Februari 2018 Perseroan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman yang berupa fasilitas Term Loan USD sebesar USD 297.000.000 dan fasilitas Term Loan dan Revolving Loan IDR sebesar Rp 3.850,0 miliar, dan pada bulan Juni 2018 Perseroan mendapatkan opsi untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar USD 20.000.000.

Fasilitas Pinjaman ini akan dipergunakan untuk melakukan refinancing atas seluruh kewajiban Perseroan yaitu (i) fasilitas Term Loan USD sebesar USD 225.000.000 dan fasilitas Term Loan dan Revolving Loan IDR sebesar Rp 970 miliar dan (ii) obligasi sebesar USD 300.000.000.

Pada tahun 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan digunakan untuk pembayaran pinjaman sindikasi dan pembayaran beban keuangan berjumlah Rp 1.276,4 miliar.



Likuiditas dan Struktur Permodalan

Perseroan bergerak di bidang infrastruktur yang lebih membutuhkan pendanaan investasi ketimbang pendanaan modal kerja. Sampai dengan akhir tahun 2018, kebutuhan pendanaan Perseroan diperoleh dari fasilitas pinjaman yang terdiri dari: (i) Term Loan USD sebesar USD 317.000.000 dan (ii) fasilitas Term Loan dan Revolving Loan IDR sebesar Rp 3.379,5 miliar.

Fasilitas Pinjaman ini akan dipergunakan untuk melakukan refinancing atas seluruh kewajiban Perseroan yaitu (i) fasilitas Term Loan USD sebesar USD 225.000.000 dan fasilitas Term Loan dan Revolving Loan IDR sebesar Rp 970 miliar dan (ii) obligasi sebesar USD 300.000.000.

Kemampuan Membayar Utang (Jangka Pendek & Jangka Panjang) & Tingkat Kolektibilitas Utang

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek & Jangka Panjang

Berikut ini merupakan tabel analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan yang ditandatangani setelah periode pelaporan pada bulan Desember 2018:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	Saldo Pinjaman (dalam juta US\$)	Pembayaran yang Jatuh Tempo Sesuai Dengan Kontrak ¹					
		Jumlah	2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitas USD Term	313,8	3.980,2	140,7	201,0	201,0	402,0	3.035,5
Fasilitas IDR Term	n.a	3.019,5	106,8	152,5	152,5	305,0	2.302,7
Fasilitas IDR Revolving	n.a	360,0	-	-	-	-	360,0
Jumlah	n.a	7.359,7	247,5	353,5	353,5	707,0	5.698,2

1) Pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya

Sementara untuk jumlah pinjaman dan pinjaman bersih yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman dikurangi dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	2016 ²
Jumlah pokok pinjaman ¹ Dikurangi:			
Kas dan setara kas	7.359,7	7.362,1	7.754,5
Pinjaman bersih	147,1	280,1	184,9 ³
Pinjaman bersih	7.212,6	7.082,0	7.569,6
Pinjaman Bersih⁴ Terhadap LQA EBITDA⁵	4,6X	4,4x	4,6x

Perseroan senantiasa memantau rasio pinjaman untuk memastikan kemampuannya dalam membayar seluruh pinjaman pada saat jatuh tempo (solvabilitas). Per 31 Desember 2018, rasio pinjaman bersih⁴ terhadap LQA EBITDA⁵ berada pada level yang sehat sebesar 4,6x.

Dalam perjanjian pinjaman yang disepakati bersama dengan para kreditur, Perseroan diperbolehkan untuk melakukan pinjaman sampai dengan batas rasio Pinjaman Bersih terhadap LQA EBITDA sebesar 5,5x, artinya Perseroan diberikan kepercayaan lebih untuk melakukan penambahan pinjaman jika diperlukan.

Perseroan memiliki fasilitas revolving sebesar Rp 800,0 miliar yang masih belum dicairkan sebesar Rp 440,0 miliar per 31 Desember 2018.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan dapat diukur melalui rasio periode penagihan rata-rata (average collection period) yang menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan Perseroan dalam menagih piutangnya dan rasio perputaran piutang (receivable turnover) yang menunjukkan berapa kali perputaran piutang dalam setahun.

Rasio lama penagihan rata-rata adalah sebesar 169 hari di tahun 2018 dan 146 hari di tahun 2017, sedangkan rasio perputaran piutang adalah sebesar 2,2x di tahun 2018 dan 2,5x di tahun 2017.

Berdasarkan penelaahan manajemen atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Per 31 Desember 2018, Perseroan melakukan restrukturisasi atas piutang usaha PT Internux secara prospektif ke aset keuangan tidak lancar lainnya sehubungan dengan Rencana Perdamiaan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana utang sewa PT Internux kepada Perseroan akan dibayarkan dengan bertahap selama 10 tahun.

Untuk pembahasan mengenai piutang Perseroan, silahkan merujuk pada Catatan 2, 4, 5, 6 & 11 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Struktur Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

1) Pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya

2) Disajikan kembali

3) Kompensasi yang diterima atas penghentian layanan Perseroan kepada Telkom Flexi sudah termasuk di jumlah Kas pada tanggal 31 Desember 2016

4) Pinjaman Bersih = Pinjaman (Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman) - Kas dan Setara Kas serta dana yang dibatasi penggunaannya

5) LQA EBITDA = Kuartal terakhir yang disetahunkan EBITDA



Berikut ini merupakan tabel struktur modal Perseroan yang terdiri dari:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	2016 ¹
Pinjaman ²			
Bank	7.359,7	3.571,9	3.737,4
Obligasi	-	3.790,2	3.726,6
Ekuitas	2.969,9	4.093,4	4.683,1
Total Modal yang Diinvestasikan	10.329,6	11.891,1	12.152,4

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mencatat rasio pinjaman bersih³ terhadap LQA EBITDA⁴ sebesar 4,6x, sementara rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 2,6x.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2018, tidak terdapat ikatan material baru sebagaimana diungkapkan pada Catatan No. 32 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Investasi Belanja Modal yang Direalisasikan

Realisasi belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut:

(Dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2018	2017	2016 ²
Penambahan Aset Tetap	161,3	315,6	386,5
Pembayaran Sewa Lahan Dibayar Di Muka	210,4	395,7	215,8
Jumlah Belanja Modal	371,7	711,3	602,3

Penambahan aset tetap selama 2018 sebagian besar merupakan pengadaan menara bergerak dan penambahan jaringan serat optik dan infrastrukturnya.

Pembayaran sewa lahan dibayar di muka merupakan pembayaran atas sewa lahan dari tambahan menara telekomunikasi selama 2018 dan perpanjangan atas perjanjian sewa lahan dari menara telekomunikasi yang ada.

1) Disajikan kembali

2) Pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya

3) Pinjaman Bersih = Pinjaman (Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman) - Kas dan Setara Kas serta dana yang dibatasi penggunaannya

4) LQA EBITDA = Kuartal terakhir yang disetahunkan EBITDA

Perbandingan Antara Target dengan Hasil yang Dicapai dan Target untuk Satu Tahun Mendatang

Dalam menjalankan usahanya, manajemen Perseroan secara rutin menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menentukan target kinerja Perseroan untuk tahun mendatang dengan berlandaskan pada

kapasitas Perseroan sepanjang tahun berjalan, dan ditentukan berdasarkan arahan dari pemegang saham.

Informasi Dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan

Tidak ada peristiwa yang material setelah periode laporan keuangan.

Prospek Usaha Perseroan

Jumlah pengguna mobile data di Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan masyarakat yang lebih cenderung bergantung pada teknologi mobile dan menggunakan aplikasi ber-bandwidth tinggi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlepas dari itu, konsumsi data per orang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Konsumsi data pun akan terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah startup dan usaha kecil dan menengah yang akan mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia.

Untuk memastikan layanan komunikasi tetap terjaga dengan baik, para operator telekomunikasi di negeri ini terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan 3G dan 4G LTE miliknya dimana para operator

telekomunikasi akan meningkatkan penyebaran dari menara makro dan tiang microcell. Hal ini memberi peluang bagi STP untuk membangun menara BTS dan kolokasi baru agar cakupan dan kualitas layanan para operator telekomunikasi tetap terjaga.

Maka dari itu, kami percaya bahwa para operator telekomunikasi akan terus berinvestasi dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan mereka agar dapat memenuhi permintaan data dari konsumen yang kian meningkat.

Dengan track record dan portofolio jaringan fiber optik Perseroan, kami percaya bahwa Perseroan memiliki keahlian dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dari para operator telekomunikasi. Perseroan akan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu dari perusahaan penyedia infrastruktur menara independen terkemuka di Indonesia.



Aspek Pemasaran

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan guna memenuhi setiap kebutuhan pelanggan dan mencari solusi untuk membantu pelanggan dalam hal penyediaan infrastruktur yang efektif dan efisien. Perseroan percaya, perkembangan bisnis para pelanggan secara tidak langsung juga mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Sejalan dengan tagline Perseroan untuk tahun 2018, yaitu *Gearing Up for Opportunities*, Perseroan terus mengembangkan,

meningkatkan keunggulan bisnis kami dan fokus terhadap Customer dan People Excellence agar Perseroan siap untuk menangkap peluang usaha yang menjanjikan. Perseroan juga terus meningkatkan keunggulan SDM, terutama setelah Perseroan mengembangkan sayap usahanya, Perseroan membutuhkan SDM yang memiliki skillset yang sebelumnya mungkin tidak dikuasai, termasuk product knowledge mengenai layanan baru yang dikembangkan oleh Perseroan, yaitu infrastruktur serat kabel, yang menasar pelanggan di luar operator telekomunikasi selular.

Penetrasi Pemasaran

Ditahun 2018, penetrasi pemasaran dan penjualan layanan Perseroan tetap fokus dalam penguatan sinergi dengan para operator telekomunikasi di Indonesia seiring dengan rencana roll out jaringan dari masing-masing operator. Selain itu, melalui entitas anak perusahaan, Perseroan juga fokus melakukan pemasaran dalam bidang pemanfaatan dan pengembangan jaringan kabel serat optik. Perseroan menyadari perlunya mencari pelanggan baru dan tidak bergantung kepada existing customers saja. Dengan memasuki sektor jaringan serat kabel,

Perseroan dapat menawarkan layanannya kepada perusahaan yang bergerak di bidang media, baik media televisi maupun media elektronik lain.

Dalam hal ini, Perseroan berupaya tepat dalam menyusun strategi dan melihat peluang ke depan melalui integrasi solusi-solusi yang inovatif dan terkini sejalan dengan perkembangan tren teknologi telekomunikasi di Indonesia.

Pengembangan Fokus Bisnis

Perseroan terus berkomitmen untuk memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas dan komitmen Perseroan. Untuk itu, Perseroan memformulasikan dan mengimplementasikan strategi pengembangan produk dan layanan yang berfokus pada perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi, termasuk memperlebar akses terhadap kapasitas backhaul jaringan serat optik dan jaringan indoor antenna system (DAS) di berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran, serta optimalisasi layanan penyewaan atau kolokasi infrastruktur jaringan lain yang dimiliki Perseroan. Perseroan

terus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan agar dapat secara menyeluruh bertumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan yang menyediakan jaringan infrastruktur yang seutuhnya.

Dalam menetapkan harga layanan, Perseroan senantiasa etika bisnis, kondisi pasar, dan kebutuhan pelanggan serta ketentuan yang dikeluarkan pihak regulator. Dengan demikian, Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun calon pelanggan secara berkesinambungan, dan berkompetisi secara sehat.

Service Excellence

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkaya pengetahuan karyawan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan (product knowledge) didukung oleh simplikasi standar operasional perusahaan

(SOP), serta dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui penajaman nilai inti Perseroan yang dibarengi dengan penerapan budaya Perseroan yang ditanamkan oleh Manajemen dalam upaya merealisasikan visi dan misi jangka panjang Perseroan.

Situs (Website) Perseroan

Perseroan memiliki situs (website) dengan alamat domain www.stptower.com. Website kami secara rutin dilakukan pengkinian dengan data-data dan informasi terbaru mengenai produk dan layanan Perseroan sehingga data yang ada bisa diakses oleh publik secara cepat dan akurat.

Company Profile

Perseroan juga memperkenalkan serangkaian produk dan layanan yang dimiliki melalui Company Profile dengan tujuan untuk mendukung kesuksesan upaya pemasaran dan penjualan yang dijalankan Perseroan.

Pusat Kontak dan Informasi

Dalam menanggapi pertanyaan dan permintaan pelanggan, Perseroan memiliki akses email melalui marketing@stptower.com sedangkan untuk servis dan bantuan, Perseroan menyediakan akses panggilan bebas biaya melalui 24 Hours Helpdesk di nomor 0800 1401380 dan email di callcenter@stptower.com

Ke depan, sebagai perusahaan penyedia menara dan infrastruktur jaringan telekomunikasi terintegrasi, Perseroan akan terus bersinergi dengan para operator telekomunikasi dengan cara mengakomodasi kebutuhan mereka melalui peningkatan kapasitas jaringan secara efektif dan penerapan strategi pengembangan jaringan secara terintegrasi.



Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas memerlukan persetujuan para pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Direksi. Dalam menetapkan pembayaran dividen kas beserta jumlahnya, Direksi akan mempertimbangkan usulannya yang didasarkan pada beberapa faktor, termasuk pencapaian hasil laba Perseroan, ketersediaan cadangan, kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, kebutuhan belanja modal dan kesempatan pengembangan usaha yang ada.

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pada tahun 2018, melalui RUPS Tahunan sesuai Akta Notaris Rini Yulianti S.H., notaris di Jakarta, No. 23 tanggal 23 Mei 2018, Direksi memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, mengingat kesempatan untuk pengembangan usaha yang masih sangat besar. Oleh karena itu, hasil laba yang selama ini diperoleh diusulkan untuk ditanam kembali guna pengembangan usaha Perseroan lebih lanjut, dan menetapkan dana cadangan umum sebesar Rp 22,9 miliar dari saldo laba tahun 2017.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus			
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Penggunaan 1	Penggunaan 2	Penggunaan 3	Jumlah
Penawaran Umum Terbatas II	19 Des. 2014	2.404.155	8.639	2.393.516	1.708.000	462.500	223.016	2.393.516

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Sisa Dana Hasil penawaran Umum
		Penggunaan 1	Penggunaan 2	Penggunaan 3	Total	
Penawaran Umum Terbatas II	19 Des. 2014	1.708.000	462.500	223.016	2.393.516	-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Waran Seri I (WS I)

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Efek	Tanggal Penerbitan	Total Efek yang Telah Diterbitkan (Lembar) ¹⁾	Efek yang Telah Dikonversi		Jumlah Efek yang Tidak Dikonversikan (Lembar) ²⁾	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Sisa Dana Hasil Konversi
			Jumlah (Lembar)	Nilai (Rp)			
Waran Seri 1	6 Mar 2013	59.415.534	59.414.674	285.117	860	285.117	-

1) Pada saat penerbitan efektif, jumlah efek waran yang diterbitkan sejumlah 59.400.000 waran, berdasarkan surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0284/JKU/0115 tanggal 6 Januari 2015 mengenai Laporan Penyesuaian Jumlah Waran Series I PT Solusi Tunas Pratama Tbk, jumlah efek waran menjadi sebesar 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp3.367 per waran.

2) Jumlah efek yang tidak dikonversikan sebanyak 860 waran merupakan sisa waran series 1 yang tidak berlaku lagi karena tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Terafiliasi

Tidak ada transaksi material yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi, selain yang diungkapkan pada Catatan 28 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun 2018

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

- PSAK 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif"
- PSAK 69: "Agrikultur"
- PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- PSAK 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Namun, penerapan PSAK 2 (Amandemen 2016) mengharuskan Perseroan untuk menyediakan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, Catatan 34.b.



Kelangsungan Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan usahanya senantiasa mengedepankan asas keseimbangan antara pencapaian laba usaha (profit), kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat dimanapun Perseroan melakukan aktivitas usaha (people).

Sepanjang tahun 2018, pendapatan usaha Perseroan berhasil dipertahankan di level yang sama dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan di tahun 2017. Sekitar 84% pendapatan Perseroan di tahun 2018 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Grup (termasuk reseller dengan PT Telekomunikasi Selular sebagai konsumen akhir) dan PT Indosat Tbk.

Demikian juga dengan EBITDA margin tahun 2018 yang dicatatkan Perseroan berhasil dipertahankan di level yang sama dibandingkan dengan EBITDA margin tahun 2017, yaitu sebesar 86,2% dari total pendapatan usaha. Pada tahun 2018, Perseroan menghasilkan EBITDA sebesar Rp 1.637,7 miliar.

Pada bulan Februari 2018, Perseroan berhasil melakukan refinancing dengan pinjaman sindikasi sebesar USD 297.000.000 untuk fasilitas Term Loan USD, ditambah Rp 3,050.0 miliar Term Loan IDR dan fasilitas revolving loan dan Rp 800,0 miliar untuk yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun yaitu di bulan Februari 2023. Selain itu, pada bulan Juni 2018, Perseroan mendapatkan opsi untuk meningkatkan pinjaman sebesar USD 20.000.000.

Pencapaian lain dari sisi keuangan yang berhasil dilakukan Perseroan pada 2018 adalah merestrukturisasi biaya pinjaman/bunga menjadi di atas London Interbank Offered Rate (LIBOR) 2,10-2,25% per tahun untuk pinjaman dalam USD; dan di atas Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 2,75% per tahun untuk pinjaman dalam IDR.

Dengan pencapaian di atas, Perseroan yakin akan keberlangsungan usaha Perseroan untuk terus beroperasi guna memenuhi harapan para pemegang saham.





05

Sumber Daya Manusia







Sumber Daya Manusia merupakan kunci sukses Perusahaan untuk kelangsungan operasi dan kinerja Perusahaan. Maka dari itu, pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu fokus utama karena kami percaya karyawan merupakan aset paling berharga yang berperan penting agar Perusahaan terus tumbuh dan menciptakan nilai dalam jangka panjang.

Unit Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan amat penting bagi pengembangan sumber daya manusia dan keberlanjutan usaha Perseroan. Unit ini bertugas untuk merencanakan, mengatur dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif secara berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman dan bermanfaat. Hal ini yang menjadi dasar untuk mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten dan andal sehingga diharapkan bisa menginspirasi mereka untuk menghasilkan karya-karya yang berdampak positif terhadap kelangsungan bisnis Perseroan, dan juga bagi kemajuan pelanggan serta masyarakat luas.

Guna memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah-ubah, kami terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang akan diperlukan di masa mendatang dengan pengembangan sumber daya manusia secara internal dan merekrut karyawan eksternal.

Salah satu prakarsa utama di 2018 adalah penyempurnaan proses pengelolaan dan pengembangan karyawan untuk dapat memiliki sumber daya manusia yang dapat meningkatkan nilai organisasi dan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya, serta siap berkontribusi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi komitmen Perseroan terhadap seluruh karyawannya dan mempertahankan keunggulan kompetitif, pengembangan karyawan dilakukan secara internal dalam on the job training dengan pengawasan dari masing-masing atasan dan juga secara eksternal dengan materi pelatihan yang dipilih untuk dapat mengembangkan kompetensi yang relevan.

Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan kemampuan seluruh karyawan. Total biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk peningkatan kompetensi mencapai sebesar Rp 170,2 juta pada tahun 2018.

Prosedur Seleksi dan Rekrutmen Karyawan

Perseroan juga menerapkan beberapa strategi dimana Perseroan terus memperbaiki dan me-review jalur rekrutmen yang ada untuk mendapatkan individu-individu terbaik melalui kerja sama dengan Institusi Headhunter, jaringan online professional networking yaitu LinkedIn, dan juga melalui Situs STP.

Program rekrutmen dirancang untuk menarik para talenta terbaik di seluruh tingkatan dimana program ini bertujuan untuk menyeleksi karyawan dan menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi masing-masing dan mampu dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja Perseroan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kesempatan berkarir secara adil. Kami menghargai keberagaman dalam jajaran tenaga kerja kami, karena Perseroan sadar bahwa memiliki karyawan yang berbeda jenis kelamin, usia, latar belakang dan perspektif akan menguntungkan bagi Perseroan. Kami menerapkan budaya inklusif dan kesetaraan ini ke dalam semua aspek kerja, termasuk perekrutan, pengembangan karir, promosi dan kompensasi. Pada tahun 2018, Perseroan merekrut 95 karyawan baru dari jumlah total 355 karyawan Perseroan.

Budaya Kerja

Perseroan berkomitmen untuk menganut 5 (lima) nilai inti Perseroan yang merupakan fondasi untuk memperkuat budaya Perseroan. Kelima tata nilai Perseroan tersebut mencakup: Terpercaya, Dinamis, Menyenangkan, Inovatif, dan Kerja Sama Tim. STP mengadopsi holistic approach dalam perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan-karyawan kami, dan juga menyelaraskan tenaga kerja Perseroan

dengan membudidayakan nilai-nilai inti untuk menjadi dasar dari tindakan dan bentuk budaya Perseroan.

Perseroan membangun kesadaran mengenai nilai-nilai tersebut beserta perilaku standar yang ditetapkan, dengan mengadakan sesi orientasi untuk seluruh karyawan baru dan juga program STP Culture yang melibatkan seluruh karyawan STP, termasuk Dewan Direksi.

Aktivitas STP Culture Musim ke 2





Komposisi Karyawan

Pada tahun 2018, jumlah karyawan STP berjumlah 355 karyawan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya yang sebesar 332 karyawan.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Perusahaan	Direktur & Setara Direktur	Kepala Div.	Kepala Dept.	Kepala Seksi	Officer	Staff	Non Staff	Jumlah Total
PT. Bit Teknologi Nusantara	1	7	10	23	23	2	5	71
PT. Sarana Inti Persada	-	-	1	3	10	-	-	14
PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	7	18	36	68	93	8	25	255
PT. Rekajasa Akses	1	1	3	-	7	3	-	15
Jumlah	9	26	50	94	133	13	30	355

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Perusahaan	Pasca Sarjana	Sarjana Strata 1	Diploma	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Total
PT. Bit Teknologi Nusantara	7	47	7	10	-	71
PT. Sarana Inti Persada	1	9	4	-	-	14
PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	7	172	33	36	7	255
PT. Rekajasa Akses	1	10	3	1	-	15
Jumlah	16	238	47	47	7	355

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Perusahaan	Karyawan Tetap	Karyawan Kontrak	Masa Percobaan	Jumlah Total
PT. Bit Teknologi Nusantara	52	19	-	71
PT. Sarana Inti Persada	7	7	-	14
PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	213	42	-	255
PT. Rekajasa Akses	14	1	-	15
Jumlah	286	69	-	355

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Perusahaan	<=25	>25-35	>35-40	>40-50	>50	Jumlah Total
PT. Bit Teknologi Nusantara	2	34	15	19	1	71
PT. Sarana Inti Persada	2	11	1	-	-	14
PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	15	95	72	59	14	255
PT. Rekajasa Akses	1	6	6	2	-	15
Jumlah	20	146	94	80	15	355

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

Perusahaan	Wanita	Pria	Jumlah Total
PT. Bit Teknologi Nusantara	19	52	71
PT. Sarana Inti Persada	8	6	14
PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	71	184	255
PT. Rekajasa Akses	5	10	15
Jumlah	103	252	355

Manajemen Kinerja

Penilaian kerja karyawan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester. Sistem penilaian yang dilakukan adalah dengan pendekatan Management by Objective (MBO).

perusahaan yang memiliki kompensasi dan benefit yang kompetitif. Dalam hal ini Perseroan juga selalu melakukan review kinerja setiap tahunnya.

1. Apresiasi

Perseroan memberikan apresiasi (reward) bagi setiap karyawan yang diukur berdasarkan kinerja masing-masing. Reward yang dimaksud adalah berupa insentif dan biasanya diberikan di akhir tahun saat proses appraisal karyawan oleh divisi SDM.

STP selalu berupaya untuk menerapkan pemberian kompensasi yang adil. Perseroan menyadari bahwa tenaga kerja dengan keahlian khusus, termotivasi, dan mampu berinteraksi dengan baik sangatlah penting bagi pencapaian sasaran pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang.

2. Sanksi

Dalam pelaksanaannya, mekanisme sanksi dijalankan secara normatif, dimana setiap karyawan yang terbukti melanggar peraturan dan etika kerja yang berlaku, maka akan menerima teguran dan/atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Perseroan memberikan remunerasi kepada karyawannya berdasarkan peran dan tanggung jawab, masa kerja dan penilaian kinerja berupa gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Sistem penggajian ditetapkan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan dan standar penggajian yang kompetitif di pasar tenaga kerja khususnya untuk industri terkait.

3. Strategi Remunerasi

Dalam menetapkan besaran remunerasi, Perseroan selalu melihat kondisi bisnis dan tren industri. Hal ini secara otomatis memposisikan Perseroan sebagai

Perseroan mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mengedepankan Kesetaraan Remunerasi dengan tidak membedakan jumlah remunerasi



berdasarkan gender, melainkan kepada jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja individu.

Struktur remunerasi karyawan Perseroan dikaji ulang setiap tahunnya untuk disesuaikan dengan situasi di pasar sehingga dapat terus bersaing dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Struktur remunerasi Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum regional (UMR).

Terdapat perbedaan dalam hal besaran remunerasi yang Perseroan tetapkan bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap memperoleh remunerasi dan fasilitas dalam bentuk gaji pokok, upah kerja lembur, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, cuti tahunan, istirahat bersalin, istirahat keguguran kandungan, izin sakit karena haid, izin menjalankan ibadah, izin meninggalkan pekerjaan, izin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji, program pensiun, uang dan santunan duka, serta fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Sedangkan karyawan

tidak tetap memperoleh semua remunerasi dan fasilitas kecuali izin meninggalkan pekerjaan, izin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji, dan program pensiun.

Ketentuan mengenai remunerasi dan manfaat yang diterima karyawan tersebut tercantum secara formal dalam Perjanjian Kerja Karyawan. Khusus untuk karyawan wanita, Perseroan memberikan istirahat melahirkan selama total 3 (bulan). Perseroan juga memberikan izin cuti meninggalkan pekerjaan bagi karyawan Pria karena kelahiran anak.

Komitmen Perseroan untuk melindungi karyawan juga dilakukan dengan memberikan paket manfaat yang komprehensif dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Manfaat ini meliputi:

- Manfaat kesehatan;
- Cuti hamil dan melahirkan;
- Dana pensiun;
- Tunjangan hari raya; dan
- Manfaat lainnya untuk karyawan dan keluarga inti karyawan.

Karyawan tetap dan karyawan kontrak berhak mendapatkan remunerasi dan manfaat berikut:

Remunerasi & Manfaat bagi Karyawan	Karyawan Tetap	Karyawan Kontrak
Upah & Gaji, termasuk Tunjangan Jabatan	√	√
Uang & Santunan Duka	√	√
Asuransi Cacat & Kecelakaan Kerja	√	√
Asuransi Kematian di Tempat Kerja	√	√
Asuransi Cacat & Kecelakaan di Luar Tempat Kerja	√	√
Asuransi Kematian di Luar Tempat Kerja	√	√
Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan	√	√
Asuransi Kesehatan bagi Pasangan Karyawan	√	√
Asuransi Kesehatan bagi Anak Karyawan	√	√
Hak Cuti	√	√
Cuti Melahirkan	√	√
Cuti karena Keguguran untuk Wanita	√	√
Cuti untuk Pria karena Kelahiran Anak	√	√
Cuti Ibadah	√	√
Izin Meninggalkan Pekerjaan	√	X
izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Gaji	√	X
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	√	√
Dana Pensiun	√ Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)	√ Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
Pesangon	√	X

Terkait pengembangan sumber daya manusia, Perseroan konsisten menerapkan kebijakan yang adil (fair) dan juga senantiasa menjamin kesempatan berkarir yang sama bagi karyawan pria maupun wanita dengan membangun sistem jenjang karir yang didasarkan pada kualifikasi jabatan, kompetensi karyawan yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, dan masa kerja. Perseroan menilai praktik pengembangan karir merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap karyawan, meningkatkan sikap kerja, menciptakan kepuasan kerja demi mencapai tujuan perusahaan.

Kesetaraan dan Keberagaman

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama di dalam Perseroan, dengan tidak memandang jenis kelamin, latar belakang, agama atau etnis. Setiap keputusan dalam melakukan perekrutan, pelatihan, promosi dan kompensasi didasarkan semata-mata pada kriteria yang objektif sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan dan kinerja karyawan.

Jalur Komunikasi Informasi Bagi Karyawan

Perseroan akan terus menjalin komunikasi secara baik dengan karyawan, biasanya melalui jalur komunikasi email, sosialisasi langsung atau tatap muka dengan karyawan, dan town hall meeting.

Di tahun 2018, aktivitas sosialisasi rencana bisnis dan strategi Perseroan dilakukan melalui aktivitas berikut:

- New Fiscal Year Gathering yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018, dimana bertujuan untuk menyampaikan pencapaian Perseroan untuk tahun 2017 dan juga target tahunan Perseroan kepada seluruh karyawan.
- Town hall meeting yang dilaksanakan pada bulan Juni 2018 di Jakarta, dimana bertujuan untuk melakukan review atas pencapaian Perseroan atas target tengah tahunan.
- STP Culture yang berlangsung mulai bulan Agustus 2017 hingga Juli 2018, yaitu kegiatan bulanan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Perseroan, termasuk direksi, yang dirancang berdasarkan nilai inti Perseroan. Adapun

kegiatannya adalah pertandingan Futsal, Talent Show, Lomba Memasak dan sebagainya.

- Improvement Workshop – One Team One Goal yang diselenggarakan pada bulan November 2018 di Bandung. Acara workshop ini dihadiri oleh seluruh karyawan dimulai dari kepala seksi sampai direktur, dimana pelatihan diberikan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan problem solving. Perseroan juga mengadakan perayaan untuk anniversary Perseroan dimana seluruh karyawan menghadiri acara team building guna memperkuat komunikasi dan menumbuhkan motivasi dan semangat kolaborasi yang akan berpengaruh baik untuk kemajuan Perseroan.

Diharapkan penyampaian informasi melalui cara ini dapat lebih efektif dalam membantu Perseroan merealisasikan visi dan misinya.

Work Life Balance di Lingkungan Kerja Perseroan

Perseroan sangat memperhatikan tingkat fleksibilitas pekerjaan karyawan khususnya untuk hal-hal terkait keseimbangan kerja dengan tanggung jawab keluarga setiap karyawan. Tingkat fleksibilitas yang dimaksud mencakup waktu kerja bagi pegawai tetap, waktu kerja bagi pegawai paruh waktu, dan waktu cuti untuk pegawai laki-laki setelah istrinya melahirkan.

Menghormati keseimbangan rohani dan jasmani

Upaya untuk menciptakan lingkungan serta suasana kerja yang seimbang antara bekerja dengan aktivitas pribadi (work and life balance) terwujud dalam kegiatan yang mengekspresikan aspirasi rohani dan hobi. Kegiatan tersebut diwadahi oleh Perseroan dengan menyediakan fasilitas ibadah seperti mushola dan juga fasilitas olahraga seperti gym atau pusat kebugaran, Muay Thai, Badminton, Kickboxing, Yoga dan pertandingan Futsal. Serangkaian upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki keseimbangan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di STP. Perseroan percaya bahwa kenyamanan lingkungan kerja juga menjadi tolak ukur kepuasan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, Perseroan selalu berusaha memfasilitasi pengelolaan lingkungan kerja melalui work flow yang nyaman dan seimbang demi memaksimalkan produktivitas serta kinerja setiap karyawan.



Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Hingga tahun 2018, Perseroan belum melaksanakan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (Employee Stock Ownership Program/ESOP) maupun Manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP).

Karyawan 10 Tahun Mengabdikan



Workshop One Team One Goal



Pemenang STP Culture 2



Workshop One Team One Goal





06



Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko







Tata Kelola Perusahaan

Dewan dan manajemen STP percaya bahwa komitmen yang baik terhadap tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting untuk keberlanjutan (*sustainability*) kinerja Perseroan. STP berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik dan panduan yang berlaku secara umum bagi perusahaan publik. Komitmen ini ditegaskan di semua tingkat organisasi, dimana prinsip dan praktik terbaik tata kelola ini diterapkan dalam aktivitas operasi sehari-hari dan ditinjau kembali untuk menjamin terpenuhinya tujuan guna mewujudkan nilai pemegang saham untuk para pemangku kepentingan (Stakeholders).

Prinsip GCG yang dimaksud terdiri dari lima prinsip utama, yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independence*) dan keadilan (*fairness*), atau disingkat menjadi TARIF.

1. Transparansi

Perseroan berupaya untuk menjamin keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material serta relevan terkait aktivitas Perseroan. Sebagai perwujudan prinsip transparansi, Perseroan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu cara Perseroan untuk mempertahankan objektivitas dalam menjalankan usaha.

2. Akuntabilitas

Agar sistem pengelolaan perusahaan bisa terlaksana dengan lebih efektif, Perseroan

beserta entitas anak dikelola dengan kejelasan struktur organisasi, fungsi, sistem, serta peran dan tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan maupun seluruh karyawan.

3. Tanggung Jawab

Perseroan berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dan memastikan bahwa Perseroan dikelola untuk menjadi perusahaan yang sehat, taat pada hukum dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

4. Independensi

Perseroan mendorong setiap unit kerja agar melakukan peran serta fungsinya masing-masing secara profesional dan independen tanpa ada benturan kepentingan atau tanpa pengaruh secara berlebihan dari pihak ataupun kepentingan tertentu. Upaya tersebut mencakup meminimalisir benturan kepentingan dalam kegiatan manajemen dan operasional, dengan cara memastikan agar rangkap jabatan dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap Perseroan.

5. Keadilan

Perseroan berupaya untuk menjamin adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karir tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin dan kondisi fisik.

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG di seluruh tingkatan organisasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku, Piagam Audit Internal Perseroan dan *Code of Conduct* Perseroan yang diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit setingkat Dewan Komisaris, dan Komite setingkat Direksi;

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal dan Manajemen Risiko;
4. Penerapan fungsi Kepatuhan;
5. Pelaksanaan pemilihan Audit Eksternal dan pembentukan Satuan Kerja Audit Internal;
6. Penyusunan Rencana Bisnis dan Key Strategic Initiative Perseroan;
7. Pelaksanaan transparansi laporan keuangan dan non keuangan Perseroan.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme GCG merupakan proses implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Sistem tersebut menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme GCG juga menjelaskan prosedur pengambilan keputusan dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

STP senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure* GCG) yang ada di lingkungan Perusahaan agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, Perusahaan selalu memasukkan peninjauan kembali terhadap *soft-structure* GCG dalam pembahasan rencana kerja GCG setiap tahunnya. Seluruh kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan GCG dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme *check-and balance* yang efektif.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*soft structure* GCG)

Soft-structure GCG atau kebijakan Tata Kelola Perseroan merupakan salah satu mekanisme dalam penerapan GCG. Mekanisme ini meliputi prosedur dan aturan pengawasan kinerja pihak pengambil keputusan, khususnya formulasi kebijakan yang akan ditempuh.

Soft-structure STP terdiri dari:

1. **Code of Corporate Governance**

Kode ini menjelaskan rangkaian proses yang digunakan oleh segenap jajaran Manajemen dalam mengelola STP sehari-hari dan memuat prinsip-prinsip penerapan GCG yang selaras dengan perundang-undangan, visi dan misi, serta budaya Perseroan.

2. **Board Manual**

Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi. *Board manual* menjelaskan tahapan

aktivitas yang terstruktur dan sistematis. Tahapan ini disusun berdasarkan regulasi (Undang-Undang/Peraturan), Anggaran Dasar, dan *best practices* yang telah disepakati bersama sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing. *Board Manual* juga menjelaskan secara rinci hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam melaksanakan tugas, sehingga tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien.

3. **Code of Conduct**

Code of Conduct merupakan pedoman perilaku dan etika bisnis bagi setiap insan Perseroan dalam menjalankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan lingkup pekerjaannya di Perseroan.

4. **Piagam Komite Audit**

Piagam Komite Audit adalah pedoman yang menjelaskan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, Komite Audit merujuk kepada Piagam yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi ini.

5. **Piagam Internal Audit**

Piagam adalah dokumen formal yang mengelaborasi visi, misi, tata nilai, kode etik dan norma, ruang lingkup, tugas, kewenangan, tanggung jawab dan standar pelaksanaan Audit. Piagam Internal Audit menjadi bukti komitmen dan dukungan manajemen serta komitmen fungsi Satuan Pengawasan Internal untuk menjalankan fungsinya. Piagam Internal Audit ditandatangani oleh Direktur Utama dan satu orang Direktur lainnya.

Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah ketentuan mengenai sistem pelaporan pelanggaran yang merugikan Perseroan. Sistem ini mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran, tahap investigasi sampai dengan tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam seluruh aktivitas usahanya, Perseroan memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut melalui langkah-langkah berikut:

- Memastikan Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
- Mengembangkan kelengkapan dan unit kerja yang menjalankan kegiatan operasional Perseroan;

- Menerapkan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
- Menerapkan keterbukaan informasi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan kepada publik.

Hingga tahun 2018, Perseroan telah melakukan penyesuaian Kebijakan GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

2011

- Perseroan menunjuk Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berdasarkan Surat Penunjukan No. 015/DIR-STP/CORSEC/II/2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan pada tanggal 2 Maret 2011.
- Perseroan menunjuk Hugo Feber Parluhutan sebagai Ketua Audit Internal Perseroan melalui Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tertanggal 15 Agustus 2011.
- Perseroan menyetujui pembentukan Piagam Audit Internal melalui Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tertanggal 15 Agustus 2011 yang terakhir kali diubah berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 September 2016.

2012

- Perseroan menyetujui pembentukan Piagam Komite Audit yang disahkan melalui Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tanggal 11 April 2012 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tanggal 15 April 2016
- Perseroan membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21 September 2012.

2013

- Perseroan membentuk Komite Audit melalui Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tanggal 18 April 2013 yang susunannya terdiri dari Erry Firmansyah selaku ketua Komite, Muhamad Senang Sembiring selaku anggota Komite, Jennywati Soewito selaku anggota Komite, dan Dharmawandi Sutanto selaku anggota Komite dengan masa jabatan selama 1 (satu) tahun. Susunan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud diangkat kembali secara berturut-turut setiap tahunnya melalui Keputusan Tertulis Dewan Komisaris.

2014

- Perseroan mengeluarkan pedoman kode etik (*Code of Conduct and Ethics*) yang berisikan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan agar secara konsisten bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai-nilai dan visi misi Perseroan.
- Perseroan mengeluarkan Kebijakan Anti Korupsi (*Anti Corruption Policy*) yang diberlakukan bagi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan.

2016

- Perseroan menunjuk Tissa Purnama sebagai Ketua Audit Internal Perseroan melalui Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tertanggal 27 Mei 2016, menggantikan Ketua Audit Internal Perseroan sebelumnya yaitu Hugo Feber Parluhutan yang menjabat sejak tahun 2011.

2017

- Perseroan melakukan perubahan komposisi dan susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017 yang mana susunannya terdiri dari Muhamad Senang Sembiring selaku ketua Komite, Sujoko Martin selaku anggota Komite dan Anwar Muljadi Arif selaku anggota Komite dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- Perseroan mengubah komposisi dan susunan Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris tertanggal 2 Oktober 2017 yang mana komposisi dan susunannya menjadi Erry Firmansyah selaku ketua Komite, Jonathan Yuwono selaku anggota Komite dan Ludwig Indrawan selaku anggota Komite.

2018

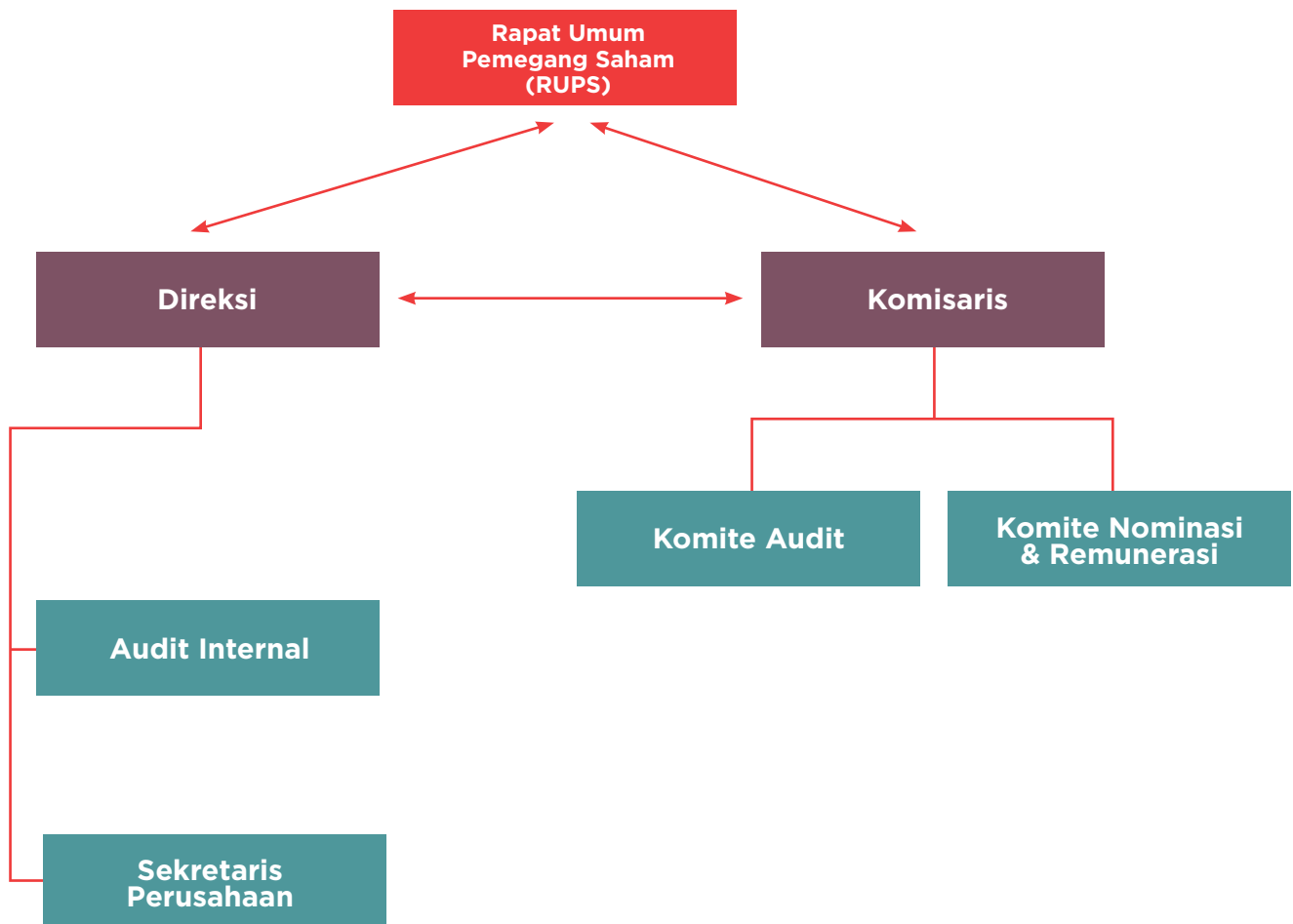
- Perseroan melakukan pembaharuan atas Pedoman Perilaku Perusahaan dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan Perseroan. Hasil akhir dari sosialisasi tersebut adalah dengan ditandatanganinya Pakta Integritas oleh seluruh karyawan Perseroan. Perseroan mewajibkan setiap karyawan baru menandatangani Pakta Integritas.



Struktur Tata Kelola Perusahaan

Seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, organ perusahaan tertinggi di dalam Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepengurusan di Perusahaan menganut sistem dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsi masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan hubungan tata kelola, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi, sedangkan Direksi dalam melakukan fungsi pengelolaannya dibantu oleh Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.



Pemegang Saham

Pemegang Saham STP terdiri dari Pemegang Saham pengendali dan Pemegang Saham Publik. Pemegang Saham Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan

dapat dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham Pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan.

Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham	Per 31 Desember 2018			Per 31 Desember 2017		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	
PT Kharisma Indah Prima	491.384.554	49.138.455.400	43,20	491.384.554	49.138.455.400	43,20
Cahaya Anugrah Nusantara Holdings Ltd	290.228.868	290.022.886.600	25,51	290.228.868	29.022.886.800	25,51
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600	0,03	359.596	35.959.600	0,03
Masyarakat Lainnya (Dibawah 5%)	355.606.680	35.560.668.000	31,26	355.606.680	35.560.668.000	31,26
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS STP terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Salah satu agenda penting RUPS Tahunan adalah membahas pengesahan Laporan Tahunan, dan RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku yang bersangkutan. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan/permintaan Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan jangka panjang Perseroan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara terbuka, wajar, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Pada tahun 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Solusi Tunas Pratama Tbk dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018, sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 23 tertanggal 23 Mei 2018 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hasil
1.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang antara lain memuat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.	- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017. - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/212.AGA/dwd.3/2018 tertanggal 28 Maret 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2.	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut : - Untuk dana cadangan umum menyisihkan sebesar Rp22,9 miliar (dua puluh dua koma sembilan miliar Rupiah). - Sisa laba tahun buku 2017 sebesar Rp308,1 miliar (tiga ratus delapan koma satu miliar Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan. Dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2017.
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
4.	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.	- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. - Memberikan kuasa pada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pada tahun 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Solusi Tunas Pratama Tbk dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018, sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 24 tertanggal 23 Mei 2018 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hasil
1.	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dengan cara menerbitkan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	• Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimum 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. • Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud di atas.



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas usaha yang dijalankan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali oleh RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab serta independen.

Penunjukan, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan RUPST tertanggal 23 Mei 2017 dan telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.

Per 31 Desember 2018, susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1.	Jonathan Yuwono¹	Komisaris Utama	23 Mei 2017
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	23 Mei 2017
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	23 Mei 2017
4.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	23 Mei 2017
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	23 Mei 2017

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris serta Organisasi yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit adalah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris berhalangan tetap sehingga jumlahnya menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Dewan Komisaris segera mengusulkan penggantinya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan;
3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
4. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, keuangan, hukum, akuntansi dan audit;
5. Setiap anggota Dewan Komisaris harus

memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan;

6. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, serta dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

1) Bapak Jonathan Yuwono telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 27 Februari 2019.

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun entitas anak usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;
5. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
6. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
7. Membentuk komite-komite lain, selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Independensi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
4. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

5. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan;
6. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Independensi Dewan Komisaris

Mengacu pada POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen, Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Bapak Erry Firmansyah dan Bapak Muhamad Senang Sembiring. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun, serta mengacu kepada POJK 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan; serta
- Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, kedua Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan independensi Komisaris Independen telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04.2014.



Tata Cara Penunjukan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat wajib mengikuti ketentuan :

- Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Usulan anggota Dewan Komisaris dapat diajukan melalui mekanisme pengajuan usulan acara RUPS dengan ketentuan :

- Usulan yang diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara;
- Usulan yang diajukan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
- Usulan yang diajukan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, meyakini alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan para anggota, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Jonathan Yuwono	Komisaris Utama	3	3	100%
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	1	1	33%
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	3	3	100%
4.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	3	3	100%
5.	Muhamad senang sembing	Komisaris Independen	3	3	100%

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan tidak mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi atau seminar baik di dalam

maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan oleh Dewan Komisaris yang lebih fokus pada melakukan pengawasan dan memantau agar aktivitas Perseroan berjalan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seiring dengan strategi bisnis Perseroan untuk 2018 yang fokus pada pembaruan struktur organisasi, penyelarasan kultur Perseroan melalui penajaman serta internalisasi nilai-nilai inti Perseroan, pengembangan serta pemberdayaan sumber daya manusia, dan perbaikan menyeluruh sistem operasional Perseroan.



Direksi

Sebagai organ eksekutif tertinggi di Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan operasional Perseroan, dalam upaya mencapai target yang ditentukan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi juga mewakili Perseroan dalam persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS yang diselenggarakan tanggal 23 Mei 2017 dan telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.

Per 31 Desember 2018, susunan Anggota Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	23 Mei 2017
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	23 Mei 2017
3.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur Independen	23 Mei 2017

Pada tahun 2018, RUPS Tahunan tertanggal 23 Mei 2017 menyetujui untuk mengangkat Tommy Gustavi Utomo sebagai Direktur Independen Perseroan dan menggantikan Eko Abdurrahman Saleh. Tidak ada perubahan komposisi anggota Direksi Perseroan lainnya. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi yang mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;
2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;
3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
4. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus disampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak dan/atau menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak;
6. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
3. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi wajib membentuk setidaknya satuan kerja Audit Internal;
4. Memastikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
5. Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Perseroan;

6. Membuat kebijakan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang di dalam organisasi;
7. Pembagian tugas dan wewenang kepengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; namun dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang anggota Direksi ditentukan berdasarkan keputusan Direksi;
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
9. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan strategis Perusahaan di bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai;
10. Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Direksi berwenang untuk:
 - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Mengatur tentang ketenagakerjaan.
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan.
 - Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
 - Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan kepemilikan kekayaan Perseroan, serta hubungan Perseroan dengan pihak lain.
 - Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setiap anggota Direksi menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat Anggota Direksi Perseroan yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi seperti Kepala Divisi, Kepala Bagian, dan Manajer) pada perusahaan lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Segala tindakan pengurusan Perseroan secara independen dijalankan oleh Direksi tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tata Cara Penunjukan Anggota Direksi

Anggota Direksi yang diangkat wajib mengikuti ketentuan :

- a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah mejadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat; (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewa Komisaris kepada RUPS; dan (iv) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; (v) memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan ; (vi) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS



dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan para anggota, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Rapat Direksi pada tahun 2018

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Direksi

Sepanjang tahun 2018, Dewan Direksi telah melakukan rapat setidaknya-tidaknya 12 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel Kehadiran Rapat Anggota Direksi di Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	12	12	100%
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	12	12	100%
3.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur	12	12	100%

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2018, anggota Direksi tidak mengikuti program-program pelatihan, konferensi atau seminar baik yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal karena Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya lebih fokus pada penerapan strategi bisnis Perseroan agar berjalan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun aktivitas Perseroan di

sepanjang 2018 lebih fokus pada pembaruan struktur organisasi, penyesuaian kultur Perseroan melalui penajaman serta internalisasi nilai-nilai inti Perseroan, pengembangan serta pemberdayaan sumber daya manusia, dan perbaikan menyeluruh sistem operasional Perseroan. Oleh karena itu, aktivitas seluruh anggota Direksi Perseroan di 2018 sangat terpusat pada pembenahan internal secara menyeluruh, dan mempertimbangkan untuk mengikuti program pelatihan/konferensi/seminar internal maupun eksternal di tahun yang akan datang.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan melaksanakan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Jonathan Yuwono	Komisaris Utama	3	3	100%
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	3	1	33%
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	3	3	100%
4.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	3	3	100%
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	3	3	100%
6.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	3	3	100%
7.	Juliawati Gunawan	Direktur	3	3	100%
8.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur	3	3	100%

Penilaian Kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi wajib melakukan kajian atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Anggota Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya satu kali dalam setahun;

1. Direksi wajib melakukan kajian atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Anggota Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya satu kali dalam setahun;
2. Direksi memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi mengenai efektifitas fungsi Direksi serta mempertimbangkan rekomendasi dan masukan Dewan Komisaris;
3. Evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham dan tetruang di dalam Laporan Tahunan;
4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan pertimbangan dan masukan Direktur Utama;
5. Pedoman penetapan remunerasi dan nominasi Direksi yang bersangkutan.

Pihak yang melakukan assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS. Sedangkan, penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2018, termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya, serta pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.



Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi meminta pihak independen untuk menyusun kerangka kerja untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Remunerasi mengusulkan kerangka dimaksud kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
5. RUPS melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Remunerasi

Prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Sementara struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi turut mengacu pada ketentuan sebagaimana telah ditetapkan disetujui oleh RUPS tersebut, dengan komponen penghasilan yang dimaksud terdiri dari:

- Gaji/Honorarium;
- Tunjangan;
- Fasilitas; dan
- Tantiem/Insentif Kinerja.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Remunerasi & Nominasi mengacu kepada indikator agar sesuai dengan tujuan dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Key Performance Indicator (KPI).
2. Kinerja Perseroan.
3. Business Size.
4. Hasil benchmarking remunerasi industri terkait.

5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan analisa dan evaluasi semua informasi tersebut serta menghasilkan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuannya dan/atau disampaikan kepada RUPS.

RUPS Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada 23 Mei 2018 memutuskan bahwa Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Terkait remunerasi, maka mengacu kepada keputusan Dewan Komisaris tertanggal 21 September 2012, Dewan Komisaris telah menyetujui dibentuknya Sub-Komite Remunerasi untuk memformulasikan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Remunerasi Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Pada tahun 2018, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 1,6 milyar dan Rp 13,5 milyar.

Untuk tahun 2017, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 1,4 milyar dan Rp 18,0 milyar.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang pada praktiknya harus dilaksanakan secara efektif guna mempertahankan tingkat keberhasilan kinerja Perseroan, kami harus memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari jajaran personel yang tepat dan berkualitas baik dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang luas seperti ekonomi, hukum dan teknologi yang terkait dengan bisnis kami.

Keragaman keahlian, latar belakang dan pengetahuan, pengalaman industri, di antara faktor-faktor lain akan menjadi pertimbangan saat akan memilih seorang anggota baru dari Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mengakui dan mendapatkan manfaat dari keberagaman latar belakang anggota Dewan

Komisaris dan Direksi, dan melihat peningkatan keragaman pada komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai satu bagian penting dalam menjaga keunggulan yang kompetitif.

Hubungan Afiliasi

Pihak	Perusahaan	Pemegang Saham		Entitas Anak							
		KIE	Cahaya	SIP	Platinum	Gema	BIT	PAP	KHA	BWA	REJA
Jonathan Yuwono	KU	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ludwig Indrawan	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thong Thong Sennelius	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erry Firmansyah	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Senang Sembiring	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobel Tanihaha	DU	-	-	D	D	D	D	-	-	K	K
Juliawati Gunawan	D	-	-	K	K	K	K	-	-	-	-
Tommy Gustavi Utomo	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

DU : Direktur Utama

WKU : Wakil Komisaris Utama

D : Direktur

KI : Komisaris Independen

DI : Direktur Independen

K : Komisaris



Komite Audit

Komite Audit diangkat melalui Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017 mengenai pengangkatan Komite Audit Perseroan. Periode jabatan Anggota Komite Audit Perseroan adalah mulai dari Mei 2017 sampai dengan Mei 2020.



Susunan Anggota Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1.	Muhamad Senang Sembiring (Komisaris Independen)	Ketua Komite	3 Oktober 2017
2.	Sujoko Martin (Pihak Independen)	Anggota Komite	3 Oktober 2017
3.	Anwar Muljadi Arif (Pihak Independen)	Anggota Komite	3 Oktober 2017

Profil Anggota Komite Audit

Muhamad Senang Sembiring Ketua Komite Audit	
Usia	66 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan	Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017
Riwayat Pendidikan	1996 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta 1999 Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta
Riwayat Jabatan	1974 - 1976 Sailor, Brokerage & Management Co, New York USA. 1976 - 1986 General Manager PT Aqmar Oil Service Co, Aceh Utara 1988 - 1990 Direktur Marketing PT Indotrim Hung Yuan Securities 1990 - 1991 Manager bidang Pasar Modal PT Bank Pelita 1991 - 1995 Direktur Marketing PT Arya Prada Sekuritas 1995 - 2000 Direktur Marketing PT Mitra Investdana Sekurindo 2000 - 2002 Presiden Direktur PT Mitra Investdana Sekurindo 2002 - 2007 Direktur Perdagangan dan Keanggotaan Bursa Efek Jakarta 2007 - 2009 Direktur Perdagangan dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia 2009 - 2018 Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia/ KEHATI 2013 - sekarang Komisaris Independen PT Rukun Raharja Tbk 2018 - sekarang Komisaris Independen PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia 2018 - sekarang Senior Advisor Keanekaragaman Hayati Indonesia/ KEHATI 2011 - sekarang Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Sujoko Martin Anggota Komite Audit	
Usia 50 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017	
Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan	
Riwayat Jabatan • 1991 – 1992 Section head (Supervisor) PT Honda Astra Engine Manufacturing (Federal Motor Group) • 1992 – 2004 Department Head of Corporate Accounting and Department & Head Office Accounting PT Astra International, Tbk (Head Office) • 2004 – 2009 Division Head of Accounting & Control PT United Tractors, TbkDirektur Marketing PT Indotrim Hung Yuan Securities • 2009 – 2010 Direktur Finance PT Bina Pertiwi (wholly owned subsidiary of PT United Trac • 2010 – 2014 Direktur Finance dan IT PT Bukit Makmur Mandiri Utama • 2015 – Feb 2017 CFO dan Board Risk Committee Samko Timber Limited, Singapore • Jul 2017 – Sekarang CFO PT Artamulia Tatapratama	

Anwar Muljadi Arif Anggota Komite Audit	
Usia 59 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017	
Riwayat Pendidikan • 1985 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan • 2004 Memperoleh gelar PPAK di Universitas Indonesia	
Riwayat Jabatan • 1985 – 1991 Drs Utomo & Co – SGV & Co - Audit Staff to Audit Manager Group) • 1991 – 1994 Prasetio, Utomo & Co – Arthur Andersen & Co – Audit AW Manager • 1994 – 2003 Prasetio, Sarwoko & Sandjaja – Ernst & Young – Senior Manager • 2003 – 2015 Purwantono, Suherman & Surja – Ernst & Young – Associate Director	

Independensi Komite Audit

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan dua (2) orang anggota dari profesional sebagai pihak independen yang keduanya berasal dari luar lingkungan Perseroan yaitu Sujoko Martin dan Anwar Muljadi Arif. Anggota dan Ketua Komite Audit bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan keuangan, keluarga, atau pun bisnis dengan Perseroan selain dari remunerasi yang diterima karena pelaksanaan tugas mereka selaku komite audit dan dewan komisaris.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Pihak Independen adalah pihak diluar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim auditor eksternal dan internal.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan menerapkan manajemen risiko untuk dilaksanakan Direksi.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang terkait dengan status Perusahaan sebagai perusahaan publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Laporan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku

Komite Audit telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, rapat Komite Audit telah membahas dan memberikan rekomendasi atas beberapa hal berikut:

1. Komite menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2018;
2. Komite memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Perseroan secara berkala;
3. Komite melakukan kajian terhadap usulan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 dan 2018;
4. Komite melakukan pembahasan atas perencanaan audit ekstern tahun 2018 dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal;
5. Komite memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2018, memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan dan memberikan rekomendasi di antaranya memastikan Pengembangan Teknologi Informasi;
6. Komite melakukan kajian atas Rencana Audit tahun 2019;
7. Komite memantau penerapan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku;
8. Komite memantau tindakan dan penanganan kasus internal fraud;
9. Komite melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala;
10. Komite melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Perseroan.

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Muhamad Senang Sembiring	Ketua Komite Audit	3	3	100%
2.	Sujoko Martin	Anggota	3	3	100%
3.	Anwar Muljadi Arif	Anggota	3	3	100%

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 April 2012 dan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 April 2016.

Struktur isi Piagam Komite Audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Pendahuluan
2. Tujuan Pembentukan Komite Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
4. Wewenang
5. Komposisi dan Struktur Komite Audit
6. Persyaratan Komisaris Independen
7. Syarat Keanggotaan Komite Audit
8. Etika Kerja
9. Pelaksanaan Kerja
10. Prosedur Pengaduan
11. Masa Tugas
12. Kebijakan Anti Korupsi dan Pedoman Operasional
13. Pemberlakuan





Komite Remunerasi & Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi yang berlaku efektif pada tanggal 2 Oktober 2017, yang diketuai oleh Erry Firmansyah dan beranggotakan Jonathan Yuwono dan Ludwig Indrawan.

Keduanya akan menjabat untuk periode jabatan yang belum ditentukan. Masa jabatan anggota

Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Dasar hukum pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi adalah Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Oktober 2017.

Profil Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Erry Firmansyah Ketua Komite Remunerasi & Nominasi	
Usia 64 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 Oktober 2017	
Riwayat Pendidikan 1981 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta	
Riwayat Jabatan 1982 - 1984 Auditor di Price Waterhouse Coopers Indonesia 1998 - 2002 Presiden Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2002 - 2007 Presiden Direktur Bursa Efek Jakarta 2007 - 2009 Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia 2009 - 2014 Komisaris Independen PT Elnusa Tbk 2009 - 2015 Presiden Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Komisaris Independen PT Astra International Tbk, dan Komisaris Independen PT Berau Coal Energy Tbk 2009 - sekarang Komisaris Independen PT Unilever Tbk, dan PT Elang Mahkota Energy Tbk, PT Eagle Capital, PT Makmur Sejahtera Wisesa 2013 - sekarang Komisaris PT Indopremier, PT Bali Towerindo Tbk 2017 - sekarang Komisaris Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk 2012 - sekarang Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk	
Jonathan Yuwono Anggota Komite Remunerasi & Nominasi	
Usia 37 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 Oktober 2017	
Riwayat Pendidikan 2004 Memperoleh gelar Bachelor of Arts Economics dari University of Michigan Ann Arbor	
Riwayat Jabatan 2008 - Sekarang Direktur PT Kharisma Indah Ekaprima 2010 - Sekarang Direktur PT Jeje Yutrindo Utama 2010 - Sekarang Direktur PT Asia Prima Packaging 2012 - Sekarang Direktur PT Freshindo Marketama 2017 - Sekarang Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk	

Ludwig Indrawan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi	
Usia 65 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 Oktober 2017	
Riwayat Pendidikan 1976 Memperoleh Business Studies dari Prahran College of Advance Education (CAE) (sekarang bernama Swinburne University), Melbourne	
Riwayat Jabatan	
• 1978 - 1982	Memulai karir di Challick Pte Ltd
• 1992 - 2007	Menjalankan pengembangan bisnis properti di Selandia Baru dan Australia dibawah bendera Stags Leap dan Smart Homes Group
• 2007 - Sekarang	Managing Director di PT Smart Homes Anugrah, Surabaya
• 2013 - Sekarang	Wakil Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Independensi Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi & Nominasi telah memenuhi kriteria independensi berikut ini:

- Bukan anggota manajemen.
- Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan.
- Bukan pemegang saham mayoritas Perseroan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perseroan.
- Bukan pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perseroan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Komite.
- Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perseroan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Komite.

- Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perseroan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.
- Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Perseroan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi adalah memformulasikan remunerasi dari anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan baik dalam bentuk tunai atau apapun (termasuk namun tidak terbatas pada gaji, tunjangan, bonus, intensif dan pesangon).



Sekretaris Perusahaan

Profil dan Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Sekretaris Perusahaan

Saat ini jabatan Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Juliawati Gunawan yang berdomisili di Jakarta dan diangkat berdasarkan Surat Penunjukan oleh Direksi Perusahaan No.015/DIR/STP/CORSEC/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan.

Juliawati Gunawan Sekretaris Perusahaan	
Usia 48 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Surat Penunjukan oleh Direksi 2 Maret 2011	
Riwayat Pendidikan 1993 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara	
Riwayat Jabatan 1992 - 2003 Auditor dan Konsultan di Prasetio, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) dan Ernst & Young Indonesia 2009 - Juni 2011 Financial Controller PT Solusi Tunas Pratama - Juni 2011 - sekarang Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk	

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama dan berperan dalam menjaga kelancaran hubungan antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk membantu Direksi dalam hal:

1. Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis Perseroan dan menjalin hubungan baik dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal.
2. Memastikan Perseroan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan kegiatan RUPS.
4. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi dan manajemen dengan pemangku kepentingan dalam rangka membangun citra Perseroan.
5. Menyelenggarakan kegiatan serta memfasilitasi hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan.
6. Memantau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Memonitor perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Menyebarkan informasi kepada semua unsur dalam organisasi yang menyangkut program-program Perseroan, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi Perseroan.

Laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Kegiatan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2018 termasuk:

1. Menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan;
2. Menyelenggarakan satu (1) kali paparan publik (public expose); dan
3. Memastikan pemenuhan terhadap kepatuhan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2018, Sekretaris Perusahaan Perseroan mengikuti program pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:

1. Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik & SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 13 Februari 2018.

2. Sosialisasi Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tanggal 26 Maret 2018.
3. Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 18 April 2018.
4. Seminar tentang Directors & Officers Liability Insurance dan Tanggung Jawab Korporasi pada tanggal 9 Mei 2018.
5. Pemaparan dan Diskusi Konsep Peraturan Nomor I-A Kep-0183/BEI/12-2018 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat pada tanggal 20 September 2018.
6. Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan POJK No. 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/ Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional pada tanggal 9 Oktober 2018
7. Sosialisasi Pengenalan E-Proxy dan E-Voting Platform yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) pada 6 Desember 2018.





Audit Internal

PT Solusi Tunas Pratama Tbk menyadari betapa pentingnya sistem pengendalian internal Perusahaan yang baik, dan memastikan bahwa sistem tersebut cukup lengkap dan memadai.

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan membentuk Unit Audit Internal Perusahaan pada 15 Agustus 2011. Dan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 27 Mei 2016 memutuskan untuk menunjuk dan mengangkat Tissa Purnama sebagai Ketua Unit Piagam Perusahaan.

Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang independen terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Perseroan dan sistem manajemen risiko. Unit Audit Internal juga berperan untuk memberikan penjaminan kualitas tata kelola seluruh bagian Perseroan. Tugas-tugas Unit Audit Internal ini dicapai dengan melakukan audit rutin dan menyeluruh terhadap semua departemen, fungsi, dan proses yang ada di Perseroan, dengan berfokus pada bagian yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi sehubungan dengan kemungkinannya dalam memberikan pengaruh yang dapat merugikan kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Profil Ketua Unit Audit Internal

Tissa Purnama, S.E. Ketua Unit Audit Internal	
Usia	36 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan	Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 27 Mei 2016
Riwayat Pendidikan	2006 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Institut Bisnis and Informatika Indonesia (sekarang dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business), Jakarta
Riwayat Jabatan	• 2006 – 2009 Staf Senior pada Assurance Services di PricewaterhouseCoopers/PwC Indonesia • 2009 – 2010 Staf Senior pada Internal Audit Services (IAS) di PricewaterhouseCoopers/PwC Indonesia • 2010 – 2013 Manager Audit internal di PT Indosat Tbk. • 2013 – 2015 Manager Audit internal di PT Central Cipta Murdaya • 2016 – Sekarang Ketua Unit Audit Internal di PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Dalam perjalanan karirnya, beliau telah mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu antara lain Sarbanes Oxley Section 404 Training yang diselenggarakan PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory pada Juni 2011, Introduction to Cellular Network Technology For The Non-Engineers yang diselenggarakan Milidetik pada Agustus 2011, Lean Six Sigma Yellow Belt Training yang diselenggarakan SSCX pada September 2012, Good Corporate Governance Training yang diselenggarakan oleh IICD pada Februari 2013, Enterprise Risk Management (ERM) & Risk Based Audit (RBA) Implementation Training yang diselenggarakan oleh Pusat

Studi Kebijakan Nasional pada Juni 2014, serta beberapa in-house training lainnya dengan topik terkait aktivitas audit yang diselenggarakan oleh PriceWaterhouseCoopers dimana partisipasi Tissa adalah sebagai peserta.

Ketua Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang anggota, yaitu 1 Kepala Departemen dan 1 (satu) orang Staf Audit Internal. Seluruh anggota Unit Audit Internal tersebut memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi dan pengalaman kerja sebelumnya sebagai auditor internal dan atau auditor eksternal.

Struktur dan Posisi Audit Internal

Unit Audit Internal Perusahaan ditetapkan pengangkatannya oleh Direksi Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2011.

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dalam Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Ketua Unit Audit Internal
2. Ketua Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Ketua Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Ketua Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Ketua Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Unit Audit Internal.
6. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal wajib diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Internal Audit merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Unit Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Unit Audit Internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Dalam struktur Organisasi, Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direksi

Tanggung jawab Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan

perusahaan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal mengacu kepada Piagam Audit Internal yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 16 September 2016.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik serta independensi dan obyektivitas Auditor Internal. Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi acuan bagi Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan, Unit Audit Internal menyusun prioritas objek audit tahunan dalam rencana audit internal dan memfokuskan pada unit usaha atau prospek bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas operasional dan atau laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Unit Audit Internal dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang menjadi salah satu dasar bagi Manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan



sehingga memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan secara efektif dan efisien.

prosedur, pengawasan internal serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa Perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Unit Audit Internal senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal pada semua level, dalam menerapkan kebijakan,

Akuntan Publik dan Auditor Eksternal

Dalam menyusun laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2018, dan guna meningkatkan fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM International). Penunjukan KAP Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ini dimaksudkan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018. Penunjukan KAP tersebut dilakukan berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mendelegasikan kewenangan penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("KAP AAJAM") sebagai auditor eksternal Perusahaan telah dilakukan sejak tahun buku 2011, maka periode penugasan KAP AAJAM terhadap jasa yang diberikan kepada Perusahaan tercatat sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun berurut-turut.

Perusahaan dan KAP AAJAM tidak memiliki hubungan afiliasi kekeluargaan dan keuangan yang mampu memengaruhi independensi auditor eksternal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Jasa yang diberikan kepada Perseroan selama tahun 2018 adalah audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Laporan keuangan tahunan Perseroan memperoleh hasil 'wajar tanpa pengecualian'. Biaya jasa audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 400 juta.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Manajemen Risiko

Seiring dengan dinamika perkembangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan mampu mengidentifikasi, memitigasi dan memantau risiko usaha yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Penerapan sistem manajemen risiko yang tepat sasaran dan intensif diharapkan mampu memberi manfaat yang berkelanjutan berupa:

1. Penyediaan informasi kepada pihak manajemen mengenai eksposur risiko yang dihadapi.
2. Peningkatan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis.
3. Penilaian risiko yang melekat pada setiap produk atau kegiatan usaha Perseroan.

Risiko yang Dihadapi Perseroan dan Upaya Pengelolaan Risiko

Beberapa risiko utama yang memiliki pengaruh penting terhadap kegiatan usaha Perusahaan, antara lain:

Profil Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Operasional	• Menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara yang dimiliki serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik. • Mengasuransikan sebagian besar aset dengan nilai yang memadai untuk meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah.
Risiko Hukum	• Menelaah secara seksama atas perjanjian yang dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan tenants, para pemilik lahan dan pemasok untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. • Peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari.
Risiko Keuangan	• Menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati. • Melakukan perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten. • Menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif. • Melakukan kontrak lindung nilai terhadap risiko (i) fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap pembayaran pinjaman Perusahaan yang diperoleh dalam mata uang USD dan juga terhadap risiko (ii) volatilitas suku bunga pinjaman.



Perkara Penting di Tahun 2018

Perkara Penting yang Dihadapai Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang menjabat tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata.

Pada bulan Februari 2019, Komisaris Utama Perseroan Bapak Jonathan Yuwono menjadi tersangka dalam perkara pembobolan deposito PT. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) sebesar Rp 27 miliar untuk pelunasan utang PT. Jeje Yutrindo Utama yang merupakan mantan pemegang saham YULE. Dimana Bapak Jonathan Yuwono menjabat sebagai Direktur PT. Jeje Yutrindo Utama.

Pada bulan yang sama juga, Bapak Jonathan Yuwono telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Perseroan akan memutuskan efektivitas pengunduran diri beliau melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2019. Perseroan telah menyampaikan pengunduran diri Bapak Jonathan Yuwono kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2019.

Perkara Penting yang Dihadapai Perseroan

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan.

Kode Etik Perusahaan

Kode Etik bertindak sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan agar secara konsisten bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai-nilai dan visi misi Perseroan.

Isi Kode Etik

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Pemegang Saham, Pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya (yang meliputi Hubungan dengan Pelanggan, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyusunan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, dan Anti Pencucian Uang);
7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan terus mengoptimalkan penerapannya guna mencapai skema praktik terbaik. Perseroan terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan memperkuat etika dan budaya kerja yang mengutamakan integritas tinggi, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh level manajemen dan karyawan.

Upaya Penegakan Kode Etik

Perseroan terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email blast kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat Induction Program bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik, sementara sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. Perseroan memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik. Pengendalian Korupsi dan Gratifikasi.

Pengendalian Korupsi dan Gratifikasi

Untuk memandu manajemen dan seluruh karyawan dalam menjalankan etika bisnis yang sehat, Perseroan menerapkan Kebijakan Antikorupsi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan tanpa terkecuali. Hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 Agustus 2012. Perseroan juga menunjuk Compliance Manager untuk memastikan Kebijakan Antikorupsi ini berlaku dan dijalankan dengan baik. Pokok-pokok isi dari Kebijakan Antikorupsi tersebut, antara lain:

1. Larangan tergas terhadap korupsi dalam bentuk apapun.
2. Hubungan dengan mitra kerja.
3. Mengatur kebijakan tentang hadiah, hiburan, dan perjalanan.
4. Sumbangan politik, donasi, CSR dan sponsorship.
5. Rekrutmen mantan pejabat pemerintah dan pejabat pemerintah aktif.
6. Ketepatan pencatatan dan pengendalian internal.
7. Sanksi.
8. Prosedur kepatuhan.

Benturan Kepentingan

Seluruh karyawan Perseroan diharapkan menghindari kegiatan pribadi atau urusan finansial yang berbenturan kepentingan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan.

Whistleblowing System

Terjadinya fraud yang diakibatkan oleh praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi citra Perseroan. Hal tersebut juga dapat merusak produktivitas kerja maupun kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen menyediakan sarana sistem pelaporan bagi Karyawan yang berkeinginan untuk menyampaikan pelaporan dugaan pelanggaran terkait fraud atau dikenal sebagai Whistleblowing System (WBS). Sarana ini dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam membantu Perseroan meningkatkan kualitas GCG.

Dalam rangka untuk semakin mendorong peran serta Karyawan dalam melaporkan, mencegah dan menangani pelanggaran terkait fraud secara efektif dan efisien, maka Perseroan juga menambah kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan fraud dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perseroan dimana identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email dan unit kerja/perusahaan) akan dijaga

kerahasiannya. Selain itu, pelapor diperbolehkan untuk tidak mencantumkan identitas (anonim). Divisi Audit Internal merupakan Unit Kerja terkait yang mengelola pengaduan dimana laporan yang diterima oleh Perseroan akan diteruskan ke Direktur Utama kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait tersebut. Bilamana diperlukan maka unit kerja terkait tersebut akan melakukan investigasi lebih lanjut.

Penanganan dan Pihak Pengelola Pengaduan

Divisi Audit Internal merupakan Unit Kerja terkait yang mengelola pengaduan dimana laporan yang diterima oleh Perseroan akan diteruskan ke Direktur Utama kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait tersebut. Bilamana diperlukan maka unit kerja terkait tersebut akan melakukan investigasi lebih lanjut.

Perseroan juga telah memiliki pedoman dan prosedur operasional pengelolaan WBS, dengan maksud untuk memberikan pedoman kerja bagi divisi dan unit kerja terkait lainnya, sehingga aktivitas penanganan pelaporan dugaan fraud melalui media WBS yang tersedia dapat dilakukan sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan dan terdokumentasikan dengan baik. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran terkait fraud dapat dilakukan melalui surat, email, website dan telepon.



Laporan Whistleblowing System 2018

Sepanjang 2018, Perseroan mencatat tidak terdapat (nihil) laporan pengaduan pelanggaran yang masuk baik melalui telepon, email, faksimili ataupun kontak surat.

Komitmen Perseroan Terhadap Perlindungan Konsumen

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Perseroan telah mengasuransikan atau menjamin kualitas serta kinerja dari produk yang dijual kepada Pelanggan/Klien.

Komitmen Perseroan atas perlindungan terhadap konsumen tercermin dalam Standar Etika Perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan senantiasa bekerja keras untuk memberikan layanan dan produk dengan kualitas terbaik dengan harga kompetitif;
2. Perseroan senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan;

3. Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai;
4. Demi mempertahankan kualitas produk, Perseroan memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi, dan distribusi;
5. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil; dan
6. Perseroan dan konsumen juga saling melakukan upaya evaluasi guna perbaikan dan hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif.

Perseroan memiliki Pusat Pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui email yang ditujukan kepada callcenter@stptower.com atau melalui 24 Hours Helpdesk di nomor 0800 1401 380.



Akses Informasi dan Data Perseroan Kepada Publik

Dalam rangka memelihara akuntabilitas dan transparansi perusahaan, Perseroan secara rutin menyampaikan berbagai informasi, khususnya yang terkait dengan kepentingan pelanggan Perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya. Perseroan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bursa efek dan pasar modal terkait keterbukaan informasi. Secara berkala, Perseroan selalu menyampaikan informasi terkini tentang Perseroan kepada pemegang saham, pihak otoritas pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai jalur komunikasi. Selain pelaporan langsung kepada regulator pasar modal, informasi juga disampaikan oleh Perseroan kepada pemegang saham secara umum melalui pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di media massa.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan membuka saluran informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui:

Situs (website)

Guna mendukung kemudahan dalam mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan, Perseroan telah membangun platform teknologi informasi yang efektif dalam memberikan dukungan penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran. Bagi masyarakat umum yang berminat mencari informasi perkembangan terkini Perseroan dapat mengakses situs resmi Perseroan di www.stptower.com.

Laporan Tahunan

Informasi lebih lengkap mengenai Perseroan dapat diperoleh melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Layanan Pelanggan

Sedangkan bagi Anda yang ingin mendapatkan dan mengirimkan informasi lebih rinci termasuk dalam menyampaikan keluhan, silahkan gunakan fasilitas “Kontak Kami” di situs www.stptower.com. Atau mohon hubungi kami melalui saluran telepon di nomor +6221-5794 0688, dan faksimili di nomor +6221-5795 0077.

Media Massa

Perseroan secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Alamat surat-menyurat:

PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Rukan Permata Senayan Blok C01-02

Grogol Utara, Kebayoran Lama

Jakarta 12210, Indonesia

Telepon : +6221 5794 0688

Fax : +6221 5795 0077

Email : corporate.secretary@stptower.com

Website : www.stptower.com



07

Tanggung Jawab Sosial dan Hubungan Kemasyarakatan





STP percaya bahwa reputasi yang baik merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan bisnis. Maka dari itu, Perseroan yakin bahwa pencapaian bisnis yang berkelanjutan tidak hanya terpaku kepada keuntungan secara finansial, tetapi juga kepada kontribusi kepada masyarakat sekitar. Perseroan berkomitmen untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama masyarakat dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan berlandaskan kesadaran penuh bahwa keberadaan Perseroan di tengah masyarakat sangat bergantung pada penerimaan masyarakat setempat terhadap Perseroan sebagai perusahaan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia.

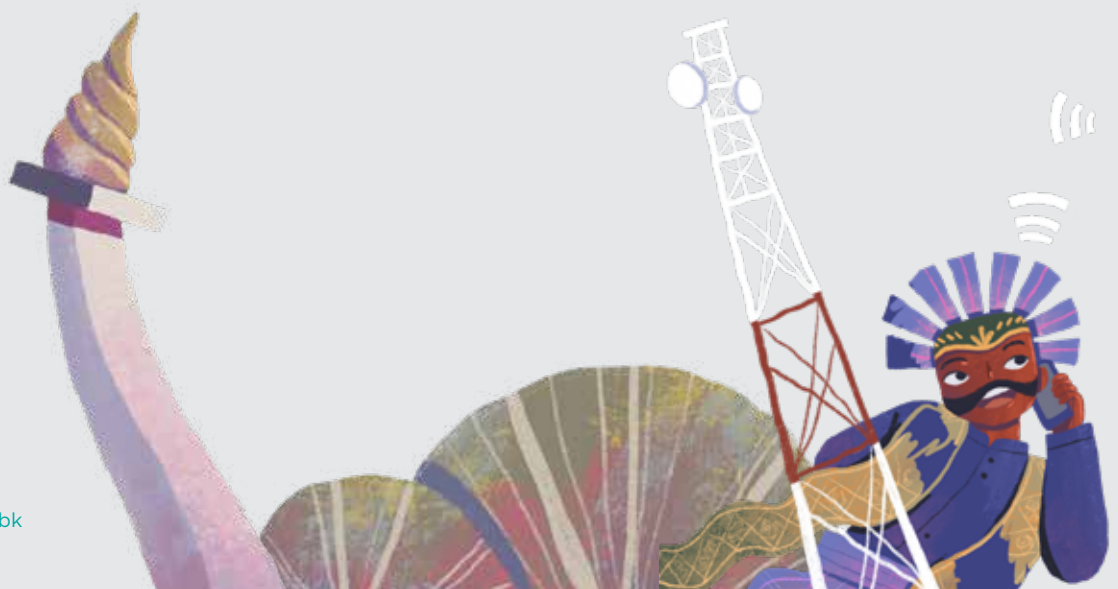
Wujud nyata dari komitmen Perseroan tercermin dengan adanya program-program CSR yang dilaksanakan tahun 2018, dimana Perseroan menjalankan serangkaian inisiatif peduli sosial dan perbaikan serta pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari kepedulian Perseroan dalam pemulihan pasca bencana terdampak gempa dan tsunami di beberapa daerah di Indonesia seperti Lombok, Palu dan Selat Sunda. Bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pun terdiri dari:

1. Pembangunan sumur bor serta penyediaan instalasi air bersih yang digunakan warga sekitar untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari menggantikan sumur yang hancur atau tertimbun.

2. Pemberian terpal berukuran besar dan pembangunan tenda sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya hancur atau sebagai pos pusat bantuan.
3. Pemberian kebutuhan pokok penunjang hidup seperti beras, makanan ringan, selimut, sarung, alat mandi, obat-obatan dan sebagainya.
4. Pemberian alat sekolah dan peralatan shalat.

Melalui program CSR, Perseroan berupaya menciptakan sinergi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan memberikan kontribusi bagi keberlanjutan kemajuan sosial (*social*), pertumbuhan ekonomi (*profit*), dan kelestarian lingkungan sekitar (*people*) dengan melibatkan karyawan dalam pelaksanaan program CSR. Perseroan juga melakukan pendekatan persuasif, komunikasi dua arah dan pemberian program bantuan serta pengembangan, efektif dilakukan dalam upaya membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Kedepannya, Perseroan sadar penuh untuk senantiasa memprioritaskan penerapan pola bisnis yang berkelanjutan yang dapat memberi nilai tambah bagi para pemegang saham sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para karyawan dan masyarakat sekitar. Perseroan berkomitmen untuk terus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan membantu warga yang membutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar maupun sekedar mempererat tali silaturahmi.



Penyerahan bantuan korban bencana alam Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

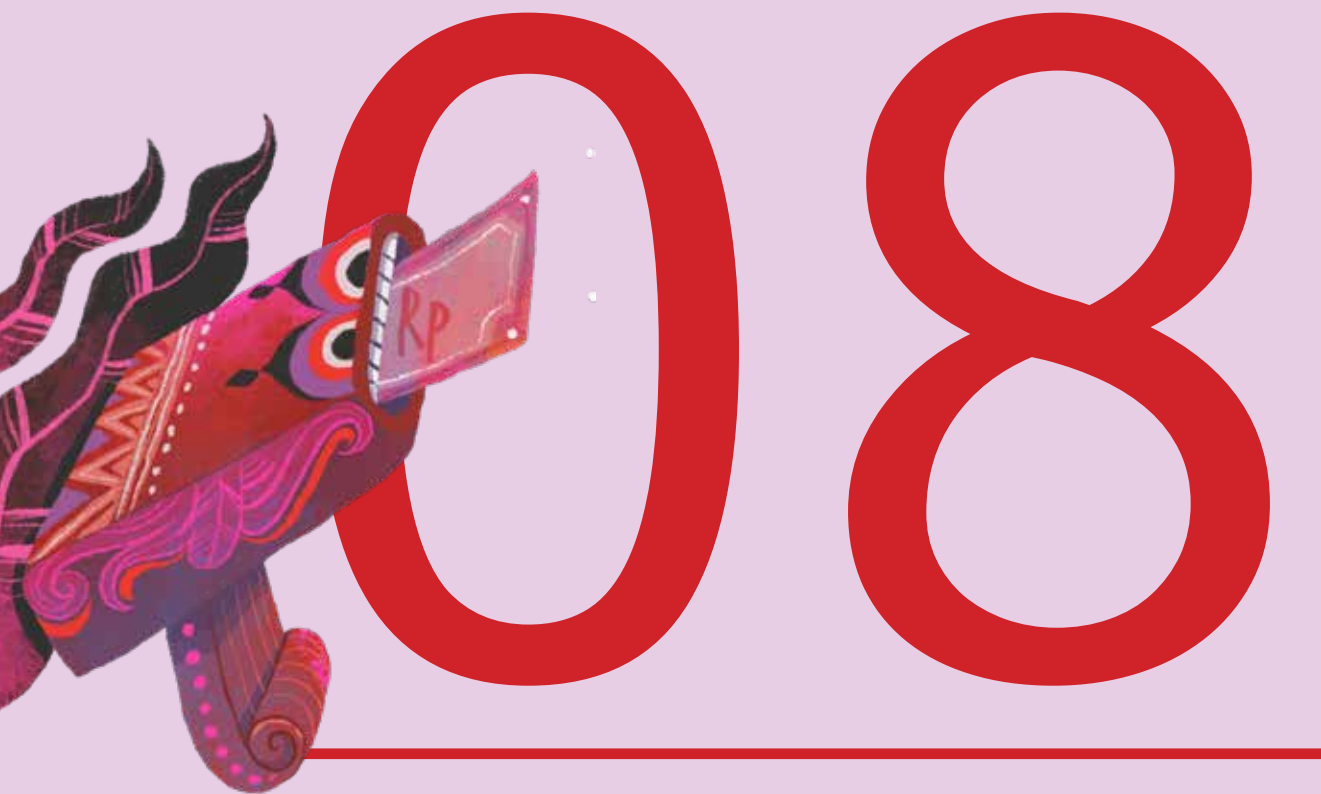


Penyerahan bantuan korban bencana alam Lombok



Penyerahan bantuan korban bencana alam Selat Sunda





Laporan Keuangan Konsolidasian



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017**

***PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan-Laporan Keuangan Tersendiri:		Supplementary Information-Separate Financial Statements:
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I/ <i>Appendix I</i>	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	Lampiran II/ <i>Appendix II</i>	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran III/ <i>Appendix III</i>	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran IV/ <i>Appendix IV</i>	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Pengungkapan Lainnya	Lampiran VI/ <i>Appendix V</i>	<i>Other Disclosures</i>



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER**

**Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian/
Regarding to the Responsibility for the Consolidated Financial Statements**

**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 December 2018 dan 2017
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Nama/ <i>Name</i> | : | Nobel Tanihaha |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, RT.005/RW.002
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | (021) 5794 0688 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2 | Nama/ <i>Name</i> | : | Juliawati Gunawan Halim |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Perum Citra 3 Blok E-5/3A, RT.006/RW.013
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | (021) 5794 0688 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur/ <i>Director</i> |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan; | 1 | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information;</i> |
| 2 | Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2 | <i>The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3 | a) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3 | a) <i>All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;</i> |



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

- | | |
|---|--|
| <p>b) Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas Anak.</p> | <p>b) <i>The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.</i></p> <p>4 <i>We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 27 Maret/March 27, 2019
Atas Nama dan Mewakili Direksi/ *On behalf of the Board of Directors*



Nobel Tanihaha
Direktur Utama/
President Director





Juliawati Gunawan Halim
Direktur/
Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00360/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian ini bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan

obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended, is performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2018, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken a whole.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan




Tjun Tjun

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 27 Maret/March 27, 2019

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	3, 29	147,045	280,149	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	4, 29	1,005,389	754,948	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5, 29	247,934	253,897	Accrued Income
Piutang Lain-lain	6, 28, 29	26,335	28,291	Other Receivables
Persediaan	7	35,295	37,922	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	26.a	355,081	438,350	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	8	256,442	245,321	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		2,073,521	2,038,878	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	8	847,204	785,862	Advances and Prepaid Expenses - Net of Current Portion
Aset Tetap	9	8,288,344	9,404,369	Property and Equipment
Aset Takberwujud	10	108,299	114,897	Intangible Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	11, 29	352,366	265,832	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	26.d	747	229	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		9,596,960	10,571,190	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		11,670,481	12,610,068	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	12, 29			Trade Payables
Pihak Berelasi	28	486	9,578	Related Party
Pihak Ketiga		14,410	26,116	Third Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	29	157	427	Other Current Financial Liabilities
Utang Pajak	26.b	8,863	9,693	Taxes Payable
Akrual	13, 29	77,463	159,945	Accruals
Pendapatan Ditangguhkan	14	852,120	615,401	Deferred Income
Utang Bank Jangka Pendek	15.a, 29	360,000	--	Short-Term Bank Loan
Bagian Lancar atas Utang Bank				Current Portion of Long-Term
Sindikasi Jangka Panjang	15.b, 29	222,766	--	Syndicated Bank Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1,536,265	821,160	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Sindikasi Jangka Panjang	15.b, 29	7,134,063	3,649,029	Long-Term Syndicated Bank Loans
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	17	30,248	27,265	Long-Term Employment Benefits Obligation
Utang Obligasi	16, 29	--	4,019,204	Bond Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		7,164,311	7,695,498	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8,700,576	8,516,658	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per Saham				Share Capital - Rp100 Par Value per Share
- Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham				- Authorized Capital - 2,000,000,000 Shares
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.137.579.698 Saham tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	18	113,758	113,758	- Issued and Paid-Up Capital - 1,137,579,698 Shares as of December 31, 2018 and 2017
Tambahan Modal Disetor - Bersih	19	3,589,771	3,589,771	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lainnya	20	(14,145)	(119,647)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba (Defisit)		(719,479)	509,528	Retained Earnings (Deficit)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2,969,905	4,093,410	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		--	--	Non-controlling Interest
Jumlah Ekuitas		2,969,905	4,093,410	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		11,670,481	12,610,068	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
PENDAPATAN	21	1,899,775	1,908,487	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	22			COST OF REVENUES
Penyusutan dan Amortisasi		359,618	313,645	Depreciation and Amortization
Beban Pokok Pendapatan Lainnya		119,055	125,177	Other Cost of Revenues
Jumlah		<u>478,673</u>	<u>438,822</u>	Total
LABA BRUTO		1,421,102	1,469,665	GROSS PROFIT
Beban Usaha	23			Operating Expenses
Penyusutan dan Amortisasi		(23,774)	(22,765)	Depreciation and Amortization
Beban Usaha Lainnya		(142,989)	(137,257)	Other Operating Expenses
Jumlah		<u>(166,763)</u>	<u>(160,022)</u>	Total
LABA USAHA		1,254,339	1,309,643	OPERATING PROFIT
Penghasilan Bunga		7,984	20,057	Interest Income
Beban Keuangan	24			Financial Charges
Beban Bunga		(513,710)	(452,084)	Interest Expense
Beban Keuangan Lainnya		(440,893)	(550,054)	Other Financial Charges
Penurunan Nilai dari Revaluasi Aset Tetap	9	(919,255)	--	Decline in Value of Revaluation of Property and Equipment
Beban Lain-lain - Bersih	25	<u>(590,803)</u>	<u>(116,427)</u>	Other Expense - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(1,202,338)	211,135	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	26.c	<u>(21,505)</u>	<u>119,827</u>	Income Tax Expense
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>(1,223,843)</u>	<u>330,962</u>	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	17	6,165	430	Remeasurement of Defined Benefit Plan
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	17, 26.d.	(202)	(1,450)	Income Tax of Remeasurement of Defined Benefits Plan
Kenaikan (Penurunan) Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	9	205,271	(874,474)	Net Increase (Decrease) of Revaluation of Tower and Supporting Equipment
Pajak Penghasilan atas Penurunan Bersih Revaluasi Menara		--	256,260	Income Tax of Changes in the Decrease of Towers
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	20	15,170	349	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas	20	(126,066)	(301,730)	Effective Portion of Loss on Hedging Instrument Related with Cash Flow Hedge
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		<u>100,338</u>	<u>(920,615)</u>	Total Other Comprehensive Income for the Year Net Off Tax
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(1,123,505)</u>	<u>(589,653)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(1,223,843)	330,962	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		--	--	Non-controlling Interest
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>(1,223,843)</u>	<u>330,962</u>	TOTAL PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(1,123,505)	(589,653)	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		--	--	Non-controlling Interest
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(1,123,505)</u>	<u>(589,653)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM:				EARNINGS PER SHARE:
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (Rupiah Penuh) Dasar	27	(1,076)	290	Profit for the year attributable to shareholders of common shares of the Company (Full Rupiah) Basic

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Bersih/ Additional Paid-in Capital - Net	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income				Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)			Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
			Lindung Nilai Arus Kas/ Cash Flow Hedge	Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang/ Net increase in Revaluation of Tower and Supporting Equipment	Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing/ Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurment of Defined Benefits Plan	Jumlah/ Total	Yang Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Yang Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016	113,758	3,589,771	54,338	762,855	776	4,143	822,112	22,900	134,522	157,422	4,683,063	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2016
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2017												Movements in Equity in 2017
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba												Reclassification of Revaluation Reserve to Retained Earning
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(301,730)	(618,214)	349	(1,020)	(920,615)	--	330,962	330,962	(589,653)	Total Comprehensive Income for the Year
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017	113,758	3,589,771	(247,392)	123,497	1,125	3,123	(119,647)	22,900	486,628	509,528	4,093,410	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2017
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2018												Movements in Equity in 2018
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba												Reclassification of Revaluation Reserve to Retained Earning
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(126,066)	205,271	15,170	5,963	100,338	--	(1,223,843)	(1,223,843)	(1,123,505)	Total Comprehensive Income for the Year
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018	113,758	3,589,771	(373,458)	333,932	16,295	9,086	(14,145)	22,900	(742,379)	(719,479)	2,969,905	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		1,892,016	2,225,161	Cash Received from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya		(137,503)	(63,592)	Payment to Suppliers and Others
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan		(112,414)	(98,680)	Payments for Management and Employees
Penerimaan Bunga		7,984	20,057	Interest Received
Penerimaan Restitusi Pajak		19,634	62,111	Receipts from Tax Refund
Pembayaran Pajak Penghasilan		(32,665)	(60,384)	Cash Paid For Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>1,637,052</u>	<u>2,084,673</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Aset Tetap	9			Property and Equipment
Pengadaan		(161,295)	(315,596)	Procurement
Pembayaran Sewa Lahan		(210,370)	(395,687)	Payments For Ground Lease
Uang Muka Konstruksi		(3,159)	(1,710)	Advances for Construction
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(374,824)</u>	<u>(712,993)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Transaksi Utang Sindikasi	15			Syndicated Loan Transactions
Penerimaan		3,979,763	--	Proceeds
Pembayaran		(508,290)	(406,576)	Payments
Pembayaran Utang Obligasi	16	(4,123,500)	--	Payment Bond Obligation
Pembayaran Beban Keuangan		(733,256)	(869,813)	Payment of Financial Charges
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(1,385,283)</u>	<u>(1,276,389)</u>	Net Cash Flows Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(123,055)	95,291	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK		(10,049)	(138)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ON CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		<u>280,149</u>	<u>184,996</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	3	<u><u>147,045</u></u>	<u><u>280,149</u></u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 34.

Information of non-cash transaction is presented in Note 34.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007 Tambahan No. 9241/2007. Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 11 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, Emiten, Perusahaan Publik dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0941293 tanggal 15 Juni 2015. Perubahan anggaran dasar terakhir, berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 13 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan Perseroan. Pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0048628 tanggal 16 Mei 2016.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008. Saat ini, kegiatan usaha Perusahaan adalah pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Kharisma Indah Ekaprima. Entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Deltamas Abadi Makmur.

1.a. The Company's Establishment

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (hereinafter called the "Company") was established based on Notarial Deed No. 5 dated July 25, 2006 made in presence of Ridjqi Nurdiani, S.H., Notary in Bekasi. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007. Based on Notarial Deed No. 9 dated June 11, 2015 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, concerning as the amendment of Company's Articles of Association to conform with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners, Listed Company, Public Company and POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Conducting of General Meetings Shareholders of Public Company. The amendment notice has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No. AHU-AH.01.03-0941293 dated June 15, 2015. The latest amended articles of association, based on Notarial Deed No. 8 dated May 13, 2016 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, regarding the addition of paid in capital. The amendment notice has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No. AHU-AH.01.03-0048628 dated May 16, 2016.

In accordance with the Company's Articles of Association, the main business activities of the Company are operating and renting of Base Transceiver Station (BTS) tower building or telecommunications towers and other related telecommunication infrastructure. The Company started its commercial activities in March 2008. Currently, the Company's business activities are operating and renting of towers and supporting equipment or telecommunications towers and other telecommunication infrastructures directly or through subsidiaries.

Parent entity of the Company is PT Kharisma Indah Ekaprima. Ultimate parent entity of the Company is PT Deltamas Abadi Makmur.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

The Company is domiciled in Jakarta with office address at Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, South Jakarta, Indonesia.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on deed No. 21 dated May 23, 2017 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, the composition of the Company Boards of Commissioners and Directors of as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Jonathan Yuwono **)
Wakil Komisaris Utama	Ludwig Indrawan
Komisaris	Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen	Erry Firmansyah

Boards of Commissioners

President Commissioner
Vice President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama	Nobel Tanihaha
Direktur	Juliawati Gunawan *)
Direktur Independen	Tommy Gustavi Utomo

Directors

President Director
Director
Independent Director

*) Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

*) Serves as the Corporate Secretary

**) Mengajukan surat pengunduran diri berdasarkan surat tertanggal 1 Maret 2019

**) Submitted a letter of resignation based on a letter dated March 1, 2019

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Based on Boards of Commissioners Decision, the composition of Audit Committee as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Komite Audit

Ketua	Muhamad Senang Sembiring
Anggota	Sujoko Martin
Anggota	Anwar Muljadi Arif

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") masing-masing sebanyak 355 dan 332 orang.

As of December 31, 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries ("Group") has 355 and 332 person, respectively.

1.c. Penawaran Umum Saham Perusahaan Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 29 September 2011, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp3.400 (Rupiah penuh) per saham.

1.c. The Company's Public Offering of Shares Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company received the effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 to offer 100,000,000 shares to the public with par value amounted to Rp100 (full Rupiah) per share with initial offering price amounted to Rp3,400 (full Rupiah) per share.

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp320.524, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp9.476 (Catatan 19).

The excess amount received from the issuance of share over its par value amounting to Rp320,524 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp9,476 (Note 19).

Penawaran Umum Terbatas I

Pada tanggal 8 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan Rupiah nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp4.800 (Rupiah penuh) per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (Rupiah penuh) waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 (Rupiah penuh) dengan masa berlaku pelaksanaan tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company received the effective statement from the Chairman of Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 related to Limited Public Offering I in order to issue Pre-emptive Rights (HMETD) amounting to 135,000,000 shares with par value of Rp100 (full Rupiah) per share with offering price of Rp4,800 (full Rupiah) per share and maximum 59,400,000 (full Rupiah) warrants. The exercise price of warrant amounted to Rp4,800 (full Rupiah) with exercise period from March 6, 2013 to August 28, 2015.

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp630.595, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp3.905 (Catatan 19).

The excess amount received from the issuance of share over its par value amounting to Rp630,595 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp3,905 (Note 19).

Waran mengalami penyesuaian dengan adanya Penawaran Umum Terbatas II menjadi 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.367 (Rupiah penuh).

Warrant has been adjusted in connection to Limited Public Offering II to be 59,415,534 warrants with exercise price of Rp3,367 (full Rupiah).

Sampai dengan berakhirnya masa berlaku pelaksanaan, jumlah waran yang dilaksanakan adalah 59.414.674 waran. Selisih lebih jumlah yang diterima dari waran yang dilaksanakan adalah sebesar Rp279.176 dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 19).

Up to end of the exercise period, the number of warrants exercised are 59,414,674 warrants, the excess amount received from warrants exercised amounted to Rp279,176 is recorded in "Additional Paid-In Capital" account (Note 19).

Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau *telecommunication sites* dan modal kerja.

The use of proceeds resulting from above public offering are relating to acquisition, construction of towers and/or telecommunication sites and working capital.

Penawaran Umum Terbatas II

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan No.S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD)

Limited Public Offering II

On December 19, 2014, the Company received the effective statement from Financial Services Authority No.S-550/D.04/2014 related to Limited Public Offering II in order to issue Pre-emptive Rights (HMETD) amounted to 343,165,024 ordinary shares with par value amounted to

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp7.000 (Rupiah penuh) per saham.

Periode pelaksanaan PUT II dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 16 Januari 2015.

Selisih lebih jumlah dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp2.359.200, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp8.639 (Catatan 19).

Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas setelah dikurangi antara pinjaman pemegang saham Perusahaan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyeteroran modal, untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Seluruh saham dan waran diatas tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rp100 (full Rupiah) per share and an offering price amounted to Rp7,000 (full Rupiah) per share.

The period of PUT II held on January 9 until January 16, 2015.

The excess amount from the issuance of share over its par value amounted to Rp2,359,200 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp8,639 (Note 19).

The use of proceeds resulting from above public offering after net-off between the Company's shareholder loan to PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) with KIE's liability to pay the shares subscribed are relating to payment of a portion of loan facility and for working capital.

All shares and warrants above are listed in Indonesia Stock Exchange (BEI).

1.d. Entitas-entitas Anak

Kepemilikan saham Perusahaan pada entitas anak yang dikonsolidasi, baik secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

1.d. Subsidiaries

The Company's ownerships, directly and indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas-entitas Anak/Subsidiaries	Bidang Usaha/ Activity	Domisili/ Domicile	Tanggal Pendirian/ Establishment Date	Dimulainya Kegiatan Operasi/ Commencement of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
						2018	2017
PT Sarana Inti Persada	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS/ Operating and leasing of BTS tower	Bandung	12 Okt/Oct 12, 2004	2005	100%	239,635	239,565
PT Platinum Teknologi	Perdagangan/ Trading	Jakarta	13 Sept/Sep 13, 2011	--	100%	801,459	1,185,577
PT Gema Dwimitra Persada	Perdagangan/ Trading	Jakarta	25 Sept/Sep 25, 2008	--	100%	793,854	1,163,851
PT BIT Teknologi Nusantara	Penyewaan menara dan jasa jaringan/ Tower leasing and network services	Jakarta	9 Agus/Aug 9, 2004	2009	100%	1,189,660	1,163,838
PT Broadband Wahana Asia	Investasi/ Investment Holding	Jakarta	14 Mar/Mar 14, 2011	--	100%	7,514	15,850
PT Rekajasa Akses	Penyewaan jasa jaringan/ Network services	Jakarta	7 Agus/Aug 7, 2000	2010	75%	15,773	15,835
Pratama Agung Pte. Ltd.	Investasi/ Investment Holding	Singapura/Singapore	14 Mar/Mar 14, 2013	2015	100%	32,621	4,205,360
Kharisma Agung Pte. Ltd	Perdagangan/ Trading	Singapura/Singapore	4 Nov/Nov 4, 2014	2015	100%	--	4,122,423

Perusahaan membeli 99,87% saham PT Sarana Inti Persada (SIP) dan 99,99% saham PT Platinum Teknologi (PT) masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011 dan 16 Februari 2012. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 dan 16 Februari 2012 laporan keuangan SIP dan PT dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan. PT memiliki PT Gema Dwimitra Persada dan PT BIT Teknologi Nusantara secara langsung dan tidak langsung.

The Company acquired 99.87% shares of PT Sarana Inti Persada (SIP) and 99.99% shares of PT Platinum Teknologi (PT) on December 27, 2011 and February 16, 2012, respectively. In connection with the acquisition, starting December 27, 2011 and February 16, 2012, the financial statements of SIP and PT are consolidated in the Company's financial statements. PT has ownership in PT Gema Dwimitra Persada and PT BIT Teknologi Nusantara directly and indirectly.

Pada tahun 2013 entitas anak membeli seluruh saham kepentingan nonpengendali atas SIP dan PT di atas.

In 2013, the subsidiaries purchased all the non-controlling shares of SIP and PT above.

Perusahaan dan PT membeli 100% saham PT Broadband Wahana Asia (BWA) pada tanggal 24 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 laporan keuangan BWA dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan.

The Company and PT acquired 100% shares of PT Broadband Wahana Asia (BWA) on June 24, 2016 which become effective on January 1, 2016. As a result of the acquisition, starting January 1, 2016, the financial statement of BWA is consolidated in to the Company's financial statements.

BWA memiliki 75% saham PT Rekajasa Akses. Berdasarkan perjanjian antara pemegang saham, disepakati untuk melakukan pengalihan hak dan kepentingan meliputi diantaranya hak untuk mencatat dalam pembukuan bahwa BWA memiliki 100% kepentingan atas seluruh kekayaan dan pendapatan PT Rekajasa Akses untuk periode 5 (lima) tahun pertama sejak pengalihan.

BWA has 75% ownership in PT Rekajasa Akses. Based on agreement between the shareholders, it is agreed to transfer rights and interest including the rights of BWA to record and consolidate 100% of all PT Rekajasa Akses assets and revenue for the period of 5 (five) years since the date of acquisition).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidance for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been

dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

- PSAK 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif"
- PSAK 69: "Agrikultur"
- PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- PSAK 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham".
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and elements included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2018, are as follows:

- PSAK 16 (Amendment 2015): "Property, Plant and Equipment regarding Agriculture: Bearer Plants"
- PSAK 69: "Agriculture"
- PSAK 2 (Amendment 2016): "Statements of Cash Flows regarding Disclosure Initiative"
- PSAK 46 (Amendment 2016): "Income Tax regarding Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss"
- PSAK 13 (Amendment 2017): "Investment Property regarding Transfer of Investment Property"
- PSAK 53 (Amendment 2017): "Share-based Payment regarding Classification and Measurement of Share-based Payment Transaction"
- PSAK 15 (Improvement 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures"
- PSAK 67 (Improvement 2017): "Disclosure of Interests in Other Entities".
- PSAK 111: "Wa'd Accounting"

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

Namun, penerapan PSAK 2 (Amandemen 2016) mengharuskan Grup untuk menyediakan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (Catatan 34.b).

However, the implementation of PSAK 2 (Amendment 2016) requires the Group to provide disclosures to users of the financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities (Note 34.b).

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and controlled entities as described in Note 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. where the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control over the acquired business, until such control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entity are eliminated in full on consolidation.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the Parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2.e. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount of which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent.

If the Group loses control over the subsidiary, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is ceases;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when the control is ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the cessation of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when the control is ceased;*
- (e) Reclassify to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other SAKs, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent*

2.e. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognize a financial assets or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a

keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual segera dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, its fair value is added or deducted with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified as fair value through profit or loss are immediately expensed.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on its classification on initial recognition. The Group classifies financial assets into one of the following four categories:

(i) **Financial Assets At Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as fair value through profit or loss. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing within near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) **Loans and Receivables**
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those that are determined to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as fair value through profit or loss;

- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iv) Available-for-Sale Financial Assets (AFS)
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition are designated as fair value through profit or loss. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers

pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa

substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligation occurred or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.

The Group derecognizes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) *A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) *It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial*

depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of

bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara

the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all commission and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification near to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off

hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Lindung Nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif swap dan opsi atas kurs dan tingkat bunga untuk lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas pada risiko perubahan selisih kurs dan tingkat bunga mengambang.

the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different level in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the entire fair value measurement:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between level of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period which the change occurred.

Hedging

The Group uses derivative financial instruments of cross currency and interest rate swap and option to hedge the exposure of variability in cash flows that is attributable to fluctuation of exchange rate and floating interest rate risks.

Dalam bisnis normal Grup terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan keuangan tertulis dari manajemen, Perusahaan menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Grup menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektifitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

Lindung Nilai Atas Arus Kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

The normal course of the Group's business exposes it to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company uses derivatives and other hedging instruments. PSAK 55 allows 3 types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

The Group uses hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Cash Flow Hedge

The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognised (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Grup mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Derivatif

Seluruh derivatif awalnya diakui dan selanjutnya dinyatakan pada nilai wajar. Kebijakan Grup menggunakan derivatif hanya untuk tujuan lindung nilai. Akuntansi untuk derivatif dalam hubungan lindung nilai diuraikan dalam bagian di atas.

Jika, Grup melibatkan derivatif untuk melindungi nilai beberapa transaksi tetapi kriteria lindung nilai yang ketat sesuai PSAK 55 tidak dipenuhi. Dalam hal ini, meskipun transaksi memiliki alasan ekonomi dan bisnis, akuntansi lindung nilai tidak dapat diterapkan. Akibatnya, perubahan dalam nilai wajar derivatif tersebut diakui dalam laba rugi dan akuntansi untuk item yang dilindung nilai mengikuti kebijakan Grup untuk item tersebut.

Derivatif Melekat

Derivatif melekat dalam kontrak utama nonderivatif diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik dan risiko dari kontrak utama dan kontrak utama tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2.f. Kas dan Bank

Kas dan Bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro), yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode biaya masuk pertama keluar pertama. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Group reclassifies the associated gains and losses that were recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

Derivatives

All derivatives are initially recognized and subsequently carried at fair value. The Group policy is to use derivatives only for hedging purposes. Accounting for derivatives engaged in hedging relationship is described in the above section.

If, the Group enters into certain derivatives in order to hedge some transactions but the strictly hedging criteria prescribed by PSAK 55 are not met, even though the transaction has its economic and business rationale, hedge accounting cannot be applied. As a result, changes in the fair value of those derivatives are recognized in profit or loss and accounting for the hedged item follows the Group's policies for that item.

Embedded Derivatives

Embedded derivatives in non-derivative host contracts are treated as separate derivatives when their risks and economic characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value to profit or loss.

2.f. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are cash on hand and cash in banks (demand deposits) that are not used as collateral or are not restricted in use.

2.g. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the first in first out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of

kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period of the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in against cost of inventories recognized in the period in which the reversal occurs.

2.h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dan dikelompokkan sebagai aset lancar dan tidak lancar, mana yang lebih tepat.

2.h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the period benefited, and are classified as current or non-current assets, whichever is more appropriate.

2.i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

2.i. Property and Equipment

Property and Equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Aset tetap, kecuali menara dan sarana penunjang, dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset.

Property and equipment, except Property and Supporting Equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and accumulated of asset impairment value.

Setelah pengakuan awal, menara dan sarana penunjang dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

After initial recognition towers and supporting equipment are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut.

When an item of fixed assets is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Surplus revaluasi aset tetap yang dipindahkan secara berkala setiap periode ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with the following policy.

If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.

If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognised in profit or loss. However, the decrease is recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluations are performed with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

A periodic transfer from the asset revaluation surplus of fixed asset to retained earnings is made for the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the assets and depreciation based on the original cost of the assets. Upon disposal, any revaluation surplus relating to the particular asset being sold is transferred to retained earnings.

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

Tahun/Years		
Menara dan Sarana Penunjang	30	Towers and Supporting Equipment
Bangunan	20	Buildings
Menara Bergerak	8	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	4 – 20	Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	4 – 8	Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	4	Vehicles
Antena Indoor	8	Indoor Antenna

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir tahun buku, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2.j. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir tahun, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed every year ended, and adjusted prospectively, if appropriate.

Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset) is credited or charged to operations in the asset is derecognized. At the end of each financial period, the Group reviews useful life, residual values, methods of depreciation, and the remaining useful life based on technical condition.

Assets in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipments account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

2.j. Impairment of Assets

In the end of the year, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Penurunan Nilai *Goodwill*

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh *goodwill* merepresentasikan level terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi.

2.k. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup,

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

Impairment of *Goodwill*

Irrespective of whether there is any indication of impairment, goodwill is tested for impairment annually.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each cash-generating unit, or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree were assigned to those units or groups of units. Each unit or group of units to which the goodwill is so allocated represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes and is not larger than an operating segment.

2.k. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities recognized

liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut

by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK's.

Component of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary

kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

2.I. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas dari pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.I. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- (b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - (i) *The entity and the reporting entity are members of the same business group (i.e. parent entity, subsidiary and the fellow subsidiary is related to the others);*

- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.m. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group of which the other entity is members);

- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;

- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employee benefit of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or

- (vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

- (viii) The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.m. Employees Benefits

Short-term Employment Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during the accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include as among wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance pay and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- (b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.n. Revenue and Expenses Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang muka sewa yang diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan Ditangguhkan" dan diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya. Pendapatan sewa properti investasi yang belum ditagih disajikan sebagai piutang yang belum difakturkan dan dicatat di akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

2.o. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Rental income from operating lease of is recognized as revenue when earned. The rental received in advance are presented as "Deferred Income" and recognized as income on straight-line basis over the lease term. Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as accrued income and recorded in Accrued Income.

Expenses are recognized as incurred on accrual basis.

2.o. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group are offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*

- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
- entitas kena pajak yang sama; atau
 - entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

- b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

- the same taxable entity; or
- different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- has legally enforceable rights to offset the recognized amounts; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.p. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Group receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- i. Tanggal SKPP
- ii. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP
- iii. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

2.q. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2.r. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional Pratama Agung Pte. Ltd. (PA) dan Kharisma Agung Pte. Ltd. (KA), keduanya entitas anak adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas PA dan KA pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam akun "Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing".

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Group has disclosed the following in its financial statements:

- i. The date of SKPP*
- ii. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP*
- iii. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

2.q. Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity with the weighted average ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the impact of all dilutive potential ordinary shares.

2.r. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and most of the subsidiaries is Rupiah.

The functional currency of Pratama Agung Pte. Ltd. (PA) and Kharisma Agung Pte. Ltd. (KA), both subsidiaries, is United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of PA and KA at reporting date are translated at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using transaction rate for the period. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income in "Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency" account.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e.

Bank Indonesia pada 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu masing-masing sebesar Rp14.481 (Rupiah Penuh) per 1 USD, Rp10.602 (Rupiah Penuh) per 1 SGD dan Rp13.548 (Rupiah penuh) per 1 USD, Rp10.134 (Rupiah penuh) per 1 SGD.

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2018 and 2017 is Rp14,481 (full Rupiah) per 1 USD, Rp10,602 (full Rupiah) per 1 SGD and Rp13,548 (full Rupiah) per 1 USD, Rp10,134 (full Rupiah) per 1 SGD, respectively.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.s. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lain sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya selama 5-11 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika, dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud merupakan perbedaan antara nilai neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan.

Goodwill

Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah

2.s. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either definite or indefinite.

Intangible Asset with Definite Useful Life

Intangible asset with definite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Amortization is calculated so as to write-off the cost of the asset less its estimated residual value, over its useful economic life of 5-11 years.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset derecognised if, disposed or when there was no longer economic benefits future expected from its use or disposal.

Gain or loss arises from derecognition of intangible asset is the difference between the value of net disposed (if any) and the number of registered assets. Gain or losses recognized in profit or loss when the asset was retired. Gain is not recognized as revenue.

Goodwill

Goodwill arising in a business combination is initially measured at its cost, being the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in

setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. *Goodwill* tidak diamortisasi.

2.t. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.u. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Lessee

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset

the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is not amortised.

2.t. Operating Segments

Group presented operating segments based on the financial information used by the operational decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by operational decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.u. Leases

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Group as Lessee

At the commencement of the lease term, Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at

sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Lessor

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.v. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the property and equipment that are owned.

Under an operating lease, the Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as Lessors

The Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment in the finance lease as lessor.

The Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.v. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting
Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar Aset Tetap

Nilai wajar aset tetap bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Penurunan Nilai Goodwill

Dalam melakukan estimasi penurunan nilai *goodwill*, manajemen Grup melakukan analisis dan *assessment* atas kemampuan unit penghasil kas, kondisi perubahan operasi entitas akuisisian dan pengalihan unit penghasil *goodwill*. Bila terdapat indikasi penurunan kemampuan unit penghasil kas dalam menghasilkan kas dan manajemen berkeyakinan bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan kemampuan dalam

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions
Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Fair Value of Property and Equipment

The Group's fair value of property and equipment depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believe that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property. Further details are disclosed in Note 9.

Impairment of Goodwill

In estimating the impairment of goodwill, the Group's management performs analysis and assessment of the ability of the cash generating unit, the change of the operating conditions of acquired entity and transfer of goodwill generating unit. If there are indications of a decrease in the ability of the cash generating unit in generating cash and management believes that the cash generating unit decrease the ability to

menghasilkan kas, maka manajemen akan melakukan *impairment* atas *goodwill*. Bila terjadi perubahan operasional unit bisnis dan/atau unit penghasil kas telah dialihkan, maka seluruh nilai *goodwill* yang dicatat sebelumnya akan diturunkan nilainya.

generate cash, then the management will do the impairment of goodwill. If there is a change in the operational business units and/ or cash-generating unit has been transferred, the entire value of goodwill previously recorded will be impaired.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Catatan 2.i). Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 9.

Estimated Useful Life of Property and Equipment

The Group reviews periodically the estimated useful life of property and equipment based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates due to changes in the mentioned factors above (Note 2.i). Carrying value of property and equipment is disclosed in Note 9.

Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Post-Employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir tahun pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir tahun pelaporan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

The Group determines the appropriate discount rate at end of reporting year by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle this obligation. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that has a similar year to the corresponding year of obligation. Other key assumption is partly determined by current market conditions, during the year in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits assumption will impact on recognition of actuarial gains or losses at the end of the year. Further details are disclosed in Note 17.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Grup mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 4 dan 11.

Sehubungan dengan provisi spesifik, Perusahaan memiliki tagihan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Internux (INUX) yang telah direstrukturisasi (Catatan 11), karena menurut evaluasi manajemen terdapat ketidakpastian dalam penyelesaiannya, sehingga seluruh piutang Grup dari BTEL dan INUX telah dicatat cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar nilai tercatat piutang kepada BTEL dan INUX.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Allowance for Impairment Loss

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expected to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment loss of accounts receivable. Further details are disclosed in Notes 4 and 11.

In relation to specific provision, the Company has receivables from PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) and PT Internux (INUX) which were restructured (Note 11), due to based on the management's assesment that the uncertainty of the receivables repayment, all the Group's receivables from BTEL and INUX has been provided by provision for impairment loss at the carrying value of BTEL and INUX's receivables.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, Management's judgment is required to determine fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rate, accelerated repayment rate, and default rate assumptions.

Estimasi Pajak Tangguhan

Pengakuan aset pajak tangguhan dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada tahun mendatang, di mana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi laba kena pajak di masa datang dan perencanaan strategis perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks di mana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat (Catatan 26.d).

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.e.

Deferred Tax Estimation

Deferred tax assets recognition is performed only if it is probable that the asset will be recovered in the form of economic benefits to be received in future years, in which the temporary differences and tax losses can still be used. Management also considers the future estimated taxable income and strategic tax planning in order to evaluate its deferred tax assets in accordance with applicable tax laws and its updates. As a result, related to its inherent nature, it is likely that the calculation of deferred taxes is related to a complex pattern where assessment requires a judgment and is not expected to provide an accurate calculation (Note 26.d).

ii. Critical judgments in applying the accounting policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.e.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kas dan Bank

3. Cash on Hand and in Banks

	2018 Rp	2017 Rp	
Kas	272	149	Cash on Hand
Bank - Pihak Ketiga			Cash in Banks - Third Parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	62,293	93,692	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia	20,895	31,215	Standard Chartered Bank Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,003	23,020	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	705	21,706	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Citibank N.A., Indonesia	515	22,960	Citibank N.A., Indonesia
PT Bank Resona Perdania	--	9,313	PT Bank Resona Perdania
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	874	698	Others (below Rp1,000 each)
Subjumlah	87,285	202,604	Subtotal
<u>US Dolar</u>			<u>US Dollar</u>
Standard Chartered Bank Indonesia			Standard Chartered Bank Indonesia
(2018: USD3,528,111; 2017: USD5,589,319)	51,091	75,724	(2018: USD3,528,111; 2017: USD5,589,319)
PT Bank BNP Paribas Indonesia			PT Bank BNP Paribas Indonesia
(2018: USD559,630; 2017: USD90,000)	8,104	1,219	(2018: USD559,630; 2017: USD90,000)
Lain-lain (2018: USD20,220; 2017: USD29,739)			Lain-lain (2018: USD20,220; 2017: USD29,739)
(masing-masing dibawah USD15,000)	293	403	(below USD15,000 each)
Subjumlah	59,488	77,346	Subtotal
<u>SG Dolar</u>			<u>SG Dollar</u>
PT Standard Chartered Bank Indonesia			PT Standard Chartered Bank Indonesia
(2017: SGD4,906)	--	50	(2017: SGD4,906)
Jumlah Bank	146,773	280,000	Total Cash in Banks
Jumlah Kas dan Bank	147,045	280,149	Total Cash on Hand and in Banks

4. Piutang Usaha - Pihak Ketiga

4. Trade Receivables - Third Parties

	2018 Rp	2017 Rp	
PT XL Axiata Tbk	644,753	490,809	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	226,539	--	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular	106,107	19,929	PT Telekomunikasi Selular
PT First Media Tbk	27,155	16,429	PT First Media Tbk
PT Internux	--	213,345	PT Internux
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	30,330	14,436	Others (below Rp10,000 each)
Jumlah	1,034,884	754,948	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(29,495)	--	Less: Allowance for Impairment Loss
Jumlah Piutang Usaha - Pihak Ketiga	1,005,389	754,948	Total Trade Receivables - Third Parties

Perubahan cadangan kerugian nilai adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment loss is as follows:

	2018 Rp	
Saldo Awal Tahun	--	Beginning Balance
Penambahan	29,495	Addition
Reklasifikasi	--	Reclassification
Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	29,495	Total Allowance for Impairment Loss

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang PT Internux direklasifikasi secara prospektif ke aset keuangan tidak lancar lainnya sehubungan dengan Rencana Perdamaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Catatan 11).

As of December 31, 2018, PT Internux's receivables has reclassified as prospective to other non-current financial assets relating to the composition plan request of Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) (Note 11).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan penelaahan manajemen atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 29.

Piutang usaha dijamin atas utang bank sindikasi jangka panjang (Catatan 15.b).

Based on the management's review of the individually trade receivable balance at the end of reporting period, management believes that the allowance for impairment loss is sufficient to cover the possible loss that might arise from uncollected trade receivables.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

Analysis of trade receivables by maturity is presented in Note 29.

Trade receivables used as collateral for long-term syndicated bank loans (Note 15.b).

5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

5. Accrued Income

Berikut merupakan rincian pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan pelanggan:

The detail of accrued income by customer is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Ketiga		
PT XL Axiata Tbk	119,051	75,785
PT Telekomunikasi Selular	111,162	161,315
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	17,721	16,797
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	247,934	253,897

Third Parties
PT XL Axiata Tbk
PT Telekomunikasi Selular
Others (below Rp10,000 each)
Total Accrued Income

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan lainnya yang belum ditagih karena kelengkapan dokumen penagihan sedang dalam proses verifikasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Accrued income represents unbilled rental income of telecommunication towers and others due to the completeness of billing documents were in the verification process as of December 31, 2018 and 2017.

6. Piutang Lain-lain

6. Other Receivables

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 28)		
PT Sekawan Abadi Prima	18	28
Pihak ketiga		
Lain-lain	26,317	28,263
Jumlah Piutang Lain-lain	26,335	28,291

Related Party (Note 28)
PT Sekawan Abadi Prima

Third Parties
Others
Total Other Receivables

7. Persediaan

7. Inventory

Akun ini terdiri dari persediaan atas material konstruksi menara dan sarana penunjang, peralatan telekomunikasi dan suku cadang.

Persediaan Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Asuransi FPG Indonesia, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan Rp33.700 dan Rp40.140 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

This account consists of the supply of tower construction materials and supporting equipment, telecommunication equipments and spare parts.

Inventory of the Group has been insured against fire, earthquake, thieves, damages and other risks to PT Asuransi FPG Indonesia, third party, with a sum insured amounted to Rp33,700 and Rp40,140 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

8. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

8. Advances and Prepaid Expenses

	2018 Rp	2017 Rp	
Sewa Lahan	886,952	927,872	Land Lease
Uang Muka Operasional	62,324	68,322	Operational Advances
Sewa Jaringan Serat Optik (Catatan 31.a.2)	61,998	--	Fiber Optic Lease (Note 31.a.2)
Perizinan dan Lain-lain	92,372	34,989	Permits and Others
Jumlah	1,103,646	1,031,183	Total
Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang			Prepaid Expenses - Non-Current Portion
Sewa Lahan	723,378	766,094	Ground Lease
Sewa Jaringan Serat Optik (Catatan 31.a.2)	54,998	--	Fiber Optic Lease (Note 31.a.2)
Perizinan dan Lain-lain	68,828	19,768	Permits and Others
Jumlah Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang	847,204	785,862	Total Prepaid Expenses - Non-Current Portion
Jumlah - Bagian Jangka Pendek	256,442	245,321	Total - Current Portion

Grup memiliki perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga yang antara lain berlokasi di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

The Group entered ground lease agreements with third parties which among others, located in Java, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi and Papua.

Perizinan dan lain-lain terutama merupakan biaya perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diamortisasi sesuai masa berlakunya.

Permits and others is mainly represented Building Permits (IMB) acquisition costs which amortized over the IMB validity period.

9. Aset Tetap

9. Property and Equipment

2018							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Model Revaluasi							Revaluation Model
Menara dan Sarana Penunjang	8,861,984	80,848	(402,049)	5,284	(993,652)	205,271	7,757,686 Towers and Supporting Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Menara dan Sarana Penunjang	—	79,223	(4,826)	—	(74,397)	—	— Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	8,861,984	1,625	(397,223)	5,284	(919,255)	205,271	7,757,686 Subtotal
Model Biaya							Cost Model
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	10,969	—	—	—	—	—	10,969 Building
Menara Bergerak	24,478	69	—	(1,690)	—	—	22,857 Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	646,627	54,070	—	40,572	—	—	741,269 Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot	—	—	—	—	—	—	— Office Equipment and Furnitures
Kantor	51,746	1,967	(77)	—	—	—	53,636
Kendaraan	2,731	292	(78)	—	—	—	2,945 Vehicles
Antena Indoor	32,291	236	—	138	—	—	32,665 Indoor Antenna
Subjumlah	768,842	56,634	(155)	39,020	—	—	864,341 Subtotal
Aset Dalam Penyelesaian							Construction in Progress
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	45,642	2,255	—	(40,213)	—	—	7,684 Fiber Optic Networks and Infrastructure
Menara dan Sarana Penunjang	1,385	8,444	—	(28)	—	—	9,801 Towers and Support Equipment
Subjumlah	47,027	10,699	—	(40,241)	—	—	17,485 Subtotal
Jumlah	9,677,853	68,958	(397,378)	4,063	(919,255)	205,271	8,639,512 Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	2,884	548	—	—	—	—	3,432 Building
Menara Bergerak	7,811	2,929	—	(695)	—	—	10,045 Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	209,813	64,472	—	—	—	—	274,285 Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot	—	—	—	—	—	—	— Office Equipment and Furnitures
Kantor	38,646	6,277	(29)	—	—	—	44,894
Kendaraan	2,105	197	(75)	—	—	—	2,227 Vehicles
Antena Indoor	12,225	4,060	—	—	—	—	16,285 Indoor Antenna
Jumlah	273,484	78,483	(104)	(695)	—	—	351,168 Total
Nilai Tercatat	9,404,369						8,288,344 Carrying Value

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2017							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Model Revaluasi								Revaluation Model
Menara dan Sarana Penunjang	9,664,702	185,484	(59,570)	27,486	(956,119)	–	8,861,984	Towers and Supporting Equipment
Akumulasi Penyusutan								Accumulated Depreciation
Menara dan Sarana Penunjang	–	354,111	(1,819)	–	(331,149)	(21,144)	–	Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	9,664,702	(168,627)	(57,751)	27,486	(624,970)	21,144	8,861,984	Subtotal
Model Biaya								Cost Model
Biaya Perolehan								Acquisition Cost
Pemilikan Langsung								Direct Ownership
Bangunan	10,969	–	–	–	–	–	10,969	Building
Menara Bergerak	34,173	1,680	–	(11,375)	–	–	24,478	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	603,202	36,841	–	6,584	–	–	646,627	Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot	46,700	5,451	(405)	–	–	–	51,746	Office Equipment and Furniture
Kendaraan	2,648	160	(77)	–	–	–	2,731	Vehicles
Antena Indoor	30,472	1,819	–	–	–	–	32,291	Indoor Antenna
Subjumlah	728,164	45,950	(482)	(4,791)	–	–	768,842	Subtotal
Aset Dalam Penyelesaian								Construction in Progress
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	27,190	28,739	–	(10,287)	–	–	45,642	Fiber Optic Networks and Infrastructure
Menara dan Sarana Penunjang	3,270	400	–	(2,285)	–	–	1,385	Towers and Support Equipment
Subjumlah	30,460	29,139	–	(12,572)	–	–	47,027	Subtotal
Jumlah	10,423,326	(93,538)	(58,233)	10,123	(624,970)	21,144	9,677,853	Total
Akumulasi Penyusutan								Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung								Direct Ownership
Bangunan	2,336	548	–	–	–	–	2,884	Building
Menara Bergerak	6,961	4,027	–	(3,177)	–	–	7,811	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	154,553	55,260	–	–	–	–	209,813	Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot	31,026	8,025	(405)	–	–	–	38,646	Office Equipment and Furniture
Kendaraan	1,940	201	(36)	–	–	–	2,105	Vehicles
Antena Indoor	8,268	3,957	–	–	–	–	12,225	Indoor Antenna
Jumlah	205,084	72,019	(441)	(3,177)	–	–	273,484	Total
Nilai Tercatat	10,218,242						9,404,369	Carrying Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 dicatat pada beban pokok pendapatan dan beban usaha (Catatan 22 dan 23).

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp83.635 dan Rp77.109.

Aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Asuransi FPG Indonesia dan PT Asuransi Asoka Mas, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.578.975 and Rp2.303.749 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Kerugian atas pelepasan aset tetap pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp397.274 dan Rp67.409. Pelepasan aset terutama merupakan pembongkaran menara dan sarana penunjang yang dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain – bersih (Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan terkait menara dan sarana penunjang serta jaringan serat optik dan infrastrukturnya dengan persentase tingkat penyelesaian terhadap nilai kontrak sebesar lebih dari 50% dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2019.

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017 are recorded to cost of revenues and operating expenses (Notes 22 and 23).

Acquisition cost of property and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp83,635 and Rp77,109, respectively.

Property and equipment of the Group has been insured against fire, thieves, damages and other risks to PT Asuransi FPG Indonesia and PT Asuransi Asoka Mas, all third parties, with sum insured amounted to Rp2,578,975 and Rp2,303,749 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Loss on disposal of property and equipment for 2018 and 2017 amounted to Rp397,274 and Rp67,409, respectively. Disposal mainly dismantling of towers and supporting equipment that recorded as part of other expense – net (Note 25).

As of December 31, 2018, construction in progress are related to tower and supporting equipment and also fiber optic network and infrastructure with percentage of completion to contract value of more than 50% and estimated to be completed in 2019.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai wajar menara dan sarana penunjang khusus untuk pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diestimasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan, penilai independen. Nilai wajar menara dan sarana penunjang dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas untuk pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dan nilai wajar tanah dengan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Penilaian estimasi nilai wajar menggunakan input selain harga kuotasi dari pasar aktif yang dapat diobservasi. Berikut ini asumsi-asumsi signifikan yang dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas menara dan sarana penunjang:

The fair value of tower and supporting equipment specialty for December 31, 2018 and 2017 are estimated based on appraisal conducted by KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan, independent appraiser. Fair value of the towers and supporting equipment was calculated using Discounted Cash Flows method on income approach and cost approach, and fair value of land calculated using Market Data Approach method. Estimated fair value using inputs other than quoted prices in active market that are observable. Significant assumptions used by the appraiser to determine the fair value of towers and supporting equipment are as follows:

	2018	2017	
Tingkat Diskonto (Per Tahun) dengan <i>Weighted Average Cost of Capital (WACC)</i>	11.35%	11.54%	Discount Rate (Per Annum) using <i>Weighted Average Cost of Capital (WACC)</i>
Tingkat Inflasi (Per Tahun)	3.51%	3.61%	Inflation Rate (Per Annum)
Umur Manfaat Menara dan Sarana Penunjang	30 Tahun/ Years	30 Tahun/ Years	Useful Life of Tower and Supporting Equipments

Menara dan sarana penunjang dijamin untuk utang bank sindikasi jangka panjang yang diperoleh (Catatan 15.b).

Towers and supporting equipment is pledged as security for long-term syndicated bank loans (Note 15.b).

Pada 2018 dan 2017, uang muka yang direklasifikasi ke aset tetap adalah sebesar Rp4.758 dan Rp12.805.

In 2018 and 2017, advances which have been reclassified into property and equipment amounted to Rp4,758 and Rp12,805, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan nilai aset tetap mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2018 and 2017, management believes that there are no indications of changes in condition that might cause an impairment of property and equipment.

10. Aset Takberwujud

10. Intangible Assets

	2018 Rp	2017 Rp	
Goodwill	89,029	89,029	Goodwill
Aset Takberwujud Lainnya	19,270	25,868	Other Intangible Assets
Jumlah Aset Takberwujud	108,299	114,897	Total Intangible Assets

Goodwill

Goodwill dan aset takberwujud lainnya berasal dari akuisisi entitas anak (Catatan 1.d).

Goodwill

Goodwill and other intangible assets occurred from acquisition of subsidiaries (Note 1.d).

	2018 Rp	2017 Rp	
Saldo Awal Tahun	89,029	89,029	Balance at Beginning of Year
Penambahan dari Akuisisi Entitas Anak	--	--	Addition from Acquisition of Subsidiaries
Saldo Akhir Tahun	89,029	89,029	Balance at End of Year

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Aset Takberwujud Lainnya

Other Intangible Assets

	2017 Rp	Penambahan/ Addition Rp	2018 Rp	
Biaya Perolehan	58,436	--	58,436	Cost
Akumulasi Amortisasi	(32,568)	(6,598)	(39,166)	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	25,868		19,270	Carrying Value

	2016 Rp	Penambahan/ Addition Rp	2017 Rp	
Biaya Perolehan	58,436	--	58,436	Cost
Akumulasi Amortisasi	(25,970)	(6,598)	(32,568)	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	32,466		25,868	Carrying Value

11. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

11. Other Non-Current Financial Assets

	2018 Rp	2017 Rp	
Piutang Usaha yang Direstrukturisasi			Restructured Trade Receivables
PT Internux (Catatan 31.a.2)	299,466	--	PT Internux (Note 31.a.2)
PT Bakrie Telecom Tbk (Catatan 31.a.1)	123,797	123,797	PT Bakrie Telecom Tbk (Note 31.a.1)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha yang Direstrukturisasi	(423,263)	(123,797)	Allowance for Impairment Loss of Restructured Trade Receivables
Subjumlah	--	--	Subtotal
Piutang Derivatif	348,909	262,917	Derivative Receivables
Lain-lain	3,457	2,915	Others
Subjumlah	352,366	265,832	Subtotal
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	352,366	265,832	Other Non-Current Financial Assets

Piutang Derivatif

Derivative Receivables

Pada bulan Maret 2018, Perusahaan melakukan restrukturisasi atas keseluruhan perjanjian lindung nilai dan juga menandatangani kontrak yang baru yang bertujuan untuk melakukan lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sehubungan dengan penarikan pinjaman bank sindikasi baru dalam rangka *refinancing* atas utang bank sindikasi dan pelunasan utang obligasi yang dilakukan pada bulan Maret 2018.

On March 2018, the Company has restructured all its hedging agreements and signed new agreement in order to hedge the payment of loan principal and loan interest of new syndicated bank loan and to refinance the previous syndicated bank loan and bonds repayment on March 2018.

Restrukturisasi dan perjanjian lindung nilai baru yang dilakukan di bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut:

The restructuring and new hedging agreement that have been done in March 2018 are as follow:

- Melakukan terminasi atas keseluruhan perjanjian tanggal 16 Februari 2015 untuk *swap* tingkat bunga dan selisih kurs dengan Standard Chartered Bank.
- Pada tanggal 29 Maret dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* tingkat bunga dengan Standard Chartered Bank, dengan nilai kontrak sebesar Rp225.000
- Termination of full contract of interest rate and foreign exchange swap contracts dated February 16, 2015 with Standard Chartered Bank.
- On March 29 and July 24, 2018, the Company signed new interest rate swap contract with Standard Chartered Bank, with contract amount at Rp225,000 and Rp150,000. This derivative

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

dan Rp150.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga JIBOR dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018 dan 22 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- Standard Chartered Bank adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.

- Melakukan penyelesaian ("settlement") atas perjanjian tanggal 23 Januari 2015 yang sebelumnya telah direstrukturisasi pada tanggal 22 September 2016 untuk swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank, N.A.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. dengan total nilai pertukaran sebesar USD276,210,000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dan tingkat bunga dari fasilitas pinjaman bank sindikasi USD (Catatan 15).

Ketentuan transaksi swap tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret 2018.
- Tanggal efektif adalah 22 dan 23 Maret 2020.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- JP Morgan Chase Bank, N.A. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

- Melakukan penyelesaian sebagian ("partial settlement") dari perjanjian tertanggal 23 Maret 2015 untuk swap selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. Nilai pertukaran setelah penyelesaian sebagian adalah USD7,796,250.
- Melakukan restrukturisasi atas perjanjian tanggal 26 Januari 2015 yang sebelumnya telah direstrukturisasi di tanggal 15 April 2015 untuk swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. Tidak ada perubahan terhadap nilai kontrak setelah restrukturisasi.

instrument is used to mitigate the risk of JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 15).

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is March 29, 2018 and July 24, 2018.*
- *Effective date is March 27, 2018 and September 22, 2018.*
- *Closing date is February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *Standard Chartered Bank is the payer of floating interest rate based on JIBOR.*

- *Settlement of interest rate and foreign exchange swap contract dated January 23, 2015 that previously restructured on September 22, 2016 with JP Morgan Chase Bank, N.A.*

- *On March 28, 2018, the Company has signed new contract on interest swap and options with JP Morgan Chase Bank N.A. amounted at USD276,210,000. This derivatives instrument is entered to mitigate the risk of foreign exchange and interest rate fluctuation related to the USD syndicated bank loan facilities (Note 15).*

The term of the swap transactions entered above are as follows:

- *Trading date March 28, 2018.*
- *Effective dates are March 22 and 23, 2020.*
- *Closing date is February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *JP Morgan Chase Bank, N.A is the payer of floating interest rate based on LIBOR.*

- *Partial settlement of foreign exchange swap dated March 23, 2015 with JP Morgan Chase Bank N.A. The foreign exchange contract value after this partial settlement become USD7,796,250.*

- *Restructured the interest rate and foreign exchange swap contracts dated January 26, 2015 which have been restructured on April 15, 2015 with JP Morgan Chase Bank, N.A. There is no changes on the contract value after restructuring.*

- Melakukan penyelesaian ("settlement") atas perjanjian tanggal 13 Februari 2015 yang terakhir kali direstrukturisasi pada tanggal 10 April 2015 untuk selisih kurs dan restrukturisasi untuk swap tingkat bunga dengan BNP Paribas.
- Melakukan restrukturisasi atas kontrak perjanjian tanggal 13 Februari 2015 untuk swap tingkat bunga dengan BNP Paribas. Tidak ada perubahan terhadap nilai kontrak setelah restrukturisasi.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan BNP Paribas dengan nilai pertukaran sebesar USD7,796,250. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dan tingkat bunga dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

Ketentuan transaksi swap tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 22 Maret 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- BNP Paribas adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.
- Pada tanggal 28 Maret, 29 Maret dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan MUFG Bank, Ltd. (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), dengan nilai kontrak sebesar USD5,197,500, Rp200.000 dan Rp609.750. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga LIBOR dan JIBOR dan selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret, 29 Maret dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 29 Maret 2018, 3 April 2018 dan 24 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 23 Maret 2020 dan 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- MUFG Bank Ltd. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR dan JIBOR.

- *Settled the foreign exchange swap contract dated February 13, 2015 which has been previously restructured on April 10, 2015 and restructured the interest swap contract with BNP Paribas.*
- *Restructured the interest swap contract dated February 13, 2015 with BNP Paribas. There is no changes on the contract value after restructuring.*
- *On March 28, 2018, the Company has signed interest rate swap and option agreement with BNP Paribas with the total contract amounted at USD7,796,250. This derivatives instrument is entered to mitigate the risk of foreign exchange and interest rate fluctuation related to the new syndicated bank loan (Note 15).*

The term of the swap transactions entered above are as follows:

- *Trading date is March 28, 2018.*
- *Effective date March 27, 2018.*
- *Closing date March 22, 2020.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *BNP Paribas is the payer of floating interest rate based on LIBOR.*
- *On March 28, March 29 and July 24, 2018 the Company signed an interest rate and foreign exchange swap agreement with MUFG Bank, Ltd. (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), with contracts value amounted to USD5,197,500, Rp200,000 and Rp609,750. This derivative instrument is used to mitigate the risk of LIBOR and JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 15).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading dates are March 28, March 29 and July 24, 2018.*
- *Effective dates are March 29, April 3 and September 24, 2018.*
- *Closing dates are March 23, 2020 and February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *MUFG Bank Ltd. is the payer of floating interest rate based on LIBOR and JIBOR.*

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

- Pada tanggal 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap tingkat bunga dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.100.000 dan Rp750.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga JIBOR dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018 dan 22 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.

Rincian instrumen derivatif pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian swap dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank, N.A., sebagaimana direstrukturisasi tanggal 10 April 2015, dan berbagai tanggal di bulan September 2016, dengan nilai kontrak sebesar USD361,353,125. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (Catatan 15 dan 16).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah berbagai tanggal di bulan Januari 2015.
- Tanggal efektif adalah 22 Desember 2014 dan 22 September 2016.
- Tanggal pengakhiran adalah 8 Desember 2019 dan 21 Februari 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- JP Morgan Chase Bank, N.A. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

- Pada tanggal 13 Februari 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian swap dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan BNP Paribas, sebagaimana direstrukturisasi tanggal 10 April 2015 dan 26 September 2016,

- On March 29, 2018 and July 24, 2018, the Company signed new interest rate swap contract with PT Bank CIMB Niaga Tbk, with contract amount at Rp1,100,000 Rp750,000. This derivative instrument is used to mitigate the risk of JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 15).

The terms of this hedging transaction are as follows:

- Trading date is March 29, 2018 and July 24, 2018..
- Effective date is March 27, 2018 and September 22, 2018.
- Closing date is February 27, 2023.
- The Company is the payer of fixed interest rate per annum.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk is the payer of floating interest rate based on JIBOR.

The detail of derivative instrument as of December 31, 2017 are as follows:

- On several dates in January 2015, the Company entered interest rate and foreign exchange swap and option agreement with JP Morgan Chase Bank, N.A., as restructured on April 10, 2015 and several dates in September 2016, with contracts value amounting to USD361,353,125. This derivative instrument is used to mitigate the risk of foreign exchange fluctuation of syndicated bank loan and bond payable (Notes 15 and 16).

The terms of this hedging transaction are as follows:

- Trading date is a number of dates in January 2015.
- Effective date is December 22, 2014 and September 22, 2016.
- Closing date is December 8, 2019 and February 21, 2020.
- The Company is the payer of fixed interest rate per annum.
- JP Morgan Chase Bank, N.A. is the payer of floating interest rate based on LIBOR.

- On February 13, 2015, the Company entered into an interest rate and foreign exchange swap and option agreements with BNP Paribas, as restructured on April 10, 2015 and September 26, 2016, with contracts value

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan nilai kontrak masing-masing sebesar USD88,647,875. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (Catatan 15 dan 16).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 13 Februari 2015.
- Tanggal efektif adalah 22 Desember 2014 dan 24 Februari 2015.
- Tanggal pengakhiran adalah 8 Desember 2019 dan 24 Februari 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- BNP Paribas adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

- Pada tanggal 16 Februari 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan Standard Chartered Bank dengan nilai kontrak sebesar USD75,000,000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga dan selisih kurs dari utang obligasi (Catatan 16).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 16 Februari 2015.
- Tanggal efektif adalah 24 Februari 2015.
- Tanggal pengakhiran adalah 21 Februari 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- Standard Chartered Bank adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

Instrumen derivatif ini diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas dan memenuhi syarat kriteria akuntansi lindung nilai. Oleh karena itu, nilai wajar instrumen derivatif diakui dan dicatat pada aset keuangan tidak lancar lainnya masing-masing sebesar Rp348.909 dan Rp262.917 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Perubahan nilai wajar dicatat sebagai bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas dan diakui pada penghasilan komprehensif lain.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

amounted to USD88,646,875, respectively. This derivative instrument is used to mitigate the risk of foreign exchange fluctuation of syndicated bank loan and bond payable (Notes 15 and 16).

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is February 13, 2015.*
- *Effective dates are December 22, 2014 and February 24, 2015.*
- *Closing dates are December 8, 2019 and February 24, 2020.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *BNP Paribas is the payer of floating interest rate based on LIBOR.*

- *On February 16, 2015, the Company entered an interest rate and foreign exchange swap agreement with Standard Chartered Bank with a contract value amounting to USD75,000,000. This derivative instrument is used to mitigate the risk of interest rate and foreign exchange fluctuation of bond payable (Note 16).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is February 16, 2015.*
- *Effective date is February 24, 2015.*
- *Closing date is February 21, 2020.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *Standard Chartered Bank is the payer of floating interest rate of LIBOR.*

These derivative instrument is classified as cash flow hedge and qualified for the criteria of hedge accounting. Therefore, the fair value of derivative is recognized and recorded under other non-current financial assets amounted to Rp348,909 and Rp262,917 as of December 31, 2018 and 2017, respectively. The changes in fair value is recorded as effective portion of loss on hedging instrument in order of cash flow hedge and is recognized in other comprehensive income.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

12. Utang Usaha

12. Trade Payables

Akun ini merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur.

This account represents liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been billed through invoice.

	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 28)			Related Party (Note 28)
PT Sekawan Abadi Prima	486	9,578	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak ketiga			Third Parties
PT Indah Pratama Abadi	5,133	12,026	PT Indah Pratama Abadi
PT Harapan Utama Prima	2,244	1,727	PT Harapan Utama Prima
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp2.000)	7,033	12,363	Others (below Rp2,000 each)
Subjumlah Utang Usaha - Pihak ketiga	14,410	26,116	Subtotal Trade Payables - Third Parties
Jumlah Utang Usaha	14,896	35,694	Total Trade Payables

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

All trade payables are denominated in Rupiah and there is no collateral given by the Group of these payables.

13. Akruai

13. Accruals

Akun ini merupakan liabilitas pihak ketiga untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima namun belum ditagih melalui faktur atau secara formal disepakati.

This account represents third parties liabilities to pay for goods or services that have been received however are not yet billed through invoice or formally agreed.

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban Keuangan Lainnya	17,346	10,659	Other Financial Charges
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	15,520	11,467	Repairs and Maintenance Expenses
Estimasi Biaya Penyelesaian Pembangunan Aset	10,253	10,658	Estimated Completion Cost of Assets
Beban Sewa	9,332	21,460	Rental Expenses
Beban Bunga			Interest Expense
(termasuk 2018: USD185,888; 2017: USD6,734,307)	6,847	92,165	(including 2018: USD185,888; 2017: USD6,734,307)
Lain-lain	18,165	13,536	Others
Jumlah Akruai	77,463	159,945	Total Accruals

Beban bunga dan beban keuangan lainnya terkait fasilitas pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi yang diperoleh Perusahaan (Catatan 15 dan 16).

Interest expense and other financial charges are related to syndicated bank loan facilities and bond payable obtained by the Company (Notes 15 and 16).

14. Pendapatan Ditangguhkan

14. Deferred Income

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa menara dan lain-lain kepada pihak ketiga sebagai berikut:

This account represents deferred income from rental of towers and others to third parties are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
PT XL Axiata Tbk	601,126	570,557	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	229,623	30,872	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular	14,239	6,184	PT Telekomunikasi Selular
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	7,132	7,788	Others (below Rp10,000 each)
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	852,120	615,401	Total Deferred Income

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

15. Utang Bank Sindikasi

15. Syndicated Bank Loans

a. Utang Bank Jangka Pendek

a. Short - Term Bank Loan

	2018 Rp
Fasilitas IDR Revolving Loan	
PT Bank BNP Paribas Indonesia	76,500
PT Bank Permata Tbk	76,500
Citibank, N.A., Indonesia	51,750
MUFG Bank Ltd Cabang Jakarta	49,500
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	33,750
Bank of China (Hongkong) Ltd Cabang Jakarta	27,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22,500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,500
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	360,000

IDR Revolving Loan Facility	
PT Bank BNP Paribas Indonesia	
PT Bank Permata Tbk	
Citibank, N.A., Indonesia	
MUFG Bank Ltd Jakarta Branch	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	
Bank of China (Hongkong) Ltd Jakarta Branch	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Total Short - Term Bank Loan	

b. Utang Bank Jangka Panjang

b. Long - Term Bank Loan

Rincian pinjaman bank sindikasi berdasarkan bank pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

The detail of syndication bank loan based on lenders is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Citibank, N.A., Indonesia	613,800	468,112
PT Bank BNP Paribas Indonesia	499,950	244,810
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Hongkong	430,086	--
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	405,524	--
PT Bank Permata Tbk	361,350	--
ING Bank N.V., Cabang Singapura	358,405	626,219
PT Bank CIMB Niaga Tbk	355,021	--
Cathay United Bank, Cabang Singapura	311,812	--
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	311,812	--
MUFG Bank Ltd	292,050	--
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	282,150	--
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	259,843	250,487
The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapura	237,981	--
Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	215,043	62,622
Aozora Asia Pacific Finance Lte, Hongkong	211,459	155,651
Bank of China (Hongkong) Ltd., Cabang Jakarta	207,900	--
Yuanta Commercial Bank Co., Ltd.	207,875	212,915
Bank of China Limited, Cabang Singapura	207,875	--
PT Bank CTBC Indonesia	198,000	250,487
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	198,000	184,762
Bank of Kaohsiung, Cabang Perbankan Offshore, Taiwan	155,906	--
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura	155,906	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143,362	125,244
PT Bank Rabobank International Indonesia	143,362	--
Bank Sinopac, Cabang Perbankan Offshore, Taiwan	103,937	--
E.SUN Commercial Bank, Ltd. Taiwan	103,937	125,244
Eastspring Investments SICAV - FIS Asia Pacific	103,937	94,836
KGI Bank, Taiwan	103,937	--
Taishin International Bank Co., Ltd Cabang Singapura	103,937	--
Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd, Taiwan	103,937	--
Far Eastern International Bank, Cabang Taiwan	71,681	--
Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd. Singapura	55,553	--
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	48,743	--
Siemens Financial Services, Inc.	--	325,634
PT Indonesia Infrastructure Finance	--	323,333
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	124,714
TA Chong Bank Ltd.	--	106,457
BDO Unibank, Inc., Cabang Hong Kong	--	106,457
Jumlah Pinjaman Sindikasi	7,564,071	3,787,984
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(207,242)	(138,955)
Bagian Lancar	(222,766)	--
Bagian Jangka Panjang	7,134,063	3,649,029

Citibank, N.A., Indonesia	
PT Bank BNP Paribas Indonesia	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hongkong Branch	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
ING Bank N.V., Singapore Branch	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Cathay United Bank, Singapore Branch	
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore	
MUFG Bank Ltd	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	
The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch	
Standard Chartered Bank, Singapore Branch	
Aozora Asia Pacific Finance Lte, Hongkong	
Bank of China (Hongkong) Ltd., Jakarta Branch	
Yuanta Commercial Bank Co., Ltd.	
Bank of China Limited, Singapore Branch	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	
Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch, Taiwan	
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapore Branch	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Rabobank International Indonesia	
Bank Sinopac, Offshore Banking Branch, Taiwan	
E.SUN Commercial Bank, Ltd. Taiwan	
Eastspring Investments SICAV - FIS Asia Pacific	
KGI Bank, Taiwan	
Taishin International Bank Co., Ltd Singapore Branch	
Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd, Taiwan	
Far Eastern International Bank, Taiwan Branch	
Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	
Siemens Financial Services, Inc.	
PT Indonesia Infrastructure Finance	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
TA Chong Bank Ltd.	
BDO Unibank, Inc., Hong Kong Branch	
Total Syndicated Loan	
Unamortized Transaction Costs	
Current Portion	
Non-Current Portion	

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman Bank Sindikasi 2018

Pada bulan Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman yang diatur oleh BNP Paribas Cabang Singapura, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT CIMB Niaga Tbk, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank Ltd. Cabang Jakarta (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd) (*Arrangers*) berupa fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD297,000,000 dan BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Cabang Jakarta, Ltd (*Arrangers*) berupa fasilitas *Term Loan* dan *Revolving Loan IDR* sebesar Rp3.850.000.

Pada tanggal 18 Juni 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Bank Sindikasi dan menggunakan opsi *accordian* untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar USD20,000,000.

Fasilitas pinjaman USD dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 2,10%-2,25% per tahun berdasarkan jenis pihak pemberi pinjaman dan fasilitas pinjaman IDR dikenakan margin bunga di atas JIBOR sebesar 2,75% per tahun.

Pinjaman ini jatuh tempo pada bulan Februari 2023. Tujuan pinjaman ini terutama untuk melunasi (*refinancing*) seluruh sisa pinjaman bank sindikasi 2016 dan utang obligasi sebelumnya.

Pinjaman ini dijamin antara lain oleh:

- Pengalihan hak bersyarat atas *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan (Catatan 9);
- Fidusia atas tagihan milik perusahaan dari *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement* (Catatan 4);
- Gadai atas rekening bank milik Perusahaan; dan
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara telekomunikasi milik Perusahaan.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, antara lain, *net debt to running EBITDA* dan *free cash flow to total debt costs*.

Syndicated Bank Loan 2018

On February 2018, the Company signed Loan Facilities Agreement of USD Term Loan amounted to USD297,000,000 arranged by BNP Paribas Singapore Branch, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT CIMB Niaga Tbk, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd) (*The Arrangers*) and Loan Facility Agreement consists of Term Loan and Revolving IDR Facilities amounted to Rp3,850,000 arranged by BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd Cabang Jakarta, Ltd (*the Arrangers*).

On June 18, 2018, the Company signed a Syndication Bank Agreement and exercised the *accordian* option to increase its term loan by USD20,000,000.

The USD loan facility bear interest margin above LIBOR of 2.10%-2.25% per annum based on the certain type of the lenders and the IDR loan facilities bear interest margin above JIBOR of 2.75% per annum.

The facilities have maturity date in February 2023. The purpose of the facilities is mainly to refinancing all outstanding syndicated bank loan 2016 and bond payable.

The loan is secured by, among others:

- Conditional assignment of rights on Master Lease Agreement and Land Lease Agreement;
- Fiduciary over the Company's insurance policies;
- Fiduciary over all towers and other moveable assets of the Company (Note 9);
- Fiduciary over all receivables of the Company in respect of Master Lease Agreement and Land Lease Agreement (Note 4);
- Pledge of current accounts of the Company; and
- Mortgage deeds over the land registered under the Company's name on which the telecommunication towers located.

The Company is required to meet certain financial ratios, among others, *net debt to running EBITDA* and *free cash flow to total debt costs*.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;
- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dan hak tagih piutang;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dalam bentuk apapun; dan
- Melakukan perubahan kendali atas Perusahaan

Pembayaran pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp30.500 dan USD3,170,000.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki saldo yang belum dibayarkan atas fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD313,830,000 dan fasilitas *Term Loan IDR* sebesar Rp3.019.500 dan *Revolving Loan* sebesar Rp360.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi kondisi dan persyaratan atas pinjaman bank sindikasi.

Pinjaman Bank Sindikasi 2016

Pada tanggal 19 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas Pinjaman yang diatur oleh Standard Chartered Bank, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, PT Bank CTBC Indonesia, JP Morgan Chase Bank, N.A., dan ING Bank N.V. (*Arrangers*) berupa fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD225,000,000 dan PT Bank BNP Paribas, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*Arrangers*) berupa fasilitas *Term Loan IDR* dan *Revolving IDR* masing-masing sebesar Rp1.050.000 and Rp580.000.

Pinjaman ini memiliki jatuh tempo pada bulan Desember 2019. Tujuan pinjaman ini, antara lain, untuk membayar (*refinancing*) pinjaman bank sindikasi 2015.

Term Loan USD dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 2,30%-2,50% per tahun berdasarkan jenis pihak pemberi pinjaman dan *Term Loan IDR* dikenakan margin bunga di atas JIBOR sebesar 2,50%-2,90% per tahun berdasarkan rasio *net debt to running EBITDA*.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

During the loan facility period, without prior written consent from the lenders, the Company is restricted to, among others:

- Purchase, develop, acquire and invest in business unit, assets or in any type of business when certain criteria is not met;
- Pledge partially or whole author the Company's assets to other parties;
- Sell or transfer or otherwise dispose of any of the Company's assets and receivables on recourse term;
- Sell or transfer or rent out/submit the rights to use the Company's assets in any form; and
- Change the control of the Company.

The payment of this loan for the year ended December 31, 2018 amounted to Rp30,500 and USD3,170,000.

As of December 31, 2018, the Company has outstanding balance of *Term Loan USD* facility amounting to USD313,830,000 and *Term Loan IDR* amounting to Rp3,019,500 and *Revolving Loan* facilities amounting to Rp360,000.

As of December 31, 2018, the Company is in compliance with the term and condition of this syndicated bank loan.

Syndicated Bank Loan 2016

On September 19, 2016, the Company signed Loan facilities agreement arranged by Standard Chartered Bank, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, PT Bank CTBC Indonesia, JP Morgan Chase Bank, N.A., and ING Bank N.V. (*The Arrangers*) consist of *Term Loan USD* amounted to USD225,000,000 and PT Bank BNP Paribas, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multi Infrastruktur and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*the Arrangers*) consists of *Term Loan IDR* and *Revolving IDR* facilities amounted to Rp1,050,000 and Rp580,000, respectively.

The facilities have maturity date in December 2019. The purpose of the facilities among others, to refinancing syndicated bank loan 2015.

The *Term Loan USD* facility bear interest margin above LIBOR of 2.30%-2.50% per annum based on the certain type of the lenders and the *Term Loan IDR* facility bear interest margin above JIBOR of 2.50%-2.90% per annum based on net debt to running EBITDA ratio.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman ini dijamin antara lain oleh:

- Pengalihan hak bersyarat atas *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan (Catatan 9);
- Fidusia atas tagihan milik perusahaan dari *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement* (Catatan 4);
- Gadai atas rekening bank milik Perusahaan; dan
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara telekomunikasi milik Perusahaan.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, antara lain, *net debt to running EBITDA*, *asset coverage ratio*, *free cash flow to total debt costs* dan *security coverage ratio*.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;
- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dan hak tagih piutang;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dalam bentuk apapun; dan
- Melakukan perubahan kendali atas Perusahaan.

Pada tanggal 27 Maret 2018, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya dengan cara restrukturisasi menggunakan pinjaman bank sindikasi 2018.

Amortisasi biaya transaksi yang dibebankan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp58.514 dan Rp89.484.

Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan pihak ketiga atas risiko fluktuasi tingkat bunga dan selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi (Catatan 11).

The loan is secured by, among others:

- Conditional assignment of rights on *Master Lease Agreement* and *Land Lease Agreement*;
- Fiduciary over the Company's insurance policies;
- Fiduciary over all towers and other moveable assets of the Company (Note 9);
- Fiduciary over all receivables of the Company in respect of *Master Lease Agreement* and *Land Lease Agreement* (Note 4);
- Pledge of current accounts of the Company; and
- Mortgage deeds over the land registered under the Company's name on which the telecommunication towers located.

The Company is required to meet certain financial ratios, among others, *net debt to running EBITDA*, *asset coverage ratio*, *free cash flow to total debt costs* and *security coverage ratio*.

During the loan facility period, without prior written consent from the lenders, the Company is restricted to, among others:

- Purchase, develop, acquire and invest in business unit, assets or in any type of business when certain criteria is not met;
- Pledge partially or whole author the Company's assets to other parties;
- Sell or transfer or otherwise dispose of any of the Company's assets and receivables on recourse term;
- Sell or transfer or rent out/submit the right to use the Company's assets in any form; and
- Change the control of the Company.

On March 27, 2018, this loan has been fully paid through restructuring using syndicated bank loan 2018.

The amortized transaction costs charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp58,514 and Rp89,484, respectively.

The Company entered hedge contracts with third parties to hedge interest rate and foreign exchange fluctuation risk of the syndicated bank loan (Note 11).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Jika bagian pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya maka saldo pinjaman bank sindikasi pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

If the portion of foreign currency loan is valued using its hedging rate the balance of syndicated bank loans as of December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Jumlah Pinjaman	7,359,673	3,571,902	Total Loan
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(207,242)	(138,955)	Unamortized Transaction Costs
Dikurangi: Utang Sindikasi Bank Jangka Pendek	(222,766)	--	Less: Short-Term Syndicated Bank Loan
Bagian Jangka Panjang	6,929,665	3,432,947	Non-Current Portion

16. Utang Obligasi

16. Bond Payable

	2017 Rp	
Utang Obligasi		Bond Payable
USD300,000,000	4,064,400	USD300,000,000
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(45,196)	Unamortized Transaction Costs
Bersih	4,019,204	Net

Pada tanggal 24 Februari 2015, Pratama Agung Pte. Ltd., (PA), entitas anak, menerbitkan obligasi USD300,000,000 6,25% Senior Notes Due 2020 sebesar USD300.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun yang dibayarkan tiap 6 (enam) bulan dan terdaftar pada Bursa Efek Singapura dengan *the Bank of New York Mellon, London Branch* sebagai wali amanat. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2020. Harga jual obligasi pada saat penawaran adalah sebesar 100% dari nilai normal obligasi.

On February 24, 2015, Pratama Agung Pte. Ltd., (PA), a subsidiary, issued bonds USD300,000,000 6.25% Senior Notes Due 2020 amounting to USD300,000,000 with a fixed interest rate of 6.25% per year, a payable every 6 (six) months and listed on the Singapore Stock Exchange with the Bank of New York Mellon, London Branch as trustee. The bond will mature on February 24, 2020. All the bond were offered at 100% of the nominal value.

Obligasi ini telah memperoleh peringkat BB- dari Fitch Ratings Ltd. dan B+ dari Standard and Poor's Ratings.

These bonds have been rated BB- by Fitch Ratings Ltd. and B+ by Standard and Poor's Ratings.

Obligasi akan dijamin tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali oleh Perusahaan, gadai saham (*share charge*) dan pengalihan perjanjian pinjaman dari Perusahaan dan entitas-entitas anak tertentu.

The bond is unconditionally and irrevocably guaranteed by the Company, secured by charges of the Company's shares and an assignment of intercompany loan of the Company and certain subsidiaries.

Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan pihak ketiga sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi tingkat bunga dan selisih kurs utang obligasi (Catatan 11).

The Company entered hedge contracts with third parties to hedge interest rate and foreign exchange fluctuation risks of the bond payable (Note 11).

Penggunaan dana bersih dari utang obligasi di atas adalah untuk membayar (*refinance*) pinjaman *bridge* 2014.

The net proceed of the bond were used to refinance bridge loan 2014.

Pada tanggal 28 Maret 2018, PA telah melakukan pelunasan utang obligasi. Total pelunasan utang obligasi senilai USD311,197,917 yang terdiri dari pokok obligasi sebesar USD300,000,000, bunga obligasi sebesar USD1,822,917 dan *bond call premium* sebesar USD9,375,000 (Catatan 25).

On March 28, 2018, PA has fully repaid its bond. The total bond redemption amounted to USD311,197,917 which consists of bond principle amounting to USD300,000,000, bond interest amounting to USD1,822,917 and bond call premium amounting to USD9,375,000 (Note 25).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Jika utang obligasi diukur menggunakan kurs lindung nilainya (Catatan 11), maka saldo utang obligasi pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

If the bond payable is valued using its hedging rate (Note 11), the balance of bond payable as of December 31, 2017 is as follows:

	2017 Rp	
Jumlah Utang Obligasi	3,790,188	Bond Payable
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(45,196)	Unamortized Transaction Costs
Bagian Jangka Panjang	3,744,992	Non-Current Portion

17. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

17. Long-Term Employment Benefits Obligation

Imbalan Pascakerja – Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan

Saldo provisi imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia yang laporannya bertanggal 22 Maret 2019 dan 22 Februari 2018.

Post-Employment Benefits – Unfunded Defined Benefits Plan

The provision of post-employment benefits as of December 31, 2018 and 2017 were calculated by an independent actuary, PT Milliman Indonesia, with its report dated March 22, 2019 and February 22, 2018.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used to determine post-employment benefits expenses and obligation are as follows:

	2018	2017	
Usia Pensiun Normal	57 tahun/ years	57 tahun/ years	Normal Pension Age
Tingkat Diskonto (Per Tahun)	8.25% (PT Sarana Inti Persada: 9%)	7.25% (PT Sarana Inti Persada: 6.75%)	Discount Rate (Per Annum)
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji (Per Tahun)	6.5%	6.5%	Salary Increase Projection Rate (Per Annum)
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% from mortality rate		Permanent Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 0,5% pada saat usia 45 tahun/ 10% up to 25 years old, then proportionally decline to 0.5% at 45 years old		Resignation Rate
Tabel Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 3/Indonesia Mortality Table 3		Table of Mortality

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements in the post-employment benefits liability in the statements of financial position are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Liabilitas Awal Tahun	27,265	20,789	Liabilities at Beginning of Year
Beban Manfaat Karyawan Tahun Berjalan	10,313	7,999	Current Year Employee Benefits Expense
Pembayaran Imbalan Tahun Berjalan	(1,165)	(1,093)	Current Year Actual Benefits Payments
Kerugian Aktuarial	(6,165)	(430)	Actuarial Loss
Liabilitas Akhir Tahun	30,248	27,265	Liabilities at End of Year

Rincian beban manfaat pascakerja karyawan yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses for the current year are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban Jasa Kini	8,684	7,195	Current Service Cost
Beban Bunga	1,934	1,721	Interest Cost
Biaya Jasa Lalu	(305)	(917)	Past Service Cost
Jumlah Beban Manfaat Kerja Karyawan	10,313	7,999	Total Employee Benefits Expense

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang adalah sebagai berikut:

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of defined benefits obligation is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			Present Value of Defined Benefits Obligation
Awal Tahun	27,265	20,789	at Beginning of Year
Beban Jasa Kini	8,684	7,195	Current Service Cost
Beban Bunga	1,934	1,721	Interest Cost
Pembayaran Imbalan	(1,165)	(1,093)	Benefits Payment
Pengukuran Kembali:			Remeasurements:
Keuntungan (Kerugian) aktuarial dari			Actuarial Gain (Loss) from Change in
Perubahan Asumsi Finansial	(3,389)	2,148	Financial Assumptions
Kerugian aktuarial dari			Actuarial Loss from Change in
Penyesuaian Pengalaman	(2,776)	(2,578)	Experience Adjustments
Biaya Jasa Lalu	(305)	(917)	Past Service Cost
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			Present Value of Defined Benefits Obligation
Akhir Tahun	30,248	27,265	at End of Year

Akumulasi keuntungan aktuarial atas program imbalan pasti yang dicatat di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The accumulated of actuarial gain of defined benefits plan which is recorded in other comprehensive income is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Saldo Awal	3,123	4,143	Beginning Balance
Kerugian Aktuarial	6,165	430	Actuarial Loss
Pajak Penghasilan Terkait	(202)	(1,450)	Related Income Tax
Akumulasi Program Imbalan Pasti yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lainnya	9,086	3,123	Akumulasi Program Imbalan Pasti yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lainnya

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefits plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liabilities.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan.

Salary Risk

The present value of the defined benefits plan liabilities is calculated by reference to the future salaries of plan participants.

Analisis Sensitivitas

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2018, akan berakibat pada penurunan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp2.982.

Sensitivity analysis

Increasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2018, will impact to the decrease of defined benefits plan obligation amounted to Rp2,982.

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2018, akan berakibat pada peningkatan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp3.454.

Decreasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2018, will impact to the increase of defined benefits plan obligation amounted to Rp3,454.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2018, liabilitas imbalan pascakerja naik sebesar Rp3.934.

If the expected salary growth increase 1% of that assumed on December 31, 2018, post-employment benefits liabilities will increase Rp3,934.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan turun 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2018, liabilitas imbalan pascakerja turun sebesar Rp3.422.

If the expected salary growth decrease 1% of that assumed on December 31, 2018, post-employment benefits liabilities will decrease Rp3,422.

18. Modal Saham

18. Share Capital

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders on December 31, 2018 and 2017 is as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah/ Total Rp	Shareholders
PT Kharisma Indah Ekaprima	491,384,554	43.20	49,138	PT Kharisma Indah Ekaprima
Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Ltd	290,228,868	25.51	29,023	Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Ltd
Juliawati Gunawan (Direktur)	359,596	0.03	36	Juliawati Gunawan (Director)
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	355,606,680	31.26	35,561	Public (below 5% each)
Jumlah	1,137,579,698	100.00	113,758	Total

19. Tambahan Modal Disetor – Bersih

19. Additional Paid-in Capital – Net

	2018 Rp	2017 Rp	
Agio Nilai Nominal Saham	3,589,495	3,589,495	Premium of Par Value of Shares
Selisih Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	276	276	Difference from Tax Amnesty Assets and Liabilities
Jumlah	3,589,771	3,589,771	Total

Agio Nilai Nominal Saham

Akun ini merupakan agio atas nilai nominal saham dari Penawaran Umum Saham Perdana, Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II Perusahaan setelah dikurangi biaya emisi saham, pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Premium of Par Value of Shares

This account represents premium of par value of shares issued pursuant to the Company's Initial Public Offering (IPO), Limited Public Offering I and Limited Public Offering II after deducting the share issuance costs as of December 31, 2018 and 2017, as follows:

	Rp	
Hasil Penawaran Umum Saham Perdana		Initial Public Offering
Agio Saham	330,000	Premium
Biaya Emisi	(9,476)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	320,524	Subtotal
Hasil Penawaran Umum Saham Terbatas I		Limited Public Offering I
Agio Saham	634,500	Premium
Biaya Emisi	(3,905)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	630,595	Subtotal
Hasil Penawaran Umum Saham Terbatas II		Limited Public Offering II
Agio Saham	2,367,839	Premium
Biaya Emisi	(8,639)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	2,359,200	Subtotal
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		Exercise of Warrant Serie I
Agio Saham	279,176	Premium
Bersih	3,589,495	Net

Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, PT Rekajasa Akses, entitas anak, mengikuti pengampunan pajak ini dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET17578/PP/WPJ.30/2016 dari Kantor Wilayah Dewan Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Selisih antara aset dan kewajiban atas pengampunan pajak dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

Tax Amnesty

In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty PT Rekajasa Akses, a subsidiary, participated this tax amnesty and received Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET17578/PP/WPJ.30/2016 from Kantor Wilayah Dewan Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Difference from tax amnesty assets and liabilities recorded as a part of additional paid-in capital.

20. Penghasilan Komprehensif Lainnya

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas Perusahaan dan entitas anak yang terdiri dari:

	2018 Rp	2017 Rp
Lindung Nilai Arus Kas (Catatan 11)	(373,458)	(247,392)
Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang (Catatan 9)	333,932	123,497
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	16,295	1,125
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti (Catatan 17)	9,086	3,123
Jumlah	(14,145)	(119,647)

20. Other Comprehensive Income

This account represents differences arising from transactions resulting in changes in equity of the Company and its subsidiaries which consist of:

Cash Flow Hedge (Note 11)
Net Increase in Revaluation of Tower and Supporting Equipment (Note 9)
Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currencies
Remeasurement of Defined Benefits Plan (Notes 17)
Total

Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara

	2018 Rp	2017 Rp
Saldo Awal Tahun	123,497	762,855
Kenaikan (Penurunan) Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	205,271	(618,214)
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba	5,164	(21,144)
Saldo Akhir Tahun	333,932	123,497

Net Increase in Revaluation of Tower

Beginning Balance
Revaluation Increase (Decrease) of Tower and Supporting Equipment
Reclassification Revaluation Reserve to Retained Earnings
Ending Balance

21. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan atas sewa menara telekomunikasi dan lain-lain dari pihak ketiga, sebagai berikut:

	2018 Rp	2017 Rp
PT XL Axiata Tbk	750,989	784,529
PT Hutchison 3 Indonesia	373,936	391,806
PT Telekomunikasi Selular	343,865	333,536
PT Indosat Tbk	132,081	126,417
PT Smartfren Telecom Tbk	107,893	91,375
PT Internux	86,268	82,677
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50,000)	104,743	98,147
Jumlah Pendapatan	1,899,775	1,908,487

This account represents revenues from lease of telecommunication towers and others to third parties as follows:

PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk
PT Internux
Others (below Rp50,000 each)
Total Revenues

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

22. Beban Pokok Pendapatan

22. Cost of Revenues

	2018 Rp	2017 Rp	
Penyusutan dan Amortisasi:			Depreciation and Amortization:
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	150,684	137,050	Depreciation of Property and Equipment (Note 9)
Sewa Jaringan Serat Optik	8,002	--	Fiber Optic Lease
Sewa Lahan	184,804	160,354	Ground Lease
Perizinan dan Lain-lain	16,128	16,241	Permit and Others
Subjumlah	359,618	313,645	Subtotal
Beban Pokok Pendapatan Lainnya:			Other Cost of Revenues:
Pemeliharaan dan Perbaikan	68,759	83,791	Repair and Maintenance
Jasa Keamanan dan Lain-lain	50,296	41,386	Security Services and Others
Subjumlah	119,055	125,177	Subtotal
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	478,673	438,822	Total Cost of Revenues

23. Beban Usaha

23. Operating Expenses

	2018 Rp	2017 Rp	
Penyusutan dan Amortisasi:			Depreciation and Amortization:
Amortisasi	16,752	13,991	Amortization
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	7,022	8,774	Depreciation of Property and Equipment (Note 9)
Subjumlah	23,774	22,765	Subtotal
Beban Usaha Lainnya:			Other Operating Expenses:
Gaji dan Tunjangan	105,113	104,817	Salaries and Allowances
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	8,759	8,580	Office Supplies and Other Expenses
Perjalanan dan Akomodasi	9,810	8,095	Travel and Accommodation
Imbalan Pascakerja (Catatan 17)	9,148	6,906	Post-employment Benefits (Note 17)
Pemasaran	4,519	4,854	Marketing
Jasa Profesional	5,640	4,005	Professional Fee
Subjumlah	142,989	137,257	Subtotal
Jumlah Beban Usaha	166,763	160,022	Total Operating Expenses

24. Beban Keuangan

24. Financial Charges

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban Bunga:			Interest Expense:
Pinjaman Bank Sindikasi	(449,913)	(200,863)	Syndicated Bank Loan
Utang Obligasi	(63,797)	(251,221)	Bond Payable
Subjumlah	(513,710)	(452,084)	Subtotal
Beban Keuangan Lainnya:			Other Financial Charges:
Amortisasi Beban Keuangan	(100,812)	(108,090)	Amortization of Financial Charges
Lainnya	(340,081)	(441,964)	Others
Subjumlah	(440,893)	(550,054)	Subtotal
Jumlah Beban Keuangan	(954,603)	(1,002,138)	Total Financial Charges

25. Beban Lain-lain - Bersih

25. Other Expense - Net

	2018 Rp	2017 Rp	
Penghasilan (Beban) lain-lain:			Other Income (Expense):
Keuntungan Selisih Kurs - Bersih	18,523	369	Gain on Foreign Exchange Difference - Net
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 10)	(6,598)	(6,598)	Amortization of Intangible Assets (Note 10)
Beban Penalti	(5,708)	(14,856)	Penalty Expenses
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	--	Allowance for Impairment Loss
Piutang Usaha (Catatan 4 dan 11)	(328,961)	--	Trade Receivable (Notes 4 and 11)
Rugi Pembongkaran dan Pelepasan Aset Tetap (Catatan 9)	(397,274)	(67,409)	Loss on Dismantling and Disposal of Property and Equipment (Note 9)
Pendapatan Denda Keterlambatan	85,630	2,572	Late Fine Income
Bond Premium Call (Catatan 16)	(128,859)	--	Bond Premium Call (Note 16)
Lain-lain - Bersih	172,444	(30,505)	Others - Net
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(590,803)	(116,427)	Total Other Expense - Net

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

26. Perpajakan

26. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2018 Rp	2017 Rp	
Pajak Penghasilan			Income Tax
Pasal 28A			Article 28A
<u>Perusahaan</u>			<u>the Company</u>
Tahun 2018	24,853	--	Year 2018
Tahun 2017	22,767	22,767	Year 2017
Tahun 2016	--	21,455	Year 2016
Tahun 2012	3,828	3,828	Year 2012
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Tahun 2018	5,012	--	Year 2018
Tahun 2017	4,271	3,813	Year 2017
Tahun 2016	--	2,689	Year 2016
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih			Value Added Tax - net
Perusahaan	133,767	282,535	The Company
Entitas Anak	63,032	56,222	Subsidiaries
Klaim Restitusi Pajak	97,551	45,041	Claim For Tax Refund
Jumlah Pajak Dibayar di Muka	355,081	438,350	Total Prepaid Taxes

Tahun Pajak 2017

Perusahaan

Pada bulan Agustus 2018, Perusahaan telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima Perusahaan.

Entitas Anak

Pada bulan September 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima BIT.

Pada bulan Oktober 2018, PT Sarana Inti Persada (SIP), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima SIP.

Pada bulan Agustus 2018, PT Rekajasa Akses (REJA), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima REJA.

Fiscal Year 2017

The Company

On August 2018, the Company received the tax assessment of Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of objection is not yet received by the Company.

Subsidiaries

On September 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), a subsidiary, received the tax assessment of Corporate Income Tax, VAT, Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of objection is not yet received by BIT.

On October 2018, PT Sarana Inti Persada (SIP), a subsidiary, received the tax assessment of Corporate Income Tax, VAT, Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of objection is not yet received by SIP.

On August 2018, PT Rekajasa Akses (REJA), a subsidiary, received the tax assessment of corporate income tax, VAT, Income Tax 21, Income Tax 23 and Income Tax 4 (2). As of the issuance date of the financial statement, the result of tax assessment is not yet received by REJA.

Tahun Pajak 2016

Perusahaan

Pada bulan Agustus 2018, Perusahaan menerima hasil atas pemeriksaan pajak tahun 2016 berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp21.431 dan sisanya sebesar Rp24 dicatat sebagai beban pajak. Perusahaan telah menerima pengembalian PPh Badan 2016 sebesar Rp16.788, setelah dipotong dengan denda pajak kurang bayar PPN Desember 2016 sebesar Rp4.643 dan pada bulan November 2018, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas pemotongan tersebut. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil keberatan belum diterima Perusahaan.

Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN Desember 2016 sebesar Rp50.538 (termasuk denda Rp27.566) dan SKPKB atas PPh 26 Desember 2016 sebesar Rp67.214 (termasuk denda Rp19.204). Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk SKPKB PPN sebesar Rp45.895 dan pada bulan November 2018 Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 26. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, keberatan masih dalam proses.

Entitas Anak

Pada bulan April 2018, BIT menerima hasil pemeriksaan atas pajak tahun 2016 berupa SKPLB Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.993 (Rp5 dicatat sebagai beban pajak) dan SKPKB atas pajak PPN, PPh 4 (2) dan PPh 21 dengan jumlah sebesar Rp641. BIT telah menerima pengembalian SKPLB Pajak Badan sebesar Rp1.856 dan atas selisih pengembalian, BIT mengajukan proses pemindahanbukuian sebesar Rp137.

Pada bulan Mei 2018, REJA menerima hasil pemeriksaan atas jenis Pajak tahun 2016 berupa SKPLB Pajak Badan. REJA telah menerima pengembalian sebesar Rp397 dan sisanya dicatat sebagai beban pajak.

Tahun Pajak 2015

Perusahaan

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2015, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Badan dan Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp37.289.

Entitas Anak

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2015, BIT menerima SKPLB Pajak Badan sebesar Rp1.891. BIT telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp1.085 dan BIT mengajukan keberatan atas selisih pengembalian sebesar Rp806. Pada September 2018, BIT menerima selisih pengembalian sebesar Rp593 dan sisanya sebesar Rp206 dicatat sebagai beban pajak

Fiscal Year 2016

The Company

On August 2018, the Company received the result of tax assessment fiscal year 2016 in form of Tax Overpayment Assessment Corporate Income Tax (SKPLB) amounting to Rp21,431 and the difference Rp24 recorded as tax expense. The Company has received tax refund amounting to Rp16,788, after deducted by tax penalty from underpayment of VAT December 2016 amounting to Rp4,643 and on November 2018, the Company has filed the objection of this deduction. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of objection is not yet received by the Company.

The Company also received Tax Underpayment Assesment (SKPKB) for VAT amounting to Rp50,538 (including penalty of Rp27,566) and SKPKB of Income Tax article 26 amounting to Rp67,214 (including penalty of Rp19,204). The Company has paid SKPKB VAT amounting Rp45,895 and on November 2018 the Company has filed an objection of SKPKB Income Tax article 26. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, an objection still on process.

Subsidiaries

On April 2018, BIT received the result of tax assessment fiscal year 2016 in form of SKPLB Corporate Income Tax amounting to Rp1,993 (Rp5 recorded as tax expense) and SKPKB of VAT, Income Tax article 4 (2) and Income Tax article 21 amounting to Rp641. BIT has received tax return amounting to Rp1,856 and BIT in the process of filling overbooking application amounting to Rp137.

On May 2018, REJA received the result of taxes assessment fiscal Year 2016 in form of SKPLB Corporate Income Tax. REJA has received tax return amounting to Rp397 and the difference recorded as tax expense.

Fiscal Year 2015

The Company

The result of tax assessment fiscal year 2015, the Company received SKPLB Corporate Income Tax and the Company has received tax return amounting to Rp37,289.

Subsidiaries

The result of tax assessment fiscal year 2015, BIT received SKPLB Corporate Income Tax amounting to Rp1,891. BIT has received tax refund amounting to Rp1,085 and BIT filed an objection for difference of tax refund amounting to Rp806. On September 2018, BIT received the difference of tax refund amounting to Rp593 and the difference amounting to Rp206

dan dipindahbukukan sebesar Rp7 pada bulan November 2018.

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2015, SIP menerima SKPLB Pajak Badan dan SIP telah menerima sebesar pengembalian pajak sebesar Rp406

Tahun Pajak 2014

Pada November 2017, BIT sedang dalam proses pemeriksaan PPN tahun pajak 2014. Pada bulan Januari 2019, Perusahaan menerima SKPKB PPN Tahun Pajak 2014 sebesar Rp2.158 dan dilunasi pada bulan Februari 2019. BIT akan mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut.

Tahun Pajak 2013

Pada bulan Maret 2018, BIT menerima SKPKB PPN tahun pajak 2013 sebesar Rp7.241 dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp138. Pada bulan Mei 2018, BIT telah melakukan pembayaran dan dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB dan STP. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil keberatan belum diterima Perusahaan.

Tahun Pajak 2012 dan 2011

Pada bulan April 2013 dan Juni 2014, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011 dan 2012 yang terdiri dari:

Jenis Pajak/ Type of Tax	Tahun Pajak/ Fiscal Year	Jumlah/ Amount Rp	Keterangan/ Description
Pajak Penghasilan Badan/ Corporate Income Tax	2012	1,369	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Underpayment Tax Notice (SKPKB)
Pajak Penghasilan Badan/ Corporate Income Tax	2011	25,415	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 26/ Tax Article 26	2011	1,106	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 21/ Tax Article 21	2011	32	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 23/ Tax Article 23	2011	3	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)/ Tax Article 4 (2)	2011	62	SKPKB
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa / Value Added Tax	2011	7,876	SKPKB
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa / Value Added Tax	2011	461	Surat Tagihan Pajak / Tax Collection Notice (STP)
Jumlah		36,324	Total

Pada tanggal Agustus 2015, Perusahaan menerima SKPKB Pajak Badan tahun 2012 dan hasilnya menolak pengajuan keberatan dan menambahkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp24.460 (sebelumnya Rp1.369). Atas surat keputusan tersebut, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp23.091 dan Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak pada bulan November 2015. Pada bulan Desember 2018, Perusahaan telah menerima putusan banding tersebut yang mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp12.352 pada bulan Februari 2019 dan sisanya menjadi beban pajak.

Pada bulan Maret 2017, Perusahaan menerima pengembalian pajak sebesar Rp15.196 dari hasil putusan pengadilan dengan No. PUT/80673/PP/M.XVIIIIB/15/2017 atas Surat SKPKB

recorded as tax expense and overbooking amounting to Rp7 on November 2018.

The result of tax assessment Income fiscal year 2015, SIP received SKPLB Corporate Income Tax and SIP has received tax return amounting to Rp406.

Fiscal Year 2014

On November 2017, BIT is in process for tax assessment for VAT fiscal year 2014. On January 2019, BIT received SKPKB VAT Fiscal Year 2014 amounting to Rp2,158 and paid on February 2019. BIT will filed the objection of this SKPKB.

Fiscal Year 2013

On March 2018, BIT received SKPKB VAT fiscal year 2013 amounting to Rp7,241 and Tax Collection Notice (STP) amounting to Rp138. On May 2018, BIT has paid and in the process of an objection of SKPKB and STP. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of objection is not yet received by the Company.

Fiscal Year 2012 and 2011

In April 2013 and June 2014, the Company received tax assessment result for fiscal year 2011 and 2012 which consists of:

In August 2015, the Company received the decision letter for the objection filed on SKPKB for the year 2012 as mentioned above and the result was rejected the objection and added underpayment tax amounting to Rp24,460 (previously Rp1,369). For this decision letter, the Company has paid amounting to Rp23,091 and the Company has file the appeal to tax court in November 2015. On December 2018, the Company received appeal decision that return tax overpayment amounting to Rp12,352 on Februari 2019 and the difference recorded as tax expense.

In March 2017, the Company received tax return amounting to Rp15,196 from the result of Tax Court decision with No. PUT/80673/PP/M.XVIIIIB/15/2015 for SKPKB Corporate Income Tax fiscal year 2011

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Pajak Penghasilan Badan tahun 2011 sebesar Rp25.415, dimana berdasarkan putusan tersebut perusahaan dinyatakan lebih bayar sebesar Rp9.557. Selisihnya dikompensasikan ke SPT PPh 26 tahun pajak 2015.

amounting to Rp25,415, where based on the verdict, the company was stated overpayment amounting to Rp9,557. The difference is compensating to STP of Income Tax article 26 for the fiscal year 2015.

Pada bulan Mei 2017, Perusahaan menerima pengembalian pajak sebesar Rp1.106 atas hasil putusan pengadilan pajak atas SKPKB PPh 26 tahun pajak 2011.

In May 2017, the Company has received tax refund amounting to Rp1,106 from the result of Tax Court decision for SKPKB Income Tax article 26 for fiscal year 2011.

Pada bulan Mei 2017, Perusahaan menerima pengembalian pajak sebesar Rp7.027 atas hasil putusan pengadilan pajak atas SKPKB PPN tahun pajak 2011.

In May 2017, the Company has received tax refund amounting to Rp7,027 from the result of Tax Court decision for SKPKB VAT for fiscal year 2011.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2018 Rp	2017 Rp
Pajak Penghasilan:		
Perusahaan		
Pasal 4 (2)	1,508	1,091
Pasal 21	2,149	2,162
Pasal 23	4,536	5,292
Entitas Anak	466	1,010
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih		
Entitas Anak	204	138
Jumlah Utang Pajak	8,863	9,693

Income Tax:
The Company
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Subsidiaries
Value Added Tax - Net
Subsidiaries
Total Taxes Payable

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	2018			2017		
	Perusahaan/ the Company Rp	Entitas Anak/ Subsidiaries Rp	Konsolidasian/ Consolidated Rp	Perusahaan/ the Company Rp	Entitas Anak/ Subsidiaries Rp	Konsolidasian/ Consolidated Rp
Beban Pajak Kini	--	(21,696)	(21,696)	--	(33,254)	(33,254)
Beban Pajak Koreksi Tahun Lalu	(24)	(505)	(529)	--	--	--
Beban Pajak Tangguhan: Tahun Berjalan	18	702	720	150,956	2,125	153,081
Jumlah Beban Pajak	(6)	(21,499)	(21,505)	150,956	(31,129)	119,827

Current Tax Expense
Tax Expense of Previous
Year Correction
Deferred Tax Expense
Current Year
Total Tax Expense

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi rugi fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Current Tax

The reconciliation between profit (loss) before tax, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income to the estimated tax loss for the years ended December 31, 2018 and 2017 is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(1,202,338)	211,135
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak	131,811	(42,466)
Laba (Rugi) Komersial Perusahaan	(1,070,527)	168,669
Perbedaan Waktu		
Pendapatan yang Telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	(9,757)	(19,848)
Penyusutan *)	(998,558)	(1,013,069)
Beban Imbalan Kerja	--	5,767
Cadangan Piutang yang Direstrukturisasi	326,381	--
Subjumlah	(681,934)	(1,027,150)

Profit (Loss) before Tax as Presented in
the Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
Deduct: Profit (Loss) of Subsidiaries
Commercial Profit (Loss) of the Company
Timing Differences:
Income Subjected to
Final Tax
Depreciation *)
Employee Benefits
Allowance of Restructured Trade Receivables
Subtotal

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 Rp	2017 Rp
Beda Tetap:		
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	4,986	5,231
Lain-lain	1,012,378	810,275
Subjumlah	1,017,364	815,506
Estimasi Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(735,097)	(42,975)
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	--	--
Dikurangi:		
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka - Pasal 23	24,853	22,767
Taksiran Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	24,853	22,767

*) Beda Penyusutan sampai dengan tahun 2018 tidak diperhitungkan sebagai perbedaan temporer untuk tujuan akuntansi dengan pertimbangan dimasa depan akan dikenakan pajak penghasilan final

Permanent Differences:
Salaries and Employee Benefits
Others
Subtotal
Estimated Tax Loss for the Year
Estimated Current Tax - the Company
Less:
Prepaid Income Tax - Article 23
Estimated Corporate Income Tax Overpayment

*) Temporary difference from depreciation until 2018 is not calculated as temporary difference for accounting purposes to considered it will be subject to final income tax

Perhitungan rugi fiskal hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

The Calculation of taxable loss above will be the basis in filling Annual Tax return Corporate Income Tax.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax benefit (expense) with the result of profit before tax with tax rate is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(1,202,338)	211,135
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak	131,811	(42,466)
Laba (Rugi) Komersial Perusahaan	(1,070,527)	168,669
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif Efektif Rugi Fiskal	(267,632)	(42,167)
Pengaruh Pajak atas Koreksi Fiskal Pajak Kini	267,632	52,911
Pajak Tangguhan	18	150,956
Beban Pajak Koreksi Tahun Lalu	(24)	--
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Perusahaan	(6)	150,956
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak:		
Pajak Kini dan Koreksi Tahun Lalu	(22,201)	(33,254)
Pajak Tangguhan - Tahun Berjalan	702	2,125
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Konsolidasian	(21,505)	119,827

Profit (Loss) before Tax as Presented in Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Less:
Deduct: Profit (Loss) of Subsidiaries
Commercial Profit (Loss) of the Company
Income Tax Expense at Effective Tax Rate
Tax Loss
Tax Effect of Tax Adjustments
Current Tax
Deferred Tax
Tax Expense of Previous Correction
Income Tax Benefit (Expense) - the Company
Income Tax Expense - Subsidiaries:
Tax Expense of Previous Year Correction
Deferred Tax - Current Year
Consolidated Income Tax Benefit (Expense)

d. Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax
The deferred tax assets (liabilities) as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	Dikreditkan pada Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan				
Perusahaan				
Imbalan Pascakerja	21	18	(7)	32
Entitas Anak - Bersih	208	702	(195)	715
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	229	720	(202)	747

Deferred Tax Asset
The Company
Post-Employment Benefits
Subsidiaries - Net
Deferred Tax Asset - Net

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2016	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan - Bersih					Deferred Tax Asset - Net
Entitas Anak - Bersih	125	68	(13)	180	Subsidiary - Net
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset (Liabilities)
Perusahaan					The Company
Penyusutan	(615,479)	615,479	--	--	Depreciation
Revaluasi	(161,662)	--	161,662	--	Revaluation
Imbalan Pascakerja	4,137	(2,960)	(1,156)	21	Post-Employment Benefits
Rugi Fiskal	461,561	(461,561)	--	--	Fiscal Loss
Subjumlah	(311,443)	150,956	160,506	21	Subtotal
Entitas Anak - Bersih	(96,387)	2,057	94,358	28	Subsidiaries - Net
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Bersih	(407,705)	153,081	254,851	229	Deferred Tax Asset (Liabilities) - Net

27. Laba Per Saham

27. Earnings Per Share

	2018 Rp	2017 Rp	
Laba (Rugi) yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(1,223,843)	330,962	Income (Loss) Attributable to Owners of the Company
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (lembar)	1,137,579,698	1,137,579,698	Weighted Average of Outstanding Shares (shares)
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	(1,076)	291	Basic Earnings (Loss) per Share (Full Rupiah)

**28. Saldo dan Transaksi dengan
Pihak Berelasi**

**28. Balances and Transactions with
Related Parties**

Grup dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

In its normal activities, the Group has transactions with related parties with details as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Asset and Liabilities	
			2018 %	2017 %
Piutang Lain-Lain / Other Receivables (Catatan / Note 6)				
PT Sekawan Abadi Prima	18	28	0.00	0.00
Utang Usaha / Trade Payables (Catatan / Note 12)				
PT Sekawan Abadi Prima	486	9,578	0.01	0.11
			Persentase terhadap Jumlah Beban yang Bersangkutan dan Penghasilan Komprehensif Lain/ Percentage to Respective Total Expense and Other Comprehensive Income	
	2018 Rp	2017 Rp	2018 %	2017 %
Beban Imbalan Kerja / Employee Benefits Expense Komisaris dan Direksi / Commissioners and Directors				
Imbalan Jangka Pendek - Komisaris / Short-Term Benefits - Commissioners	1,577	1,424	1.50	1.36
Imbalan Jangka Pendek - Direksi / Short-Term Benefits - Directors	13,544	18,023	12.89	17.19
Imbalan Kerja Jangka Panjang / Long-Term Employment Benefits	1,459	1,350	9.53	18.40

Hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The relationship and nature of account or transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan dengan Perusahaan/ Relationship	Transaksi/ Transaction
1.	PT Sekawan Abadi Prima	Di bawah Pengendalian Bersama/ <i>Under Common Control</i>	Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ <i>Other Receivables and Trade Payables</i>
2.	Komisaris dan Direksi/ <i>Commissioners and Directors</i>	Manajemen Kunci/ <i>Key Management</i>	Beban Imbalan Kerja/ <i>Employee Benefits Expenses</i>

Utang usaha kepada PT Sekawan Abadi Prima merupakan utang atas pekerjaan penempatan perangkat telekomunikasi dan pemeliharaan menara dan sarana penunjang.

Trade payables to PT Sekawan Abadi Prima is payable for telecommunications equipment placement service and towers and supporting equipment maintenance service.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All transactions with related parties have been disclosed in the consolidated financial statements.

29. Instrumen Keuangan Manajemen Risiko Keuangan

29. Financial Instruments Financial Risks Management

a. Faktor-faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko-risiko keuangan dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas: Grup menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar terdiri dari:
 - (i) Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
 - (ii) Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
 - (iii) Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.

a. Factor and Policies of Financial Risk Management

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to financial risks and defines those risks as follows:

- *Credit risk: the possibility that a customer will not pay all or a portion of a receivable or will not pay in a timely manner and therefore will cause a loss to the Group.*
- *Liquidity risk: the Group defines collectibility risk of trade receivables as mentioned above, therefore, will have a difficulty in paying its obligations related to its financial liabilities.*
- *Market risk consist of:*
 - (i) *Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.*
 - (ii) *Interest rate risk is the risk of fluctuations in the fair value of financial instruments that caused the changes in market interest rates.*
 - (iii) *Price risk is risk of fluctuation in the value of financial instruments as a result of changes in market price.*

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Grup memiliki beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini antara lain, adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *offsetting* alami antara penjualan dan biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup memiliki instrumen derivatif berupa kontrak swap dalam opsi tingkat bunga dan selisih kurs untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018		2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	
Pinjaman yang diberikan dan Piutang					Loan and Receivables
Kas dan Bank	147,045	147,045	280,149	280,149	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	1,005,389	1,005,389	754,948	754,948	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	247,934	247,934	253,897	253,897	Accrued Income
Piutang Lain-lain	26,335	26,335	28,291	28,291	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	352,366	352,366	265,832	265,832	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,779,069	1,779,069	1,583,117	1,583,117	Total

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

In order to manage those risks effectively, the Group has certain strategies of financial risks management, which are in line with the corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks exposed by the Group.

The major guidelines of this policy are as follows:

- *Minimize fluctuation risk of interest rate, currency and market risk for all type of transactions.*
- *Maximize the use of favorable the "natural hedge" as much as possible which allowed natural off-setting between revenue and costs and payables/loans and receivables denominated in the same currency. Similar strategy is also applied to interest rate risk.*
- *All financial risk management activities are carried out and monitored.*
- *All risk management activities are conducted wisely and consistently and follow the best market practice.*

At the date of statement of financial position the Group has cross currency and interest rate swap and option contracts to anticipate possible risks that may occur.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers, clients or counterparties that fail to meet their contractual obligations. The Group's financial instruments that have the potential credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, other current financial assets and other non-current financial assets.

Total maximum credit risk exposure of financial assets on December 31, 2018 and 2017 are as follows:

The Group manages credit risk by setting limits on the amount of risk that is acceptable to each customer and to be more selective in choosing banks and financial institutions, only reputable and well-known banks and financial institutions are chosen.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menganalisis aset yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang ditentukan secara individu mengalami penurunan nilai:

The following tables analyze assets that have matured but not impaired and are not yet due and not impaired as well as financial assets that are individually determined to be impaired:

2018							
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Overdue But not Impaired			Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Yet Due and Not Impaired		Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
0 - 30 hari/ days	31 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Perusahaan Perbankan/ Banking Company	Perusahaan Bukan Perbankan/ Non-Banking Company			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman yang diberikan dan Piutang							Loan and Receivables
Kas dan Bank	--	--	146,773	272	--	147,045	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	4,674	6,403	--	991,283	29,495	1,034,884	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	--	--	--	247,934	--	247,934	Accrued Income
Piutang Lain-lain	--	--	--	26,335	--	26,335	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	3,457	423,263	426,720	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	4,674	6,403	146,773	1,269,281	452,758	1,882,918	Total

2017							
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Overdue But not Impaired			Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Yet Due and Not Impaired		Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
0 - 30 hari/ days	31 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Perusahaan Perbankan/ Banking Company	Perusahaan Bukan Perbankan/ Non-Banking Company			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman yang diberikan dan Piutang							Loan and Receivables
Kas dan Bank	--	--	280,000	149	--	280,149	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	93,225	1,024	--	424,563	--	754,948	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	--	--	--	253,897	--	253,897	Accrued Income
Piutang Lain-lain	--	--	--	28,291	--	28,291	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	2,815	123,797	126,612	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	93,225	1,024	280,000	709,815	123,797	1,443,997	Total

Atas saldo yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Grup mencatat cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha masing-masing sebesar Rp29.495 dan nihil (Catatan 4), serta piutang lain-lain yang direstrukturisasi Rp423.263 dan Rp123.797 (Catatan 11).

For amount due in December 31, 2018 dan 2017 the Group has recorded allowance for impairment loss of trade receivable amounting to Rp29,495 and Nil (Note 4), respectively, and restructured other receivables amounted to Rp423,263 and Rp123,797 (Note 11).

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Liquidity Risk

At present the Group expects to pay all liabilities at their contractual maturity. In order to meet such cash commitments, the Group expects its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group holds liquid financial assets and available to meet liquidity needs.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan. Jumlah liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan dalam satu tahun sejak 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp675.282 dan Rp196.066 serta liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan lebih dari satu tahun sejak 31 Desember 2018 dan 2017 (sebelum dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi) adalah masing-masing sebesar Rp7.341.305 dan Rp7.852.384.

The Group manages liquidity risk by monitoring projections of actual cash flow continuously and supervises the maturity of its financial liabilities. Total financial liabilities with expected payments within one year are Rp675,282 and Rp196,066 as of December 31, 2018 and 2017, respectively, and those that are due for payments more than one year as of December 31, 2018 and 2017 (before deduction of unamortized transaction costs) are Rp7,341,305 and Rp7,852,384, respectively.

Risiko Pasar

(i) Risiko Tingkat Bunga

Grup terekspos risiko perubahan tingkat bunga terutama menyangkut pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga mengambang. Grup mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi swap dan opsi tingkat bunga (Catatan 11).

Market Risk

(i) Interest Rate Risk

The Group is exposed to interest rate risk which mainly related to its long-term loans that bears floating interest rate. The Group managed the interest rate risk by entered into interest rate swap and option transactions (Note 11).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

The following table presents an analysis of financial liabilities by type of interest:

	2018 Rp	2017 Rp	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Tanpa Bunga	92,516	196,066	Non-Interest Bearing
Bunga Mengambang	7,924,071	3,787,984	Floating Interest Bearing
Suku Bunga Tetap	--	4,064,400	Fixed Interest
Jumlah Liabilitas Keuangan	8,016,587	8,048,450	Total Financial Liabilities

Analisa sensitivitas:

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika suku bunga mengambang pada tanggal tersebut lebih tinggi sebanyak 10 basis poin dengan semua variable lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun berjalan akan lebih rendah sebesar Rp7.924.

Sensitivity analysis:

As at December 31, 2018, if the floating interest rate at that date were to be higher by 10 basis point, with all variable remain constant, the consolidated income before tax would be lower by Rp7,924.

Sebaliknya, jika pada tanggal 31 Desember 2018, jika suku bunga mengambang pada tanggal tersebut lebih rendah sebanyak 10 basis poin dengan semua variable lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp7.924.

As at December 31, 2018, if the floating interest rate at that date were to be lower by 10 basis point, with all variable remain constant, the consolidated income before tax would be higher by Rp7,924.

(ii) Risiko Valuta Asing

Grup terekspos risiko valuta asing terutama menyangkut pinjaman jangka panjang dan bunganya. Grup mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi swap dan opsi selisih kurs (Catatan 11).

(ii) Foreign Currency Risks

The Group is exposed to foreign currency risk which mainly related to its long-term loans and its interest. The Group managed the foreign currency risk by entered into cross currency swap and option transactions (Note 11).

(iii) Risiko Harga

Grup tidak memiliki risiko harga pasar karena tidak memiliki aset atau liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar.

(iii) Price Risks

The Group has no price risk as it has no financial assets or liabilities which are traded at the market.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Jumlah tercatat untuk kelompok aset dan liabilitas keuangan jangka pendek, instrumen derivatif maupun yang tidak ditentukan jatuh temponya, telah mencerminkan nilai wajarnya. Sedangkan jumlah tercatat untuk pengukuran nilai wajar tagihan dan utang derivatif diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian dengan input porsi yang dapat di observasi (Tingkat 2).

b. Fair Value of Financial Instruments

The carrying amount for group of short-term financial assets and liabilities, derivatif instrument or with indefinite period, have reflected their fair value. Whereas the carrying amount for measurement of derivative receivable and payable is estimated by using valuation techniques with observable input portions (Level 2).

Investasi dalam instrumen ekuitas, yaitu obligasi wajib konversi, yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments, i.e. mandatory convertible bonds, that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

30. Segmen Operasi

Segmen Operasi:

Grup hanya menghasilkan satu jenis jasa yang signifikan, yang tidak memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses, klasifikasi pelanggan dan distribusi jasa (Catatan 21).

Wilayah Geografis:

Seluruh menara dan sarana penunjang Grup berlokasi dan beroperasi di Indonesia.

Pelanggan Utama:

Terdapat beberapa pelanggan eksternal tunggal dengan nilai transaksi pendapatan melebihi 10% pendapatan konsolidasian. Pelanggan-pelanggan tersebut telah diungkapkan secara rinci pada Catatan 21.

30. Operating Segment

Operating Segment:

The Group only produces one type of service significantly, which does not have different characteristics in the process, customer classification and distribution services (Note 21).

Geographical Areas:

All of the Group's towers and supporting equipment are located and operating in Indonesia.

Major Customer:

There are some single external customer revenue transactions with a value exceeding 10% of consolidated revenues. Those customers have been disclosed in detail in Note 21.

31. Perjanjian dan Perikatan Signifikan

a. Perjanjian Sewa Menara BTS

Grup memiliki perjanjian sewa dengan para pelanggan sebagai berikut:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 dan 2013, Grup dan BTEL menandatangani perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa menara BTS milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan BTEL dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.SusPKPU/204/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara BTEL dengan para kreditor terkait, termasuk Grup ("Perjanjian Perdamaian"), dimana utang sewa BTEL kepada Grup akan dibayarkan melalui mekanisme Cash Waterfall, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi wajib konversi (Catatan 11).

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah mengalihkan sebagian Piutang BTEL sejumlah Rp97.500 kepada pihak ketiga.

31. Significant Agreements and Commitments

a. BTS Tower Lease Agreement

The Group has lease agreements with tenants as follows:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)

On a number of dates between 2007 and 2013, the Group and BTEL signed Agreements, as amended several times, regarding the lease of the Group's BTS tower. The agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted BTEL a Temporary Suspension of Payment (the "TSOP") based on TSOP case No. 59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt. Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by BTEL and the respective creditors, including Group (the "Settlement Agreement"), which the lease liability of BTEL to Group will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds (Note 11).

In December 2015, the Company has transferred partly BTEL receivable of Rp97,500 to a third party.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Menindak lanjuti Perjanjian Perdamaian, BTEL telah mendapat persetujuan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Pada tanggal 20 September 2016, BTEL menyampaikan Sertifikat asli OWK atas nama PT Solusi Tunas Pratama Tbk / Grup sebagai pelaksanaan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Perjanjian Sewa Menara yang telah ada antara Grup dan BTEL.

Pada tanggal 3 April 2017, BTEL dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembatalan OWK atas dasar bahwa Perusahaan tidak menuntut/tidak mengakui haknya atas sebagian OWK yang telah diterbitkan. Setelah dilakukannya Perjanjian Pembatalan Obligasi Wajib Konversi, pada bulan yang sama yaitu April 2017, BTEL kembali menerbitkan Sertifikat asli OWK atas nama Perusahaan dengan nilai OWK yang telah disepakati bersama pada Perjanjian Pembatalan Obligasi Wajib Konversi.

Nilai wajar OWK diestimasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Rao, Yuhai & Rekan, penilai independen dengan hasil Nil. Nilai wajar dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas Bersih untuk pendekatan pendapatan.

2. PT First Media Tbk (FM) dan PT Internux (INUX)

Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup dan FM pada tanggal 12 Juli 2010, sebagaimana diubah dengan amandemen terakhir tanggal 1 Oktober 2012, FM sepakat untuk menyewa BTS dari Grup dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu Perjanjian adalah 8 (delapan) tahun sejak penandatanganan Berita Acara Sewa. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan addendum tanggal 1 Oktober 2013, disepakati INUX menggantikan FM sebagai penyewa.

Pada bulan Juli 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), entitas anak, menandatangani Perjanjian Pembayaran Sebagian Hutang dengan INUX. Sebagian hutang dari INUX kepada BIT dibayar dengan INUX mengalihkan seluruh Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan Intercity dan Kabel Laut Serat Optik senilai Rp70.000.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Following the Temporary Suspension of Payment, BTEL obtained approval to provide the additional capital without right issue by issuance of Mandatory Conversion Bonds (OWK). In September 20, 2016, BTEL has issued original OWK Certificate for PT Solusi Tunas Pratama Tbk / the Group, as part of the Settlement Agreement in accordance with the Tower Leased Agreement between the Group and BTEL.

On April 3, 2017, BTEL and the Company signed the Cancellation Agreement of OWK. That Agreement clarified about the Company not recognize its right of OWK which has been issued. After the Cancellation Agreement of OWK was done, on the same month of April 2017, BTEL issued OWK Certificate in the name of the Company with balance of OWK that has been agree together on this Mandatory Conversion Bonds Cancellation Agreement.

The fair value of OWK estimated by KJPP Rao, Yuhai & Rekan, independent appraiser, with amounted to Nil. Fair value was calculated using Discounted Cash Flows method on income approach.

2. PT First Media Tbk (FM) and PT Internux (INUX)

Based on Lease Agreement of Telecommunication Infrastructure Facility between the Group and FM dated July 12, 2010, as the latest amended on October 1, 2012, FM agreed to lease BTS towers from the Group in accordance with the agreed lease price. The term of the agreement is 8 (eight) years starting from the lease start date (Berita Acara Sewa) and can be extended with consent of both parties. Based on amendment on October 1, 2013, it's agreed that INUX replaced FM as a tenant.

In July 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), a subsidiary, signed a Payment Agreement for Part of Debt with INUX. Part of the debt from INUX to BIT is paid with the Right to Use Intercity Network Capacity and Fiber Optic Sea Cables amounted to Rp70,000.

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan INUX dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana utang sewa INUX kepada Grup akan dibayarkan dengan bertahap selama 10 (Sepuluh) tahun sehingga direklasifikasi dari piutang usaha ke aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 11).

Berdasarkan surat tertanggal 28 Desember 2018, masing-masing FM dan INUX memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri sewa lebih awal dari jangka waktunya, efektif terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018.

On September 17, 2018, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted INUX a Temporary Suspension of Payment (PKPU) based on No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, which the lease liability of INUX to the Group will be paid by installment for 10 (ten) years, then reclassified from trade receivables to other non-current financial assets (Note 11).

Based on the letter dated December 28, 2018, each FM and INUX notify their intention to early terminate the lease period, effective as of December 31, 2018.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2017, Grup dan Indosat menandatangani beberapa perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai penyewaan perangkat telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates between 2009 and 2017, the Group and Indosat signed agreements, as amended several times, regarding lease of telecommunication equipments owned by the Group. This agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2016, Grup dan Telkomsel menandatangani perjanjian sewa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menara milik Grup. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates between 2009 and 2016, the Group and Telkomsel signed lease agreement, as amended several times, regarding the leasing of the Group's BTS towers. These agreements are valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smart)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2013, Perusahaan dan Smart menandatangani perjanjian induk, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amendemen, mengenai sewa menyewa fasilitas infrastruktur telekomunikasi. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smart)

On a number of dates between 2009 and 2013, the Company and Smart entered into master agreement, as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure facilities. The agreement is valid for 10 (ten) years from the date of agreed Minutes (Berita Acara) by both parties and can be extended with the consent of both parties.

Pada berbagai tanggal di tahun 2007, entitas anak dan Smart menandatangani perjanjian sewa, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai penyewaan menara infrastruktur. Jangka waktu perjanjian adalah 11 (sebelas) tahun.

On several dates in 2007, subsidiary and Smart signed lease agreement, as amended, several times, regarding lease of tower infrastructure. The agreement's valid for 11 (eleven) years.

6. PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Pada berbagai tanggal antara 2010 dan 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan HCPT, Perusahaan akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk kolokasi pengoperasian peralatan komunikasi HCPT. Perjanjian ini berlaku untuk 10-12 (sepuluh – dua belas) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pada bulan Juni 2018, PT BIT Teknologi Nusantara, Entitas Anak, mengadakan perjanjian dengan HCPT mengenai penyewaan jaringan serat optik dengan skema Indefeasible Right to Use (IRU) dalam rangka fiberisasi site-site HCPT. Perjanjian ini memiliki jangka waktu sepuluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya dengan kesepakatan para pihak.

7. PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Axis Telekom (Axis)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2014, Grup dan XL mengadakan perjanjian dalam rangka sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Efektif pada tanggal 8 April 2014 (tanggal efektif peleburan), penggabungan usaha Axis (dahulu PT Natrindo Telepon Selular) dan XL telah selesai dilakukan. Untuk itu pada tanggal efektif penggabungan usaha tersebut, XL mengambil alih semua hak, kepemilikan, dan kepentingan termasuk kewajiban-kewajiban perjanjian sehubungan dengan sites yang disewakan/ digunakan oleh Axis (Perjanjian Axis).

Efektif sejak tanggal 1 April 2014, Perusahaan dan XL menyetujui untuk mengalihkan semua Perjanjian Axis (termasuk perjanjian sewa menara antara Perusahaan dengan PT Ericsson Indonesia dan PT Ericsson Indonesia dengan Axis) sehubungan dengan sites yang disewa oleh Axis; dan efektif pada tanggal 1 April 2014, semua kewajiban-kewajiban terkait Perjanjian Axis sebelum tanggal efektif merger akan ditanggung dan dibayar oleh XL.

6. PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

On a number of dates between 2010 and 2013, the Company entered into agreement with HCPT whereas the Company shall provide locations and facilities to HCPT for the operations of its communication equipments. The agreement is valid for 10-12 (ten – twelve) years and can be extended with the consent of both parties.

On June 2018, PT BIT Teknologi Nusantara, a Subsidiary, entered an agreement with HCPT regarding lease of fiber optic with Indefeasible Right to Use (IRU) scheme for HCPT's sites. This agreement is valid for ten years since the agreement was signed and can be extended for the next five years with the consent of both parties.

7. PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Axis Telekom (Axis)

On a number of dates between 2009 and 2014, the Group and XL entered into lease agreements of telecommunication infrastructure owned by the Group. Validity of the agreement is 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

Effective as of April 8, 2014 (the effective date of merger), the merger of Axis (formerly PT Natrindo Telepon Seluler) and XL has been completed, therefore upon the effective date of merger, XL take over all rights, title, and interest including obligations and liabilities under any ongoing agreements that Axis has entered in relation to the Company's sites that are leased/used by Axis (Axis Agreements).

Effective from April 1, 2014, the Company and XL have agreed to transfer the effectiveness of all Axis Agreements (including tower lease agreement between the Company and PT Ericsson Indonesia and between PT Ericsson Indonesia and Axis) with respect to certain sites previously leased by Axis; and effective as of April 1, 2014, all Axis outstanding liability under Axis Agreement before the effective date of merger shall be borne and paid by XL.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 antara Perusahaan dan STI, STI akan menyewa menara BTS milik Perusahaan dengan kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu perjanjian adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal serah terima dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan kedua belah pihak.

9. PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)

Pada bulan Maret 2017, Perusahaan menandatangani kontrak payung dengan ICON+ mengenai kerjasama atas pemanfaatan sarana telekomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pada bulan Desember 2017, PT BIT Teknologi Nusantara, entitas anak, menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pembangunan Jaringan Fiber Optik.

b. Perjanjian Penting Lainnya

1. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Menara BTS dengan PT Sekawan Abadi Prima (SAP)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 dan 2016, sebagaimana dilakukan amandemen terakhir pada 29 Januari 2017, Perusahaan dan SAP, pihak berelasi, menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Pekerjaan Site Acquisition dan/ atau Pekerjaan Material Civil Mechanical Electrical untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dimana Perusahaan menunjuk SAP sebagai kontraktor Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Perjanjian Pengalihan Menara dengan PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Berdasarkan perjanjian tanggal 10 Januari 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan menara dengan HCPT untuk membeli sejumlah menara sampai dengan 300 menara yang berlaku efektif 31 Desember 2012.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Based on lease agreement No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 made between the Company and STI dated December 5, 2011, STI agreed to lease BTS towers from the Company with compensation as agreed. The term of the agreement is 5 (five) years starting from the lease commencement date and can be extended for 5 (five) years with the consent of both parties.

9. PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)

On March 2017, the Company signed the Framework Contract with ICON+ regarding coordination of establishment the usage of telecommunication infrastructures that is owned by each parties.

In December 2017, PT BIT Teknologi Nusantara, a subsidiary, signed a Cooperation Agreement on Provision and Development of Optical Fiber Networks.

b. Other Significant Agreements

1. BTS Tower Development Cooperation Agreement with PT Sekawan Abadi Prima (SAP)

On a number of dates between 2008 and 2016, as latest amended on January 29, 2017, the Company and SAP, a related party, signed Master Agreement of Site Acquisition and/ or Material Civil Mechanical Electrical Work for Telecommunication Equipment Placement wherein the Company appointed SAP as a contractor of the Company. This agreement is valid for 1 year and can be extended with the consent of both parties.

2. Tower Transfer Agreement with PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Based on agreement dated January 10, 2013, the Company entered into tower transfer agreement with HCPT to purchase certain towers up to 300 towers, which effective on December 31, 2012.

3. [Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pemeliharaan dan Manajemen Akses beserta Keamanan Lahan Infrastruktur Telekomunikasi dengan PT Indah Pratama Abadi (IPA)]

Pada tanggal 25 September 2018 telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pemeliharaan antara Perusahaan dan IPA, Perusahaan menunjuk IPA untuk melakukan jasa pemeliharaan sesuai dengan syarat ketentuan dan harga yang diatur dalam Perjanjian.

4. Perjanjian Pembelian Aset dengan PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada tanggal 30 September 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian aset dengan XL sebanyak 3.500 menara dengan harga pembelian Rp5.600 dan Perusahaan setuju untuk menyewakan kembali menara tersebut kepada XL sejak penutupan transaksi tanggal 23 Desember 2014.

5. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan PT Harapan Utama Prima (HUP)

Berdasarkan Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan HUP tanggal 29 September 2017. Perusahaan menunjuk HUP untuk melakukan jasa pemeliharaan infrastruktur menara telekomunikasi.

3. Cooperation Agreement of Maintenance, Access Management and Security Services of Telecommunication Infrastructure Work with PT Indah Pratama Abadi (IPA)

On September 25, 2018 a Maintenance Agreement was signed between the Company and IPA, the Company has appointed IPA to perform maintenance services with term and conditions, and certain prices as stipulated in the agreement.

4. Asset Purchase Agreement with PT XL Axiata Tbk (XL)

On September 30, 2014, the Company entered into asset purchase agreement with XL of 3,500 towers with purchase price of Rp5,600 and the Company agreed to lease back the towers to XL starting from the closing dated December 23, 2014.

5. Cooperation Agreement on Infrastructure Maintenance of Telecommunication Tower with PT Harapan Utama Prima (HUP)

Based on Cooperation Agreement on Infrastructure Maintenance of Telecommunication Tower with HUP dated September 29, 2017. The Company appoints HUP to maintain the service of telecommunication tower infrastructure.

32. Komitmen Pendapatan Sewa Operasi

Pada akhir periode pelaporan, estimasi jumlah pendapatan sewa minimum di masa depan yang dilakukan dengan sewa operasi adalah sebagai berikut:

	2018 Rp	2017 Rp
Kurang dari Satu Tahun	1,727,147	1,806,895
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	5,770,982	6,524,395
Lebih dari Lima Tahun	386,770	1,048,911
Pendapatan Sewa Tahun Berjalan	1,899,775	1,908,487

32. Operating Income Lease Commitment

At the end of the reporting period, the estimate of total future minimum lease income committed under operating leases are as follows:

Not Later than One Year
More than One Year and not Later than Five Years
Later than Five Years
Rental Income for the Year

33. Pengelolaan Permodalan

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

33. Capital Management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Group, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

Grup memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas. Rasio dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pinjaman bersih dihitung dengan mengurangi jumlah pokok pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (bagian pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya (Catatan 15 dan 16)) dengan kas dan bank.

The Group monitors capital on the basis of the Group's net debt to equity ratio. The ratio is calculated as net debt divided by total equity attributable to owners of the parent. Net debt is calculated as total principal of syndicated bank loan and bond payable (the portion of foreign currency loan is valued using its hedging rate (Notes 15 and 16)) less cash on hand and in banks.

Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The net debt to equity ratio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Pokok Pinjaman Diukur dengan Kurs Lindung Nilai	7,924,071	7,578,172	Principal Loan Using with Hedging Rate
Dikurangi:			Less:
Kas dan Bank	(147,045)	(280,149)	Cash on Hand and in Banks
Pinjaman Bersih	7,777,026	7,298,023	Net Borrowings
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2,969,905	4,093,410	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Rasio Pinjaman Bersih terhadap Ekuitas	2.62	1.78	Net Debt to Equity

34. Transaksi Nonkas

34. Non-Cash Transactions

a. Transaksi Non-Kas

Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

- Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 penambahan aset tetap yang berasal dari uang muka masing-masing adalah sebesar Rp4.758 dan Rp12.085.
- Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 penambahan aset tetap yang masih terutang masing-masing adalah sebesar Rp11.150 dan Rp24.264.
- Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 penambahan sewa lahan yang masih terutang adalah sebesar Rp20.511.

a. Non-Cash Transactions

The followings are investing and financing activities not affecting cash flows:

- *For the years ended December 31, 2018 and 2017, addition of property and equipment from advance amounted to Rp4,758 and Rp12,085, respectively.*
- *For the years ended December 31, 2018 and 2017, addition of property and equipment unpaid amounted to Rp11,150 and Rp24,264, respectively.*
- *For the year ended December 31, 2017, addition of land lease unpaid amounted Rp20,511.*

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus kas/ Cash Flows	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Movement				Saldo Akhir/ Ending Balance
			Pergerakan Valuta Asing Foreign Exchange Movement	Saling Hapus dengan Beban Bunga/ Net Off with Interest Expense	Amortisasi Amortization		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	--	360,000	--	--	--	--	360,000
Utang Bank Sindikasi Jangka Panjang Long-Term Syndicated Bank Loans	3,649,029	3,111,473	270,211	59,317	266,799		7,356,829
Utang Obligasi Bond Payable	4,019,204	(4,123,500)	59,100	--	45,196		--

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

35. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis"
- PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman"
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan"
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama"
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

35. Standard and Interpretations Issued not Yet Adopted

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the current period.

Amendment and improvement to standards, and Interpretation of standards which effective for the periods beginning on or after January 1, 2019, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 22 (Improvement 2018): "Business Combination"
- PSAK 24 (Amendment 2018): "Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement"
- PSAK 26 (Improvement 2018): "Borrowing Cost"
- PSAK 46 (Improvement 2018): "Income Taxes"
- PSAK 66 (Improvement 2018): "Joint Arrangement"
- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- ISAK 34: "Uncertainty over Income Tax Treatments"

The following are new standard and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption is permitted:

- PSAK 71: "Financial Instrument"
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer"
- PSAK 73: "Lease"
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract"
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"

- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation"

Until the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments these standards.

36. Informasi Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

37. Tanggung Jawab dan Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 27 Maret 2019.

36. Supplementary Information

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity, and statement of cash flows for the year then ended, and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

37. Responsibility and Authorisation of Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements. The consolidated financial statements has been authorised for issuance by the Directors on March 27, 2019.

Lampiran I

Appendix I

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)**

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2018 and 2017

(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	86,246	218,136	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	960,468	668,283	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	193,019	196,377	Accrued Income
Piutang Lain-lain	216,188	225,421	Other Receivables
Persediaan	1,191	1,191	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	275,393	374,820	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	239,361	234,966	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	1,971,866	1,919,194	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	756,218	775,596	Advances and Prepaid Expenses - Net of Current Portion
Investasi pada Entitas Anak	1,211,188	1,025,629	Investment in Subsidiaries
Aset Tetap	7,130,337	8,272,177	Property and Equipment
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	352,199	265,765	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	32	21	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	9,449,974	10,339,188	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	11,421,840	12,258,382	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Trade Payables
Pihak Berelasi	453	9,569	Related Parties
Pihak Ketiga	7,368	12,549	Third Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	107	21	Other Current Financial Liabilities
Utang Pajak	6,684	8,544	Taxes Payable
Akrual	61,801	56,377	Accruals
Pendapatan Ditangguhkan	803,845	586,602	Deferred Income
Utang Bank Jangka Pendek	360,000	--	Short-Term Syndicated Loan
Bagian Lancar atas Utang Bank Sindikasi Jangka Panjang	222,766	--	Current Portion of Long-Term Syndicated Bank Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,463,024	673,662	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Sindikasi Jangka Panjang	7,134,063	3,649,029	Long-Term Syndicated Bank Loans
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	24,516	22,121	Long-Term Employment Benefit Liabilities
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	4,078,054	Due to Related Party - Non-Trade
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7,158,579	7,749,204	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	8,621,603	8,422,866	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per Saham			Share Capital - Rp100 Par Value per Share
Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham			Authorized Capital - 2,000,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.137.579.698 Saham tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	113,758	113,758	Issued and Paid-Up Capital - 1,137,579,698 Shares as of December 31, 2018 and 2017
Tambahan Modal Disetor - Bersih	3,589,495	3,589,495	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(367,238)	(402,492)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba (Defisit)	(535,778)	534,755	Retained Earnings (Deficit)
Jumlah Ekuitas	2,800,237	3,835,516	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11,421,840	12,258,382	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran II

Appendix II

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)
STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
PENDAPATAN	1,667,768	1,708,870	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN			COST OF REVENUES
Penyusutan dan Amortisasi	267,622	235,113	Depreciation and Amortization
Beban Pokok Pendapatan Lainnya	74,199	81,246	Other Cost of Revenues
Jumlah	341,821	316,359	Total
LABA BRUTO	1,325,947	1,392,511	GROSS PROFIT
Beban Usaha			Operating Expenses
Penyusutan dan Amortisasi	(20,263)	(18,812)	Depreciation and Amortization
Beban Usaha Lainnya	(114,994)	(114,589)	Other Operating Expenses
Jumlah	(135,257)	(133,401)	Total
LABA USAHA	1,190,690	1,259,110	OPERATING PROFIT
Penghasilan Bunga	7,751	19,848	Interest Income
Beban Keuangan			Financial Charges
Beban Bunga	(534,334)	(496,371)	Interest Expense
Beban Keuangan Lainnya	(407,194)	(537,266)	Other Financial Charges
Penurunan Nilai dari Revaluasi Aset Tetap	(919,255)	--	Decline in Value of Revaluation of Property and Equipment
Beban Lain-lain - Bersih	(408,185)	(76,652)	Other Expense - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(1,070,527)	168,669	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(6)	150,956	Income Tax Benefits (Expense)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(1,070,533)	319,625	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	5,104	196	Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(6)	(1,156)	Income Tax of Remeasurement of Defined Benefits Plan
Kenaikan (Penurunan) Bersih Atas Revaluasi Menara	156,222	(614,940)	Net Increase (Decrease) in Revaluation of Tower
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas	(126,066)	(301,730)	Effective Portion of Loss on Hedging Instrument in order for Cash Flow Hedge
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	35,254	(917,630)	Total Other Comprehensive Income in the Year Net off Tax
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(1,035,279)	(598,005)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

Lampiran III

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Appendix III

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2018 and 2017

(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor - Bersih/ <i>Additional Paid-in Capital - Net</i>	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ <i>Other Comprehensive Income</i>			Saldo Laba (Defisit) / <i>Retained Earnings (Deficits)</i>			Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
			Lindung Nilai Arus Kas/ <i>Cash Flow Hedge</i>	Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang/ <i>Net increase in Revaluation of Tower and Supporting Equipment</i>	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ <i>Remeasurment of Defined Benefits Plan</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Yang Telah Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Yang Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016	113,758	3,589,495	54,338	479,062	2,082	535,482	22,900	171,886	194,786	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2016
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2017										<i>Movements in Equity in 2017</i>
Reklasifikasi ke Surplus Revaluasi ke Saldo Laba	--	--	--	(20,344)	--	(20,344)	--	20,344	20,344	<i>Reclassification of Revaluation Reserve to Retained Earning</i>
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(301,730)	(614,940)	(960)	(917,630)	--	319,625	319,625	<i>Total Comprehensive Income (Loss) for the Year</i>
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017	113,758	3,589,495	(247,392)	(156,222)	1,122	(402,492)	22,900	511,855	534,755	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2017
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2018										<i>Movements in Equity in 2018</i>
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(126,066)	156,222	5,098	35,254	--	(1,070,533)	(1,070,533)	<i>Total Comprehensive Income (Loss) for the Year</i>
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018	113,758	3,589,495	(373,458)	--	6,220	(367,238)	22,900	(558,678)	(535,778)	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018

Lampiran IV

Appendix IV

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)**

STATEMENTS OF CASHFLOWS

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1,596,184	2,063,492	Cash Received from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya	(83,937)	(43,902)	Payment to Suppliers and Others
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan	(90,745)	(81,992)	Payments for Management and Employees
Penerimaan Bunga	7,751	19,848	Interest Received
Penerimaan Restitusi Pajak	16,788	60,619	Receipts from Tax Refund
Pembayaran Pajak Penghasilan	(24,828)	(22,767)	Cash Paid For Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1,421,213	1,995,299	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Aset Tetap			Property and Equipment
Pengadaan	(101,778)	(222,060)	Procurement
Penambahan Investasi di Entitas Anak	(185,558)	--	Additional of Investment in Subsidiary
Pembayaran Sewa Lahan	(200,047)	(386,023)	Payments for Ground Lease
Penerimaan Dividen	41	41	Proceeds of Dividend
Uang Muka Konstruksi	(3,082)	(1,449)	Advances for Construction
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(490,424)	(609,491)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Transaksi Utang Sindikasi			Syndicated Loan Transactions
Penerimaan	3,979,763	--	Proceeds
Pembayaran	(508,290)	(406,576)	Payments
Pembayaran Beban Keuangan	(367,976)	(913,417)	Payment of Financial Charges
Penerimaan dari (Pembayaran ke) Entitas anak	(4,156,127)	17,287	Receipt from (Payment to) Subsidiaries
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1,052,630)	(1,302,706)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(121,841)	83,102	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK	(10,049)	(138)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	218,136	135,172	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEARS
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	86,246	218,136	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEARS

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)

OTHER DISCLOSURES

For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

**2. Daftar Investasi pada Entitas Anak
 Dengan Kepemilikan Langsung**

**2. Schedule of Investment in Subsidiaries
 with Direct Ownership**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Sarana Inti Persada	Bandung	99.87%
PT Platinum Teknologi	Jakarta	99.99%
Pratama Agung Pte. Ltd.	Singapura	100%

3. Metode Pencatatan Investasi

3. Method of Investment Recording

Investasi pada entitas anak dengan kepemilikan langsung sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Investment in subsidiaries with direct ownership as mentioned in the financial statements of parent entity is recorded using cost method.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan
Blok C1, Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210

Telp. **+62 21 5794 0688**
Faks. **+62 21 5795 0077**

www.stptower.com